



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
- b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (PSAL);**
- c. Neraca;**
- d. Laporan Operasional (LO);**
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);**
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan**
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).**

Laporan Keuangan tersebut sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami selaku Pj. Bupati Sanggau.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah di Reviu oleh Inspektorat.

Sanggau, 10 Juni 2024

Pj. BUPATI SANGGAU



SUHERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

LAPORAN KEUANGAN



UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor :
Tanggal : 10 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan Rahmat dan Anugerahnya seluruh rangkaian kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan ekuitas dana serta perhitungannya yang mencakup 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca Daerah, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebagai suatu Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan sebagai dasar pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca Daerah, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan tujuan dapat memberikan informasi mengenai:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran;
- 2) Sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD;

- 3) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Posisi keuangan dalam kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman;
- 5) Perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Semoga dengan disampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat menjadi jembatan menuju pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai perwujudan *good governance* dan *clean governance*.

Sanggau, 10 Juni 2024

Pj. BUPATI SANGGAU



SUHERMAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	1
HALAMAN DEPAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	5
BAGIAN I LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8
BAGIAN II LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	11
BAGIAN III NERACA	12
BAGIAN IV LAPORAN OPERASIONAL.....	14
BAGIAN V LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	16
BAGIAN VI LAPORAN ARUS KAS.....	17
BAGIAN VII CALK	20
BAB I PENDAHULUAN	20
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	20
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	21
C. Sistematika Penulisan Catatan Astas Laporan Keuangan	24
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN, EKONOMI MAKRO DAN TARGET PERDA APBD	25
A. Kebijakan Keuangan.....	25
B. Ekonomi Makro	26
C. Target Kinerja Perda APBD	35
BAB III IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	37
A. Srategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan.....	37
B. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan	37
C. Sistem informasi Kinerja Keuangan.....	38
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	39
A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	39
B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	39
C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	39

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Kekentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	51
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	52
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	52
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	78
C. Neraca.....	79
D. Laporan Operasional (LO).....	153
E. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	179
F. Laporan Arus Kas (LAK).....	182
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN	186
A. Gambaran Umum.....	186
B. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah kabupaten Sanggau	188
C. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sanggau	193
D. Sumber Daya Manusia.....	195
BAB VII PENUTUP	196

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penerimaan, Belanja dan SiLPA RSUD-BLUD
2. Penerimaan, Belanja dan SiLPA Dinkes-BLUD
3. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD
4. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana BOP Kesetaraan
5. Rekapitulasi Laporan Penerimaan dan Belanja Dana BOS
6. Rekapitulasi Piutang Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2023
7. Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023
8. Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2023
9. Piutang Transfer 2023
10. Rekapitulasi Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023
11. Rekapitulasi Piutang Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2023
12. Rekapitulasi Piutang TP/TGR Per 31 Desember 2023
13. Rekapitulasi Piutang Lain-Lain Per 31 Desember 2023
14. Rekapitulasi Beban dibayar dimuka Per 31 Desember 2023
15. Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31
16. Laporan Keuangan PDAM Tirta Pancur Aji 2023

17. Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023
18. Daftar Mutasi Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023
19. Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023
20. Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023
21. Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023
22. Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023
23. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023
24. Mutasi Aset Tak Berwujud
25. Amortisasi Aset Tak Berwujud (Neraca) Tahun 2023
26. Daftar Mutasi Aset Lainnya Tahun 2023
27. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
28. Daftar Utang PFK Tahun 2023
29. Daftar Utang Listrik, Air, Telp dan Internet
30. Daftar Utang Belanja Obat-Obatan
31. Daftart Utang Belanja Fisik

BAGIAN I**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU****LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN - LRA	1.912.236.443.149,00	1.888.904.848.547,92	98,78	1.590.132.140.159,67
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	140.734.411.884,00	159.171.289.954,57	113,10	158.524.815.808,39
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	47.671.930.716,00	65.463.342.881,00	137,32	54.173.834.811,70
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.738.393.520,00	4.513.350.527,00	66,98	5.122.541.688,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	12.364.675.032,00	12.418.340.237,00	100,43	9.601.021.628,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	73.959.412.616,00	76.776.256.309,57	103,81	89.627.417.680,69
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.770.002.896.265,00	1.729.713.708.593,35	97,72	1.429.690.286.041,28
4 . 2 . 1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.487.678.320.909,00	1.450.329.461.649,00	97,49	1.165.611.491.476,00
4 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil	366.048.135.909,00	350.155.778.885,00	95,66	179.149.164.737,00
4 . 2 . 1 . 2	Dana Alokasi Umum	790.867.392.000,00	790.852.189.873,00	100,00	741.094.341.793,00
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	118.244.076.000,00	113.442.789.115,00	95,94	53.772.555.906,00
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	212.518.717.000,00	195.878.703.776,00	92,17	191.595.429.040,00
4 . 2 . 2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	158.943.858.000,00	157.083.453.900,00	97,83	165.421.048.800,00
4 . 2 . 2 . 1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	14.447.266.000,00
4 . 2 . 2 . 2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 2 . 2 . 3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 2 . 2 . 4	Dana Desa	158.943.858.000,00	157.083.453.900,00	98,83	150.973.782.800,00
4 . 2 . 3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	123.380.717.356,00	122.300.793.044,35	99,12	98.657.745.765,28
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	118.730.717.356,00	119.853.873.554,35	100,95	97.010.459.897,28
4 . 2 . 3 . 2	Bantuan Keuangan	4.650.000.000,00	2.446.919.490,00	52,62	1.647.285.868,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.499.135.000,00	19.850.000,00	1,32	1.917.038.310,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	1.499.135.000,00	19.850.000,00	1,32	1.917.038.310,00
4 . 3 . 2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.912.236.443.149,00	1.888.904.848.547,92	98,78	1.590.132.140.159,67

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5	BELANJA	1.853.786.427.987,00	1.578.988.375.100,55	85,18	1.403.357.158.635,73
5.1	BELANJA OPERASI	1.477.088.859.014,00	1.263.642.369.572,39	85,55	1.222.672.421.386,90
5.1.1	Belanja Pegawai	698.397.537.936,00	542.035.779.176,50	77,61	538.395.089.489,50
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.364.667.182,00	643.699.925.833,89	91,91	631.556.958.441,40
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	7.082.553.900,00
5.1.5	Belanja Hibah	73.386.653.896,00	72.966.664.562,00	99,43	43.243.419.556,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00	100,00	2.394.400.000,00
5.2	BELANJA MODAL	343.708.177.789,00	310.430.127.428,16	90,32	180.255.624.199,83
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.194.604.303,00	55.196.480.481,00	96,51	49.911.050.361,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.231.974.212,00	148.677.679.734,16	95,16	44.116.614.476,83
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.405.716.366,00	95.734.545.493,00	80,18	80.427.924.503,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.606.906.208,00	9.555.573.820,00	99,47	5.800.034.859,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.268.976.700,00	1.265.847.900,00	99,75	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	32.989.391.184,00	4.915.878.100,00	14,90	429.113.049,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	32.989.391.184,00	4.915.878.100,00	14,90	429.113.049,00
5.4	BELANJA TRANSFER	270.907.108.657,00	268.777.407.033,00	99,21	240.938.586.117,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.441.032.307,00	5.217.811.100,00	95,90	4.806.915.200,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	265.466.076.350,00	263.559.595.933,00	99,28	236.131.670.917,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.124.693.536.644,00	1.847.765.782.133,55	86,97	1.644.295.744.752,73
	SURPLUS / (DEFISIT)	(212.457.093.495,00)	41.139.066.414,37	(19,36)	(54.163.604.593,06)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	226.457.093.495,00	227.107.073.494,12	100,29	305.918.391.192,18
6.1.1	Penggunaan SiLPA	204.254.786.599,00	204.254.766.598,12	100,00	305.918.391.192,18
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	22.202.306.896,00	22.852.306.896,00	102,93	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	226.457.093.495,00	227.107.073.494,12	100,29	305.918.391.192,18
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	100,00	47.500.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	100,00	17.500.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
6 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 2 . 5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	100,00	47.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	212.457.093.495,00	213.107.073.494,12	100,31	258.418.391.192,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	254.246.139.908,49		204.254.786.599,12

Sanggau, 10 Juni 2024.

Pj. BUPATI SANGGAU



SUHERMAN

BAGIAN II

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	204.254.786.599,12	305.908.008.764,28
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(204.254.766.598,12)	305.918.391.192,18
Sub Total	20.001,00	(10.382.427,90)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	254.246.139.908,49	204.254.786.599,12
Sub Total	254.246.159.909,49	204.244.404.171,22
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(20.001,00)	8.569.029,40
Lain-lain	0,00	1.813.398,50
Saldo Anggaran Lebih Akhir	254.246.139.908,49	204.254.786.599,12

Sanggau, 10 Juni 2024



Pj. BUPATI SANGGAU

SUHERMAN

BAGIAN III



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU NERACA

Per 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
ASET	3.672.038.218.229,81	3.442.042.540.370,49
ASET LANCAR	524.198.992.010,95	509.403.436.358,01
Kas dan Setara Kas	255.211.697.726,32	205.215.285.510,95
Kas di Kas Daerah	240.301.011.063,66	190.797.837.980,86
Kas di Bendahara Penerimaan	121.035.100,00	8.936.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	765.578.874,50	253.669.268,00
Kas di BLUD	9.068.405.051,91	12.991.195.558,57
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	1.087.984,79
Kas Dana BOS	102.923.086,42	202.059.806,90
Kas Lainnya	4.852.744.549,83	960.498.911,83
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	43.681.773.119,70	37.480.909.264,46
Piutang Pajak Daerah	27.992.937.085,70	24.238.827.776,70
Piutang Retribusi Daerah	47.752.127,00	23.777.127,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.199.516.866,00	2.320.918.768,33
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	8.441.567.041,00	10.897.385.592,43
Piutang Lainnya	3.259.263.636,62	3.265.645.636,62
Penyisihan Piutang	(19.886.241.173,86)	(18.153.261.500,50)
Beban Jasa Dibayar Dimuka	419.349.646,41	410.536.689,26
Persediaan	241.513.149.055,76	281.184.320.757,22
INVESTASI JANGKA PANJANG	133.921.263.085,36	119.921.263.085,36
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
Investasi pada BUMD	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Investasi Permanen	133.921.263.085,36	119.921.263.085,36
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	133.921.263.085,36	119.921.263.085,36
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
ASET TETAP	2.824.409.975.390,14	2.607.453.077.174,18
Tanah	635.068.037.274,54	618.348.837.859,54
Peralatan dan Mesin	781.677.647.179,69	726.773.361.426,37
Gedung dan Bangunan	1.499.436.511.391,13	1.309.432.981.978,61
Jalan, Irigasi, dan jaringan	2.091.097.744.533,20	1.896.460.343.185,20
Aset Tetap Lainnya	131.988.733.353,17	124.131.476.792,17
Konstruksi dalam Pengerjaan	19.459.778.650,92	38.306.236.857,92
Akumulasi Penyusutan	(2.334.318.476.992,51)	(2.106.000.160.925,63)
DANA CADANGAN	7.147.693.104,00	30.000.000.000,00

URAIAN	2023	2022
Dana Cadangan	7.147.693.104,00	30.000.000.000,00
ASET LAINNYA	182.360.294.639,36	175.264.763.752,94
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	3.071.136.959,60	1.229.026.869,18
Aset Tak Berwujud- <i>software</i>	19.586.387.206,83	16.644.101.607,83
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.515.250.247,23)	(15.415.074.738,65)
Aset Lain-lain	63.421.858.679,76	63.421.858.679,76
Aset Lain-lain - <i>Bruto</i>	64.953.523.335,87	65.119.497.752,87
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.531.664.656,11)	(1.697.639.073,11)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>	115.867.299.000,00	110.613.878.204,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.672.038.218.229,81	3.442.042.540.370,49
KEWAJIBAN	19.773.041.255,00	10.534.141.850,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.773.041.255,00	10.534.141.850,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	8.008.062,00	3.174.747,00
Pendapatan Diterima Dimuka	466.461.390,00	0,00
Utang Belanja	19.298.571.803,00	10.530.967.103,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
EKUITAS	3.652.265.176.974,81	3.431.508.398.520,49

Sanggau, 10 Juni 2024

Pj. BUPATI SANGGAU



SUHERMAN

BAGIAN IV



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO.	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN -LO	1.851.943.564.268,16	1.558.995.800.903,66	292.947.763.364,50	18,79
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO	167.370.306.971,24	128.982.399.577,54	38.387.907.393,70	29,76
3	Pendapatan Pajak Daerah -LO	68.759.786.800,00	55.376.655.199,52	13.386.131.600,48	24,17
4	Pendapatan Retribusi Daerah -LO	4.537.325.527,00	5.115.041.688,00	(577.716.161,00)	(11,29)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	12.418.340.237,00	0,00	12.418.340.237,00	100,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	81.654.854.407,24	68.490.702.690,02	13.164.151.717,22	19,22
7	PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.575.427.856.937,92	1.385.751.608.689,12	189.676.248.248,80	13,69
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO	1.455.582.882.445,00	1.276.225.369.680,00	179.357.512.765,00	14,05
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	14.447.266.000,00	(14.447.266.000,00)	(100,00)
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	119.844.974.492,92	95.078.973.009,12	24.766.011.483,80	26,05
11	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	109.145.400.359,00	44.261.792.637,00	64.883.607.722,00	146,59
12	Pendapatan Hibah - LO	109.145.400.359,00	44.261.792.637,00	64.883.607.722,00	146,59
13	Lain-Lain Pendapatan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	JUMLAH PENDAPATAN-LO	1.851.943.564.268,16	1.558.995.800.903,66	292.947.763.364,50	18,79
15	BEBAN				
16	BEBAN OPERASI	1.298.634.210.355,73	1.118.759.243.314,53	179.874.967.041,20	16,08
17	Beban Pegawai	542.046.638.546,50	538.395.089.489,50	3.651.549.057,00	0,68
18	Beban Barang Dan Jasa	674.711.777.247,23	526.939.247.259,39	147.772.529.987,84	28,04
19	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beban Subsidi	3.000.000.000,00	7.082.553.900,00	(4.082.553.900,00)	(57,64)
21	Beban Hibah	76.935.794.562,00	43.243.419.556,00	33.692.375.006,00	77,91
22	Beban Bantuan Sosial	1.940.000.000,00	2.394.400.000,00	(454.400.000,00)	(18,98)
23	Beban Lain-Lain	0,00	704.533.109,6400	(704.533.109,64)	(100,00)
24	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	1.939.351.340,23	2.022.693.400,49	(83.342.060,26)	(4,12)
25	Beban Penyisihan Piutang	1.939.351.340,23	2.022.693.400,49	(83.342.060,26)	(4,12)
26	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	229.585.200.890,23	183.165.402.347,16	46.419.798.543,07	25,34
27	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.357.177.814,35	54.297.222.459,31	4.059.955.355,04	7,48
28	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	77.468.567.430,57	56.293.825.670,83	21.174.741.759,74	37,61
29	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	92.845.061.608,58	72.110.949.156,65	20.734.112.451,93	28,75
30	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(65.930.272,25)	0,00	(65.930.272,25)	0,00
31	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	980.324.308,98	463.405.060,37	516.919.248,61	111,55
33	BEBAN TRANSFER	111.693.953.133,00	89.964.803.317,00	21.729.149.816,00	24,15

NO.	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
34	Beban Bagi Hasil	5.217.811.100,00	4.806.915.200,00	410.895.900,00	8,55
35	Beban Bantuan Keuangan	106.476.142.033,00	85.157.888.117,00	21.318.253.916,00	25,03
36	BEBAN TAK TERDUGA	3.775.983.100,00	429.113.049,00	3.346.870.051,00	779,95
37	Beban Tak Terduga	3.775.983.100,00	429.113.049,00	3.346.870.051,00	779,95
38	JUMLAH BEBAN	1.645.628.698.819,19	1.394.341.255.428,18	251.287.443.391,01	18,02
39	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	206.314.865.448,97	164.654.545.475,48	41.660.319.973,49	25,30
40	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
41	SURPLUS NON OPERASIONAL	206.347.059,82	622.829.700,00	(416.482.640,18)	(66,87)
42	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	206.347.059,82	622.829.700,00	(416.482.640,18)	(66,87)
45	Jumlah Surplus Non Operasional	206.347.059,82	622.829.700,00	(416.482.640,18)	(66,87)
46	DEFISIT NON OPERASIONAL	3.548.936.276,47	11.579.011.165,83	(8.030.074.889,36)	(69,35)
47	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.548.936.276,47	11.579.011.165,83	(8.030.074.889,36)	(69,35)
50	Jumlah Defisit Non Operasional	3.548.936.276,47	11.579.011.165,83	(8.030.074.889,36)	(69,35)
51	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.342.589.216,65)	(10.956.181.465,83)	7.613.592.249,18	69,49
52	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	202.972.276.232,32	153.698.364.009,65	49.273.912.222,67	32,06
53	POS LUAR BIASA				
54	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
56	JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SURPLUS/DEFISIT-LO	202.972.276.232,32	153.698.364.009,65	49.273.912.222,67	32,06

Sanggau, 10 Juni 2024



Pj. BUPATI SANGGAU

SUHERMAN

BAGIAN V



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	3.431.508.398.520,49	3.239.619.674.250,51
SURPLUS/DEFISIT-LO	202.972.276.232,32	153.698.364.009,66
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	17.784.502.222,00	38.190.360.260,32
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	(20.001,00)	8.569.027,74
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	(8.771.392,95)	494.316.300,33
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	17.613.418.816,55	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	179.874.799,40	2.376.428.188,84
Koreksi Kas	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	35.311.046.743,41
EKUITAS AKHIR	3.652.265.176.974,81	3.431.508.398.520,49

Sanggau, 10 Juni 2024



Pj. BUPATI SANGGAU

SUHERMAN

BAGIAN VI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	65.463.342.881,00	54.173.834.811,70
Penerimaan Retribusi Daerah	4.513.350.527,00	5.122.541.688,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.418.340.237,00	9.601.021.628,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.776.256.309,57	89.627.417.680,69
Penerimaan Dana Bagi Hasil	350.155.778.885,00	179.149.164.737,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	790.852.189.873,00	741.094.341.793,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	309.321.492.891,00	245.367.984.946,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	14.447.266.000,00
Penerimaan Dana Desa	157.083.453.900,00	150.973.782.800,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	119.853.873.554,35	97.010.459.897,28
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-
Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan	2.446.919.490,00	1.647.285.868,00
Penerimaan Hibah	19.850.000,00	1.917.038.310,00
Penerimaan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	1.888.904.848.547,92	1.590.132.140.159,67
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	542.035.779.176,50	538.395.089.489,50
Pembayaran Barang dan Jasa	643.699.925.833,89	631.556.958.441,40
Pembayaran Subsidi	3.000.000.000,00	7.082.553.900,00
Pembayaran Hibah	72.966.664.562,00	43.243.419.556,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.940.000.000,00	2.394.400.000,00
Pembayaran Tak Terduga	4.915.878.100,00	429.113.049,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	5.217.811.100,00	4.806.915.200,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	263.559.595.933,00	236.131.670.917,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	1.537.335.654.705,39	1.464.040.120.552,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1)	351.569.193.842,53	126.092.019.606,77
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		

Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	22.852.306.896,00	0,00
Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan / Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat – LRA	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	22.852.306.896,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	30.000.000.000,00
Belanja Tanah	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	55.196.480.481,00	49.911.050.361,00
Belanja Bangunan dan Gedung	148.677.679.734,16	44.116.614.476,83
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.734.545.493,00	80.427.924.503,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.555.573.820,00	5.800.034.859,00
Belanja Aset Lainnya	1.265.847.900,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00	17.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	324.430.127.428,16	227.755.624.199,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi non Keuangan (2)	(301.577.820.532,16)	(227.755.624.199,83)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Utang Akibat Kejadian Tertentu	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (3)	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transistoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	132.013.494.535,55	116.117.304.499,50
Lain-lain	8.008.062,00	1.813.398,50
Jumlah Arus Kas Masuk	132.021.502.597,55	116.119.117.898,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	132.013.494.535,55	116.107.973.343,50
Utang PFK 2022	3.174.747,00	15.826.072,00
Kiriman Uang Keluar	6.156.409,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	132.022.825.691,55	116.123.799.415,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris (4)	(1.323.094,00)	(4.681.517,50)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (1+2+3+4)	49.990.050.216,37	(101.668.286.110,56)
Saldo Awal	205.215.285.510,95	306.875.002.592,11
Koreksi SiLPA Tahun Lalu	(20.001,00)	8.569.029,40
Penerimaan penyetoran kembali dana PER pada Sekretariat Daerah ke Kas Lainnya	6.382.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas	255.211.697.726,32	205.215.285.510,95

Sanggau, 10 Juni 2024

Pj. BUPATI SANGGAU



SUHERMAN

BAGIAN VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efesiensi dan efektivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat aktivitas/kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Daurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023.
27. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah;

28. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Kebijakan Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target Perda APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan;

Bab IV Kebijakan Akuntansi;

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas;

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non keuangan; dan

Bab VII Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, DAN TARGET PERDA APBD

A. Kebijakan Keuangan

1. Pengelolaan Pendapatan

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2023 harus mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah diupayakan untuk tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah supaya mendayagunakan pengelolaan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

b. Dana Perimbangan

Mempedomani penetapan pagu definitif dana perimbangan tahun anggaran 2023.

c. Lain-lain PAD yang Sah

Hibah yang akan diterima dan dianggarkan dalam APBD harus didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Daerah.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang

ditetapkan dengan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dengan prestasi kerja dan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

3. Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk, penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar dan Perumda Tirta Pancur Aji.

B. Ekonomi Makro

1. PDRB

Data PDRB Kabupaten Sanggau tahun 2018 sampai tahun 2022 atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Perkembangan PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2018 s.d 2022

No	INDIKATOR	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Jumlah Penduduk	463.995	468.078	483.992	488.527	492.989
2.	PDRB (Jutaan Rupiah)					
a.	Atas Dasar Harga Berlaku	18.119.163,60	19.158.574,37	19.921.366,78	21.678.774,37	23.847.058,94
b.	Atas Dasar Harga Konstan 2010	12.670.003,80	13.142.287,78	13.235.260,80	13.790.448,92	14.425.583,00
3.	PDRB / Kapita (rupiah)					
a.	Atas Dasar Harga Berlaku	39.050.342,36	40.930.303,00	41.160.529,06	44.375.795,76	48.372.396,00
b.	Atas Dasar Harga Konstan 2010	27.306.336,93	28.077.131,97	27.346.032,17	28.228.632,03	29.261.470,00

Sumber data: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Sanggau

2. Pertumbuhan Ekonomi

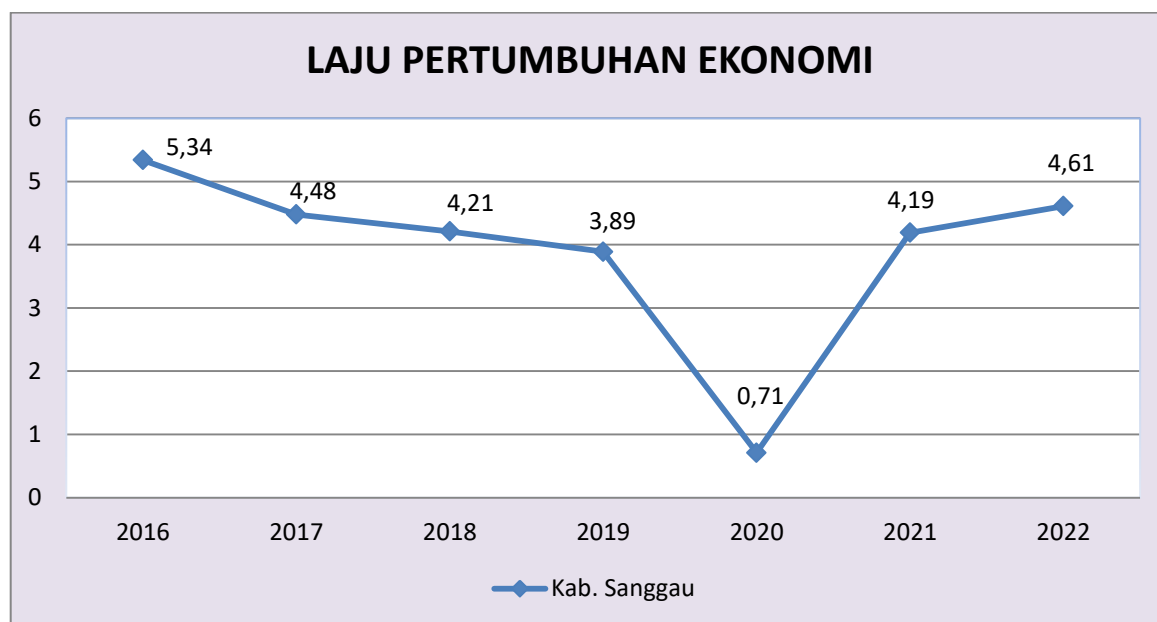
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga konstan 2010, mencapai 14,42 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 13,79 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61 persen, lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 4,19 persen. Pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 20,90 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha ekonomi yang ada, 15 diantaranya mengalami pertumbuhan positif. Sembilan diantaranya mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen atau lebih. Sedangkan Enam lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen atau lebih tersebut antara lain: Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,29 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,95 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,00 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 20,90 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,80 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,40 persen; Jasa Perusahaan sebesar 8,39 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,32 persen; dan dan Jasa Lainnya sebesar 13,81 persen. Sedangkan Enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,67 persen; Industri Pengolahan sebesar 3,69 persen; Konstruksi sebesar 1,03 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,82 persen; Real Estate sebesar 1,12 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,73 persen.

Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negative adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dimana -7,04 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -1,55 persen.

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2021



Sumber data: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Sanggau

Perekonomian Sanggau pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Sanggau tahun 2022 naik hingga ke titik 4,61 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 4,19 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yakni sebesar 20,90 persen. Sedangkan urutan kedua dan ketiga yang memberikan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha Jasa Lainnya disusul Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 13,81 persen dan 12,00 persen.

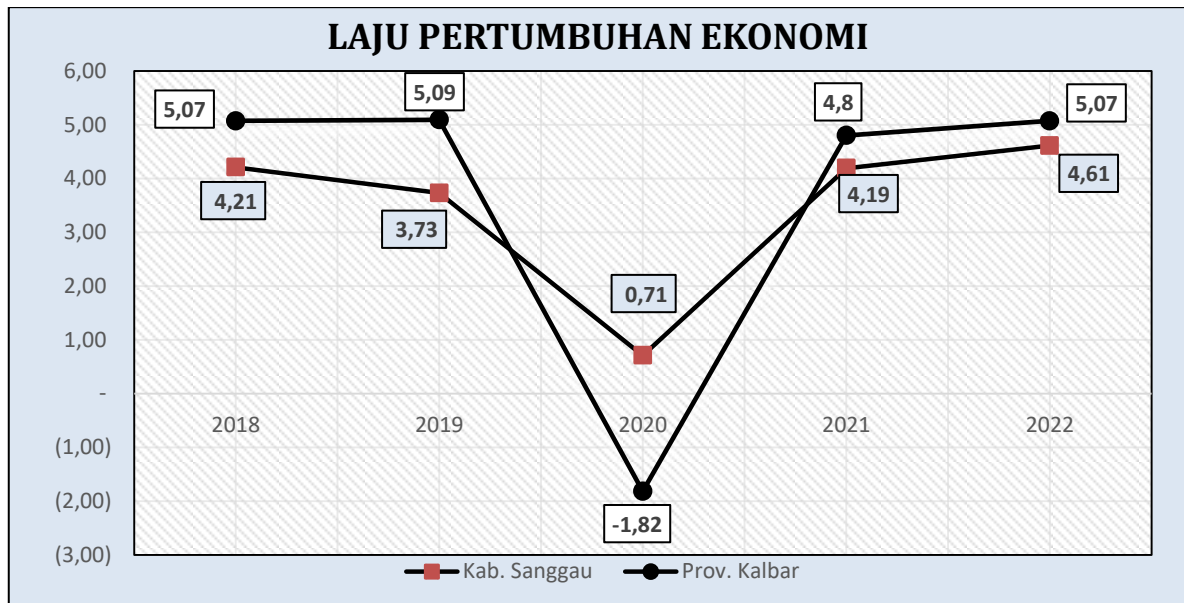
Laju pertumbuhan PDRB untuk semua lapangan usaha tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 maka terjadi pertumbuhan yang fluktuatif ada yang mengalami peningkatan positif dan ada pula yang mengalami penurunan. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,67 persen atau naik sebesar 0,75 persen dari tahun 2021; (2) Pertambangan dan Penggalian sebesar -0,68 persen atau turun 6,07 persen dari tahun 2021; (3) Industri Pengolahan sebesar 3,69 persen atau turun 0,73 persen dari tahun 2021; (4) Pengadaan Listrik dan gas sebesar 8,29 persen atau naik 7,91 persen dari tahun

2021; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,95 persen atau naik 4,15 persen dari tahun 2021; (6) Konstruksi sebesar 1,03 persen atau turun 6,32 persen dari tahun 2021; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,00 persen atau naik 8,20 persen dari tahun 2021; (8) Transportasi dan Pergudangan sebesar 20,90 persen atau naik 27,94 persen dari tahun 2021; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,80 persen atau naik 2,83 persen dari tahun 2021; (10) Informasi dan Komunikasi sebesar 7,40 persen atau naik 1,42 persen dari tahun 2021; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,82 persen atau turun 0,56 persen dari tahun 2021; (12) Real Estat sebesar 1,12 persen atau turun 1,78 persen dari tahun 2021; (13) Jasa Perusahaan sebesar 8,39 persen atau naik 8,07 persen dari tahun 2021; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -1,55 atau naik 2,08 persen dari tahun 2021; (15) Jasa Pendidikan sebesar 0,73 persen atau turun 3,21 persen dari tahun 2021; (16) Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial sebesar 7,32 persen atau turun 17,91 persen dari tahun 2021; (17) Jasa lainnya sebesar 13,81 persen atau naik 13,28 persen dari tahun 2021.

Dalam periode 2018-2022, pertumbuhan ekonomi dimana hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2022. Pertumbuhan positif paling tertinggi pada tahun 2022 dialami lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang berkontribusi sebesar 386 miliar rupiah terhadap PDRB Kabupaten Sanggau. Peranan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2022 sebesar 1,62 persen. Dilihat dari pertumbuhan, pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi sebesar -7,04 persen dan kembali tumbuh positif sebesar 20,90 persen pada tahun 2022. Selanjutnya diurutan kedua, pertumbuhan positif dialami oleh lapangan usaha Jasa Lainnya dimana kontribusi kategori Jasa Lainnya masih sangat kecil terhadap PDRB Kabupaten Sanggau. Pertumbuhan PDRB sektor Jasa Lainnya tumbuh 13,81 persen pada tahun 2022 yang sebelumnya ditahun 2021 berada pada titik 0,53 persen. Diurutan ketiga, pertumbuhan positif dialami oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu peningkatan sebesar 8,20 persen dibanding tahun 2021. Sebelum tahun 2021 kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Sanggau selalu berada diatas 10 persen. Pada tahun 2021 kontribusi tersebut menurun menjadi 9,87 persen dan tahun 2022 naik menjadi 10,57 persen. Berdasarkan nominal PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan dari 2,14 triliun

rupiah pada tahun 2021 menjadi 2,52 triliun rupiah di tahun 2022, dilihat dari pertumbuhannya, lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,00 persen ditahun 2022.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Konstan 2010



Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber data: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Sanggau

Berdasarkan grafik tersebut diatas tergambar bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, kecuali pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau lebih tinggi yaitu berada pada titik 0,71% sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat berada pada titik -1,82% Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau naik menjadi 4,19% atau tumbuh sebesar 3,48% dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 tumbuh menjadi 4,61% atau naik sebesar 0,42% dari tahun 2021. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat setelah sempat tepuruk pada tahun 2020 yaitu -1,82% meningkat signifikan pada tahun 2021 yaitu 4,80% atau tumbuh sebesar 6,62% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 5,07% atau tumbuh sebesar 0,27. Pada tahun 2020 tersebut, Kabupaten Sanggau menjadi salah satu kabupaten yang memberikan share yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sanggau 2018 – 2022**

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	5,61	5,48	6,02	3,92	4,67
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	9,05	4,98	17,51	5,39	-0,68
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufaturing</i>	0,12	0,18	-2,78	4,42	3,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,11	5,51	13,22	0,38	8,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste, Management and Remediation Activities</i>	12,77	4,53	1,88	5,80	8,95
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	0,52	2,91	-7,25	7,35	1,03
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor/ <i>Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyces</i>	3,39	4,65	-12,62	3,80	12,00
H	Transportasi dan pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,90	7,48	-13,17	-7,04	20,90
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum/ <i>Accommodation and food service activities</i>	4,04	6,91	-25,69	7,97	10,80
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and communication</i>	10,81	6,84	7,94	5,98	7,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	7,23	-0,22	-0,26	3,38	2,82
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,92	1,09	1,12	2,90	1,12
M, N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,83	3,80	-5,21	0,32	8,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Publik Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,99	0,09	2,81	-6,63	-1,55
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,06	1,22	-6,79	3,94	0,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	3,55	2,39	17,87	25,23	7,32
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	5,45	7,82	-20,35	0,53	13,81
PDRB/GRDP		4,21	3,73	0,71	4,19	4,61

Sumber data: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Sanggau

3. Struktur Perekonomian Kabupaten Sanggau

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Sanggau didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, diantaranya: (1). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (2). Industri Pengolahan. Sebelum pandemi covid-19, urutan ketiga adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, namun sejak pandemi covid-19 urutan ketiga digantikan oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 33,72 persen, angka ini meningkat dari 30,22 persen di tahun 2018, Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 16,92 persen, angka ini turun dari 18,53 persen di tahun 2018, disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian 11,07 persen, meningkat dari 9,44 persen di tahun 2018, Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,57 persen menurun dari 11,62 persen di tahun 2018. dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,54 persen. Selanjutnya distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sanggau 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sanggau 2018 – 2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	30,22	29,47	32,08	32,80	33,72
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	9,44	9,83	11,36	11,72	11,07
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	18,53	17,83	17,13	17,25	16,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste, Management and Remediation Activities	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi/Construction	6,36	6,81	6,39	6,54	6,43
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles	11,62	11,76	10,31	9,87	10,57
H	Transportasi dan pergudangan/Transportation and Storage	1,46	1,57	1,54	1,37	1,62

I	Penyediaan akomodasi dan makan minum/Accommodation and food service activities	1,87	1,93	1,45	1,46	1,48
J	Informasi dan Komunikasi/Information and communication	3,88	4,08	4,25	4,19	4,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,91	1,86	1,65	1,62	1,60
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,69	2,67	2,58	2,42	2,26
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,28	0,29	0,26	0,24	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	7,01	7,06	6,55	5,94	5,55
P	Jasa Pendidikan/Education	2,69	2,73	2,35	2,27	2,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,32	1,36	1,58	1,86	1,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Service Activities	0,64	0,67	0,45	0,39	0,42
PDRB/GRDP		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/*Preliminary figure*

** Angka sangat sementara/*Very preliminary figure*

Sumber data: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Sanggau

4. Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga pada tingkat produsen. Suatu daerah dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam satu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi berarti terjadinya lonjakan harga yang tajam, dan kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi IHK pada Desember 2022 tercatat sebesar 0,66% (mtm) sehingga inflasi IHK 2022 menjadi 5,51% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87% (yoy).

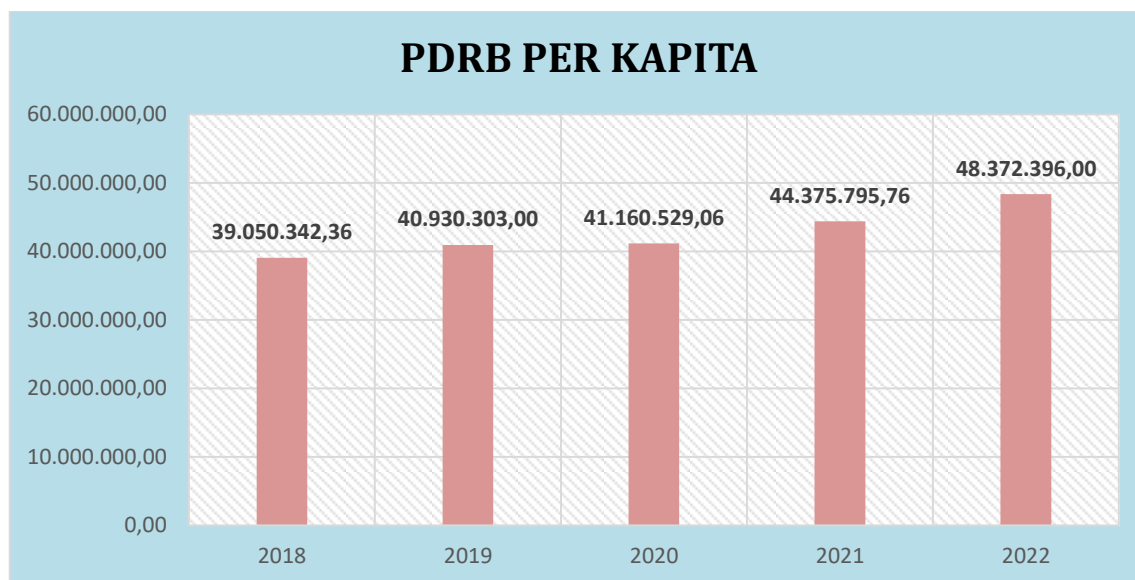
Peningkatan Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,83 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,86 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,87 persen; kelompok transportasi sebesar 15,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan

minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,36 persen. Pada tahun 2022, perubahan harga tertinggi terjadi pada kelompok Transportasi yaitu sebesar 15,26 persen, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,83 persen.

5. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sanggau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 39,05 juta rupiah. PDRB Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 48,37 juta rupiah. Data perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini:

**Grafik 2.3. Data Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018-2022 (Rupiah)**



Sumber data: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Sanggau

PDRB Per Kapita Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 mencapai 48,372 juta rupiah, meningkat 9,01 persen dibanding tahun 2021 yang sebesar 44,375 juta rupiah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau selalu meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi setiap tahunnya.

C. Target Kinerja Perda APBD

1. Pendapatan Daerah

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk pendapatan daerah merupakan persentase realisasi pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Target pendapatan daerah tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.912.236.443.149,00.

2. Belanja Daerah

Indikator pencapaian target belanja daerah merupakan persentase realisasi belanja daerah, sesuai dengan program dan kegiatan dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Target belanja daerah tahun 2023 sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.124.693.536.644,00. Pencapaian target pendapatan daerah dan belanja daerah diuraikan pada Bab III, yaitu Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

1. Strategi Pencapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan seperti yang dicantumkan dalam APBD tahun 2023, baik pendapatan daerah maupun belanja daerah, diupayakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dan melakukan efisiensi, efektivitas dan ekonomis untuk belanja yang dirinci dalam urusan, program dan kegiatan.

2. Sumber Daya yang Digunakan untuk Mencapai Tujuan

Untuk mencapai target kinerja APBD tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, dana yang tersebar pada SKPD-SKPD dan perangkat aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan.

B. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 dapat diikhtisarkan seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (2023)	Realisasi (2023)	%	Realisasi (2022)
1	Pendapatan	1.912.236.443.149,00	1.888.904.848.547,92	98,78	1.590.132.140.159,67
2	Belanja	1.853.786.427.987,00	1.578.988.375.100,55	85,18	1.403.357.158.635,73
3	Transfer	270.907.108.657,00	268.777.407.033,00	99,21	240.938.586.117,00
3	Surplus/Defisit	(212.457.093.495,00)	41.139.066.414,37	(19,36)	(54.163.604.593,06)
4	Penerimaan Pembiayaan	226.457.093.495,00	227.107.073.494,12	100,29	30.918.391.192,18
5	Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	100,00	47.500.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	212.457.093.495,00	213.107.073.494,12	100,31	258.418.390.192,18
7	SILPA	0,00	254.246.139.908,49	100,00	204.254.786.599,12

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.888.904.848.547,92 atau 98,78% dibandingkan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.912.236.443.149,00, yakni berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer dalam APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2023 sebesar Rp1.847.765.782.133,55 atau 86,97% dibandingkan dengan anggaran yang

ditargetkan sebesar Rp2.124.693.536.644,00. Dengan capaian pendapatan dan belanja tersebut, maka realisasi APBD mengalami Surplus sebesar Rp.41.139.066.414,37 atau (19,36)% dari perencanaan yang diperkirakan akan mengalami defisit sebesar (Rp.212.457.093.495,00).

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.227.107.073.494,12 atau 100,29% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.226.457.093.495,00 yang merupakan akumulasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp.204.254.766.598,12 dan pencairan dana Cadangan sebesar Rp.22.852.306.896,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp.14.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.14.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar, dan Perumda Tirta Pancur Aji Pembentukan.

Dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka realisasi pembiayaan netto tercapai sebesar Rp.213.107.073.494,12 atau 100,31% dari anggarannya yang sebesar Rp212.457.093.495,00.

Secara keseluruhan, maka kinerja keuangan dari aktivitas normal Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2023 memperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp254.246.139.908,49.

C. Sistem Informasi Kinerja Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau disusun berdasarkan sistem akuntansi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tanggal 31 Oktober 2022, yang meliputi jurnal, buku besar dan Laporan Keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan secara desentralisasi. Laporan Keuangan Kabupaten merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan seluruh SKPD. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada BUD dan SKPD menggunakan aplikasi SIMAKDA. Konsolidasi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA. Dengan penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mengeliminasi kesalahan kalkulasi, kesalahan pembebanan, pelampauan anggaran dan kesalahan lainnya yang dapat dikendalikan dengan program sehingga laporan keuangan menjadi lebih andal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Sanggau wajib membuat pelaporan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL/SAK, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun entitas akuntansi adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

2. Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Sanggau dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset

lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Pengukuran/penilaian Aset:

a. Kas

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Kas di Kas Daerah dinyatakan dalam mata uang rupiah senilai nominal yang ada, kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, tetapi lebih dari 3 bulan. Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Piutang Pajak dan Retribusi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Sesuai dengan PMK Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

- a) Piutang Pendapatan; dan
- b) Piutang Lainnya.

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a) Penilaian Kualitas Piutang;
- b) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun; dan/atau Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak kooperatif; dan/atau Wajib Pajak likuid; dan/atau Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- b) Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang dengan kriteria Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang dengan kriteria Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dengan kriteria Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang tak tertagih untuk jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu:

No	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤ 1 Tahun	>1 s.d 3 Tahun	>3 s.d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya	0,5%	10%	50%	100%

d. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi

pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

f. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

g. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan

keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

h. Investasi Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi jangka panjang nonpermanent dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

i. Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

j. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

k. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

l. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

m. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

n. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

o. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

p. Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap terdapat dalam tabel kapitalisasi dan penyusutan serta tabel penambahan masa manfaat di Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

q. Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai tabel kapitalisasi dan penyusutan (terlampir).

r. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

s. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

t. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit

pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi atas pos-pos laporan keuangan telah diusahakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Termasuk penerimaan hibah berupa barang, selain dicatat dan dilaporkan pada neraca, juga dicatat dan dilaporkan pada Laporan Operasional (LO) sebagai Pendapatan Hibah-LO.

Penambahan atau pengurangan nilai investasi non permanen hanya dilaporkan pada perubahan nilai pada aset pos investasi saja, dan tidak dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini dilakukan bahwa penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran hanya untuk penerimaan dan Pengeluaran kas yang telah dianggarkan dalam APBD saja.

Investasi dengan penyertaan saham di atas 50% masih disajikan dengan Metode Biaya, bukan Metode Ekuitas karena belum siap untuk menerapkannya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun 2023

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
4. Pendapatan - LRA	1.912.236.443.149,00	1.888.904.848.547,92	1.590.132.140.159,67

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.888.791.789.447,92 atau 98,78% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 1.912.236.443.149,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp.1.590.132.140.159,67 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.298.772.708.388,25 atau 18,79% Anggaran. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	140.734.411.884,00	159.171.289.954,57	113,10	158.524.815.808,39
2	Pendapatan Transfer-LRA	1.770.002.896.265,00	1.729.713.708.593,35	97,72	1.429.690.286.041,28
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA	1.499.135.000,00	19.850.000,00	1,32	1.917.038.310,00
	Jumlah	1.912.236.443.149,00	1.888.904.848.547,92	98,78	1.590.132.140.159,67

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.1 Pendapatan Asli Daerah	140.734.411.884,00	159.171.289.954,57	158.524.815.808,39

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.159.171.289.954,57 atau 113,10% dari anggaran sebesar Rp.140.734.411.884,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar Rp.158.524.815.808,39 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.646.474.146,18 atau 0,41% Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	47.671.930.716,00	65.463.342.881,00	137,32	54.173.834.811,70
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	6.738.393.520,00	4.513.350.237,00	66,98	5.122.541.688,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	12.364.675.032,00	12.418.340.327,00	100,43	9.601.021.628,00
4	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	73.959.412.616,00	76.776.256.309,57	103,81	89.627.417.680,69
	Jumlah	140.734.411.884,00	159.171.289.954,57	113,10	158.524.815.808,39

		Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	47.671.930.716,00	65.463.342.881,00	54.173.834.811,70

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp.65.463.342.881,00 atau 137,32% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.47.671.930.716,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp.54.173.834.811,70 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.11.289.508.069,30 atau 20,84%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Hotel	632.063.250,00	922.155.412,00	145,90	822.400.159,00
2	Pajak Restoran	2.416.590.157,00	3.280.780.675,00	135,76	2.853.355.196,00
3	Pajak Hiburan	35.249.682,00	44.561.590,00	126,42	41.343.320,00
4	Pajak Reklame	1.276.281.562,00	1.225.212.921,00	96,00	1.377.480.045,00
5	Pajak Penerangan Jalan	21.425.427.187,00	25.557.639.293,00	119,29	22.351.235.689,70
6	Pajak Air Tanah	100.713.375,00	152.041.490,00	150,96	186.215.662,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	60.775.313,00	103.497.000,00	170,29	111.484.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.047.835.187,00	10.893.521.335,00	135,36	8.472.789.925,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.469.778.125,00	4.659.947.399,00	85,19	5.109.906.583,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.207.216.878,00	18.623.985.766,00	226,92	12.847.624.232,00
	Jumlah	47.671.930.716,00	65.463.342.881,00	137,32	54.173.834.811,70

		Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	6.738.393.520,00	4.513.350.527,00	5.122.541.688,00

Realisasi atas Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp.4.513.350.237,00 Atau 66,98% dari anggarannya sebesar Rp 6.738.393.520,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp.5.122.541.688,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.609.191.451,00 atau 11,89%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	585.000.000,00	708.383.450,00	100,40	1.133.777.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000,00	77.087.500,00	51,39	91.719.600,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	255.000.000,00	350.660.000,00	137,28	318.575.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	657.340.700,00	589.770.690,00	89,72	116.820.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	269.575.000,00	89,86	392.325.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	80.000.000,00	82.920.340,00	103,65	99.073.168,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	695.750.000,00	796.010.000,00	114,41	680.680.000,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	646.165.000,00	825.695.229,00	127,78	1.276.793.875,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	124.208.000,00	190.546.000,00	153,41	697.769.940,00
10	Retribusi Terminal	117.840.000,00	138.216.000,00	117,29	19.710.000,00
11	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	36.000.000,00	36.088.900,00	100,25	30.650.000,00
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	236.800.000,00	42.392.470,00	17,90	35.377.605,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	200.000.000,00	224.123.000,00	116,53	193.674.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	44.730.100,00	89,46	35.596.500,00
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	8.300.000,00	0,33	0,00
16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	700.000,00	15.000,00	2,14	0,00
17	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	103.589.820,00	128.836.848,00	124,37	0,00
	Jumlah	6.738.393.520,00	4.513.350.527,00	65,31	5.122.541.688,00

Kontribusi tertinggi pendapatan retribusi daerah yaitu pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 18,76% dari total Pendapatan Retribusi Daerah.

Tahun 2023

		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.1.03 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
		12.364.675.032,00	12.418.340.327,00	9.601.021.628,00

Realisasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.12.418.340.327,00 atau 100,43% dari anggaran sebesar Rp.12.364.675.032,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp.9.601.021.628,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.817.318.699,00 atau 29,34%. Jumlah tersebut merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yaitu Pembayaran Dividen Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan PT. Jamkrida tahun buku 2022 yang telah dipindahbukukan ke RKUD sesuai Rek. Koran pada tanggal 30 Maret 2023.

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.1.04 Lain-Lain PAD yang Sah	73.959.412.616,00	76.776.256.309,57	89.627.417.680,69

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar Rp.76.776.256.309,57 atau 103,81% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.73.959.412.616,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 sebesar Rp.89.627.417.680,69 maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.12.851.161.371,12 atau 14,34%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	622.829.700,00
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	73.100.000,00	36.869.094,00	50,44	70.518.000,00
2	Jasa Giro	7.105.000.000,00	7.757.945.571,71	109,19	8.290.392.772,01
3	Pendapatan Denda Pajak Daerah	138.984.000,00	217.019.463,00	156,15	206.855.669,00
4	Pendapatan dari Pengembalian	1.478.578.424,00	2.052.550.357,62	138,82	2.113.070.044,82
5	Pendapatan BLUD	65.163.750.192,00	66.711.871.823,24	102,38	67.126.122.255,16
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	11.197.629.239,70
	Jumlah	73.959.412.616,00	76.776.256.309,57	103,88	89.627.417.680,69

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.2 Pendapatan Transfer-LRA	1.770.002.896.265,00	1.729.713.708.593,35	1.429.690.286.041,28

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 Sebesar Rp.1.729.713.708.593,35 atau 97,72% dari anggaran sebesar Rp.1.770.002.896.265,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 sebesar Rp.1.429.690.286.041,28 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.300.023.422.552,07 atau 20,99%. Anggaran dan

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.487.678.320.909,00	1.450.329.461.649,00	97,49	1.165.611.491.476,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	158.943.858.000,00	157.083.453.900,00	98,83	165.421.048.800,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.380.717.356,00	122.300.793.044,36	99,12	98.657.745.765,28
	Jumlah	1.770.002.896.265,00	1.729.713.708.593,35	97,72	1.429.690.286.041,28

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.2.01.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.487.678.320.909,00	1.450.329.461.649,00	1.165.611.491.476,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Tahun 2023 sebesar Rp.1.450.329.461.649,00 atau 97,49% dari anggaran sebesar Rp.1.487.678.320.909,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun 2022 sebesar Rp.1.165.611.491.476,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.284.717.970.173,00 atau 24,43%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Bagi Hasil	366.048.135.909,00	350.155.778.885,00	95,66	179.149.164.737,00
2	Dana Alokasi Umum	790.867.392.000,00	790.852.189.873,00	100,00	741.094.341.793,00
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	118.244.076.000,00	113.442.789.115,00	95,94	53.772.555.906,00
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	212.518.717.000,00	195.878.703.776,00	92,17	191.595.429.040,00
	Jumlah	1.487.678.320.909,00	1.450.329.461.649,00	97,49	1.165.611.491.476,00

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil	366.048.135.909,00	350.155.778.885,00	179.149.164.737,00

Realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2023 sebesar Rp.350.155.778.885,00 atau mencapai 95,66% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.366.048.135.909,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp.179.149.164.737,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan

sebesar Rp.171.006.614.148,00 atau 95,45%. Pendapatan Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA). Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	52.415.541.764,00	32,819,384,000,00	62,61	53.816.772.645,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21	8.594.512.866,00	7,456,662,000,00	86,76	7.408.935.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	400.439.421,00	283,607,000,00	70,82	159.171.600,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	25.216.937,00	23.163.850,00	91,86	4.457.425,00
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Royalty	274.290.904.988,00	279,887,355,035,00	102,04	115.917.533.717,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.015.686.933,00	1.014.574.000,00	99,89	569.392.200,00
7	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	634.800.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) (DBH Perkebunan Sawit)	27.384.284.000,00	27.384.284.000,00	100,00	0,00
9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000,00	1.286.749.000,00	100,00	1.272.902.150,00
	Jumlah	366.048.135.909,00	350.155.778.885,00	95,66	179.149.164.737,00

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.2.01.01.02 Dana Alokasi Umum	790.867.392.000,00	790.852.189.873,00	741.094.341.793,00

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sebesar Rp.790.852.189.873,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.790.867.392.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum tahun 2022 sebesar Rp.741.094.341.793,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.49.757.848.080,00 atau 6,71%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Alokasi Umum	790.867.392.000,00	790.852.189.873,00	99,99	741.094.341.793,00
	Jumlah	790.867.392.000,00	790.852.189.873,00	99,99	741.094.341.793,00

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.2.01.01.03 Dana Alokasi Khusus-Fisik	118.244.076.000,00	113.442.789.115,00	53.772.555.906,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)–Fisik tahun 2023 sebesar Rp.113.442.789.115,00 atau 95,94% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.118.244.076.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) tahun 2022 sebesar Rp.53.772.555.906,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.59.670.233.209,00 atau 110,97%. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pemerintah Kabupaten Sanggau selama tahun anggaran 2023 yang terdiri dari DAK-Fisik Reguler, DAK-Fisik Penugasan, dan DAK-Fisik Afirmasi. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Fisik Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.179.569.000	1.119.125.445,00	94,88	265.867.600,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.869.226.000,00	5.484.678.595,00	93,45	7.457.098.085,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	20.553.801.000,00	18.223.027.980,00	88,66	1.938.361.448,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	293.034.050,00
5	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	5.993.047.644,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.754.780.000,00	4.056.980.100,00	108,05	2.424.231.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.025.018.000,00	1.025.018.000,00	100,00	994.416.864,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	497.858.000,00	492.123.756,00	98,85	790.795.400,00
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Penurunan	0,00	0,00	0,00	142.443.000,00

	Stunting (KB)				
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	33.954.805.000,00	33.634.316.000,00	99,06	12.361.947.450,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	13.312.567.000,00	12.287.798.947,00	92,30	7.115.590.348,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.244.179.000,00	8.244.179.000,00	100,00	4.573.242.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	10.640.000.000,00	10.436.898.000,00	98,09	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	19.212.273.000,00	18.438.643.292,00	95,97	9.422.481.017,00
	Jumlah	118.244.076.000,00	113.442.789.115,00	95,94	53.772.555.906,00

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.2.01.01.04 Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	212.518.717.000,00	195.878.703.776,00	191.595.429.040,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.195.878.703.776,00 atau 92,17% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 212.518.717.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus NonFisik (DAK-NonFisik) tahun 2022 sebesar Rp.191.595.429.040,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.283.274.736,00 atau 2,24%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus – NonFisik Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	82.402.670.000,00	82.299.870.682,00	99,88	82.364.836.954,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.715.000.000,00	2.715.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	66.141.450.000,00	64.003.020.220,00	96,77	64.324.167.980,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.865.000.000,00	2.865.000.000,00	100,00	492.100.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.043.889.000,00	12.966.679.940,00	80,82	13.597.232.980,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.446.360.000,00	4.315.756.800,00	97,06	3.562.372.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.288.530.000,00	2.236.380.000,00	97,72	1.511.600.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	26.613.307.000,00	21.550.307.535,00	80,98	20.675.079.269,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	398.724.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.938.267.000,00	1.315.101.506,00	18,95	4.064.968.503,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	412.616.274,00	98,16	484.459.050,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	396.500.000,00	361.118.671,00	91,08	253.294.464,00

13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	848.650.000,00	837.852.148,00	98,73	265.317.840,00
	Jumlah	212.518.717.000,00	195.878.703.776,00	92,17	191.595.429.040,00

Tahun 2023

		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	158.943.858.000,00	157.083.453.900,00	165.421.048.800,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.157.083.453.900,00 atau mencapai 98,83% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.158.943.858.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2022 sebesar Rp.165.421.048.800,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.8.337.594.900,00 atau 5,04%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2023 merupakan Dana Desa, Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	14.447.266.000,00
2	Dana Desa (DD)	158.943.858.000,00	157.083.453.900,00	98,83	150.973.782.800,00
	Jumlah	158.943.858.000,00	157.083.453.900,00	98,83	165.421.048.800,00

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.2.01 Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.380.717.356,00	122.300.793.044,35	98.657.745.765,28

Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.122.300.793.044,35 atau 99,12% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.123.380.717.356,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 sebesar Rp.98.657.745.765,28 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.23.643.047.279,07 atau 23,96%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Bagi Hasil-LRA	118.730.717.356,00	119.853.873.554,35	100,95	97.010.459.897,28
2	Bantuan Keuangan-LRA	4.650.000.000,00	2.446.919.490,00	52,62	1.647.285.868,00
	Jumlah	123.380.717.356,00	122.300.793.044,35	99,12	98.657.745.765,28

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	118.730.717.356,00	119.853.873.554,35	97.010.459.897,28

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.119.853.873.554,35 atau 100,95% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.118.730.717.356,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp.97.010.459.897,28 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.22.843.413.657,07 atau 23,55%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.778.012.278,00	16.416.295.481,12	92,34	15.101.640.183,07
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.518.453.852,00	22.859.744.666,77	93,23	17.726.227.093,97
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.503.013.737,00	54.916.779.483,73	93,87	38.249.017.905,61
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.349.238.999,00	2.227.868.599,73	94,83	1.678.946.721,63
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.581.998.490,00	23.433.185.323,00	150,39	24.254.627.993,00
	Jumlah	118.730.717.356,00	119.853.873.554,35	100,95	97.010.459.897,28

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.2.02.02 Bantuan Keuangan – LRA	4.650.000.000,00	2.446.919.490,00	1.647.285.868,00

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp.2.446.919.490,00 atau 52,62% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.4.650.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan tahun 2022 sebesar Rp.1.647.285.868,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.799.633.622,00 atau 48,54%.

Jumlah tersebut merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau selama Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

Tahun 2023				
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	1.499.135.000,00	19.850.000,00	1.917.038.310,00
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.19.850.000,00 atau 1,32% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.1.499.135.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendaptan Daerah Yang Sah tahun 2022 sebesar Rp.1.917.038.310,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.1.897.188.310,00 atau 98,96%. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:				

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.499.135.000,00	19.850.000,00	1,32	1.917.038.310,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.499.135.000,00	19.850.000,00	1,32	1.917.038.310,00

Tahun 2023				
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.3.01	Pendapatan Hibah – LRA	1.499.135.000,00	19.850.000,00	1.917.038.310,00
Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.19.850.000,00 atau 1,32% dari anggaran sebesar Rp.1.499.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah tahun 2022 sebesar Rp.1.917.038.310,00 maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.1.897.188.310,00 atau 98,96%. Ini merupakan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian berupa Hibah Pertanian.				

		Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Darurat tahun 2023 serta realisasi tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00.

		Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
4.3.03	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00

Anggaran dan Realisasi atas Pendapatan lainnya tahun 2023 serta realisasi tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00.

		Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5	Belanja Daerah	2.124.693.536.644,00	1.847.765.782.133,55	1.644.295.744.752,73

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.847.765.782.133,55 atau 86,97% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.2.124.693.536.644,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2022 sebesar Rp.1.644.295.744.752,73 maka realisasi Belanja Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.203.470.037.380,82 atau 12,37%. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Operasi	1.477.088.859.014,00	1.263.642.460.412,39	85,55	1.222.672.421.386,90
2	Belanja Modal	343.708.177.789,00	310.430.127.428,16	90,32	180.253.778.199,83
3	Belanja Tak Terduga	32.989.391.184,00	4.915.878.100,00	14,90	429.113.049,00
4	Belanja Transfer	270.907.108.657,00	268.777.407.033,00	99,21	240.938.586.117,00
	Jumlah	2.124.693.536.644,00	1.847.765.872.973,55	86,97	1.644.293.898.752,73

		Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.1	Belanja Operasi	1.477.088.859.014,00	1.263.642.369.572,39	1.222.672.421.386,90

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.263.642.369.572,39 atau 85,55% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.1.477.088.859.014,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2022 sebesar Rp.1.222.672.421.386,90 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.40.969.948.185,49 atau 3,35%. Anggaran dan Realisasi Belanja

Operasi Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Pegawai	698.397.537.936,00	542.035.779.176,50	77,61	538.395.089.489,50
2	Belanja Barang dan Jasa	700.364.667.182,00	643.699.925.833,89	91,91	631.556.958.441,40
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	7.082.553.900,00
5	Belanja Hibah	73.386.653.896,00	72.966.664.562,00	99,43	43.243.419.556,00
6	Belanja Bantuan Sosial	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00	100,00	2.394.400.000,00
	Jumlah	1.477.088.859.014,00	1.263.642.369.572,39	85,55	1.222.672.421.386,90

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.1.01 Belanja Pegawai	698.397.537.936,00	542.035.779.176,50	538.395.089.489,50

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 542.035.779.016,50 atau 77,61% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.698.397.537.936,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp.538.395.089.489,50 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.640.689.687,00 atau 0,68%. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	460.713.199.087,00	338.891.210.892,00	73,56	327.209.309.045,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	115.606.420.982,00	90.648.787.990,50	78,41	94.058.120.472,50
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	94.841.505.551,00	86.201.971.203,00	90,89	91.669.879.129,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.646.352.105,00	23.257.498.154,00	98,36	23.127.761.249,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	722.367.411,00	641.654.408,00	88,83	656.649.906,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	719.546.800,00	719.500.000,00	99,99	719.500.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	2.148.146.000,00	1.675.156.529,00	77,98	953.869.688,00
	Jumlah	698.397.537.936,00	542.035.779.176,50	77,61	538.395.089.489,50

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	700.364.667.182,00	643.699.925.833,89	631.556.958.441,40

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp.643.700.016.673,89 atau 91,91% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.700.364.667.182,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp.631.556.958.441,40 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.12.142.967.392,49 atau 1,92%. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Barang Pakai Habis	287.493.387.840,00	270.380.611.516,07	94,05	248.990.036.659,63
	Belanja Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	335.944.381,00
2	Belanja Jasa Kantor	96.132.415.103,00	85.551.839.420,00	88,99	98.511.165.000,00
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	24.342.212.670,00	23.197.538.445,70	95,30	22.747.472.645,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.841.340.550,00	3.770.952.085,00	77,89	1.396.627.600,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.457.037.000,00	2.710.993.445,00	78,42	2.098.128.585,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	195.052.300,00	137.465.571,00	70,48	155.476.328,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	26.176.681.230,00	25.159.903.770,00	96,12	24.810.581.793,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	9.089.103.220,00	8.895.288.023,00	97,87	5.886.696.440,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	396.804.957,00	394.950.000,00	99,53	630.419.000,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	908.250.000,00	908.250.000,00	100,00	655.600.000,00
12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.735.837.610,00	8.611.595.243,00	73,38	7.324.625.369,00
13	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	455.632.337,40
14	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	199.578.000,00	199.500.000,00	99,96	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.024.745.542,00	5.461.856.041,00	90,66	6.545.605.890,00

16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.274.098.974,00	3.262.497.243,95	99,65	6.924.481.672,12
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jringan dan Irigasi	8.746.133.687,00	8.562.021.000,00	97,89	15.594.928.210,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.844.099.639,80	54.014.094.224,00	82,03	51.877.394.048,00
19	Belanja Uang yang Diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.391.594.600,00	12.537.605.882,00	87,12	10.473.017.397,00
	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	68.700.000,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.709.339.436,00	63.336.505.563,48	99,41	62.979.266.958,05
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	73.403.954.823,00	66.603.458.360,69	90,74	63.095.158.127,20
	Jumlah	700.364.667.182,00	643.699.925.833,89	91,91	631.556.958.441,40

Belanja Barang dan Jasa sudah termasuk belanja barang dan jasa dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belanja barang dan jasa BLUD-RSUD, belanja barang dan jasa BLUD-Dinas Kesehatan. Rincian penggunaan dana BOS disajikan dalam **Lampiran 7.1 sampai 7.8**

		Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	
Realisasi belanja Bunga utang/pinjaman pada Lembaga perbankan selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 0,00				

		Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.1.04	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	7.082.553.900,00
Realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2023 sebesar Rp.3.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi tahun 2022 sebesar Rp.7.082.553.900,00 maka realisasi Belanja Subsidi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.4.082.553.900,00 atau 57,64%. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:				

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	10,00	7.082.553.900,00
	Jumlah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	7.082.553.900,00

Tahun 2023

		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.1.05	Belanja Hibah	73.386.653.896,00	72.966.664.562,00	43.243.419.556,00

Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.72.966.664.562,00 atau 99,43% dari anggaran sebesar Rp.73.386.653.896,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp.43.243.419.556,00 maka realisasi Belanja Hibah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.29.723.245.006,00 68,73%. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	22.852.306.896,00	22.852.306.400,00	100,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	41.955.579.000,00	41.537.353.503,00	99,00	35.030.754.300,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	6.573.720.000,00	6.571.956.659,00	99,97	6.107.672.256,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.005.048.000,00	2.005.048.000,00	100,00	2.005.048.000,00
	Jumlah	73.386.653.896,00	72.966.664.562,00	99,43	43.243.419.556,00

Tahun 2023

		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00	2.394.400.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.940.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp.1.940.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp.2.394.400.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.454.400.000,00 atau 18,98%. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial merupakan Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu selama Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00	100,00	2.394.400.000,00
	Jumlah	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00	100,00	2.394.400.000,00

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.2 Belanja Modal	343.708.177.789,00	310.430.127.428,16	180.255.624.199,83

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp.310.430.127.428,16 atau 90,32% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.343.708.177.789,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp.180.255.624.199,83 maka realisasi Belanja Modal tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.130.176.349.228,33 atau 72,22%. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	57.194.604.303,00	55.196.480.481,00	96,51	49.911.050.361,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	156.231.974.212,00	148.677.679.734,16	95,16	44.116.614.476,83
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.405.716.366,00	95.734.545.493,00	80,18	80.427.924.503,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.606.906.208,00	9.555.573.820,00	99,47	5.800.034.859,00
6	Belanja Aset Lainnya	1.268.976.700,00	1.265.847.900,00	99,75	0,00
	Jumlah	343.708.177.789,00	310.430.127.428,16	90,32	180.255.624.199,83

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.2.01 Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah.

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.194.604.303,00	55.196.480.481,00	49.911.050.361,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 sebesar Rp.55.196.480.481,00 atau 96,51% dari anggaran yang ditargetkan sebesar

Rp.57.194.604.303,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp.49.911.050.361,00 maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.285.430.120,00 atau 10,59%. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Besar	8.419.350,00	8.417.300,00	99,98	3.007.209.575,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.236.187.700,00	2.966.055.399,00	91,65	4.263.295.208,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	255.300.000,00	193.000.000,00	75,60	0,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan RumahTangga	7.504.314.233,00	7.322.287.937,00	97,57	5.630.030.947,00
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi,dan Pemancar	1.051.482.853,00	1.041.275.390,00	99,03	991.246.387,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.812.718.792,00	22.959.988.705,00	96,42	13.487.419.319,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.302.867.871,00	1.256.862.480,00	96,47	1.669.598.250,00
8	Belanja Modal Komputer	9.554.067.592,00	9.011.102.600,00	94,32	10.341.174.115,00
9	Belanja Modal Alat Eksplorasi	143.468.610,00	139.949.970,00	97,55	346.912.310,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.327.000,00	6.270.000,00	99,10	18.485.000,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	23.726.250,00	23.720.000,00	99,97	232.469.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	172.112.030,00	170.553.200,00	99,09	8.160.000,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.519.679.110,00	7.731.616.470,00	0,00	8.471.219.604,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.603.932.912,00	2.365.381.030,00	90,84	1.443.830.646,00
	Jumlah	57.194.604.303,00	55.196.480.481,00	96,51	49.911.050.361,00

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.231.974.212,00	148.677.679.734,16	44.116.614.476,83

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.148.677.679.734,16 atau 95,16% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.156.231.974.212,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp.44.116.614.476,83 maka realisasi

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.104.561.065.257,33 atau 237,01%. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	155.406.703.012,00	147.877.064.980,16	95,15	43.871.939.476,83
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	450.000.000,00	427.000.441,00	94,89	0,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	375.271.200,00	373.614.313,00	99,56	244.675.000,00
	Jumlah	156.231.974.212,00	148.677.679.734,16	95,16	44.116.614.476,83

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.405.716.366,00	95.734.545.493,00	80.427.924.503,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.95.734.545.493,00 atau 80,18% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.119.405.716.366,00, Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp.80.427.924.503,00 maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.15.306.620.990,00 atau 19,03%. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	112.654.174.017,00	89.247.261.768,00	79,22	74.574.667.868,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	4.662.289.649,00	4.405.163.000,00	94,48	5.803.789.635,00
3	Belanja Modal Instalasi	2.089.252.700,00	2.082.120.725,00	99,66	49.467.000,00
	Jumlah	119.405.716.366,00	95.734.545.493,00	80,18	80.427.924.503,00

Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Jalan	99.927.549.514,00	79.360.509.018,00	79,42	54.619.154.685,00
2	Belanja Modal Jembatan	12.726.624.503,00	9.886.752.750,00	77,69	19.955.513.183,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.188.120.570,00	1.178.866.000,00	99,22	1.313.797.450,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.474.169.079,00	3.226.297.000,00	92,87	3.289.641.753,00

5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	421.540.000,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	89.252.700,00	82.120.725,00	92,01	48.400.000,00
7	Belanja Modasl bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	730.410.432,00
8	Belanja Modal Instalasi PembangkitListrik	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	49.467.000,00
	Jumlah	119.405.716.366,00	95.734.545.493,00	80,18	80.427.924.503,00

		Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.606.906.208,00	9.555.573.820,00	5.800.034.859,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp.9.555.573.820,00 atau 99,47% dari anggaran sebesar Rp.9.606.906.208,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp.5.800.034.859,00 maka realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.755.538.961,00 atau 64,75%. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	295.809.000,00	294.560.000,00	99,58	141.013.679,00
2	Belanja Modal Barang BercorakKesenian/Kebudayaan/Olahraga	167.359.279,00	167.353.410,00	100,00	14.468.850,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.626.746.669,00	1.619.731.700,00	99,57	780.378.900,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.516.991.260,00	7.473.928.710,00	99,43	4.864.173.430,00
	Jumlah	9.606.906.208,00	9.555.573.820,00	99,47	5.800.034.859,00

		Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.268.976.700,00	1.265.847.900,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.265.847.900,00 atau 99,75% dari Anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.1.268.976.700,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2022 sebesar Rp.0,00 maka realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.265.847.900,00 atau 100,00%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset TidakBerwujud	1.268.976.700,00	1.265.847.900,00	99,75	0,00
	Jumlah	1.268.976.700,00	1.265.847.900,00	99,75	0,00

Tahun 2023

		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.3	Belanja Tak Terduga	32.989.391.184,00	4.915.878.100,00	429.113.049,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	32.989.391.184,00	4.915.878.100,00	429.113.049,00

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2023 sebesar Rp.4.915.878.100,00 atau 14,90% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.32.989.391.184,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2022 sebesar Rp.429.113.049,00 maka realisasi Belanja Tak terduga tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.486.765.051,00 atau 1045,59%. Realisasi Belanja Tak Terduga selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.915.878.100,00 merupakan Belanja yang diperuntukan dalam penanganan Bencana (Batingsor), Bencana (Karhutla), Kejadian Luar Biasa (DBD), Pengembalian Pajak, dan Bantuan Sosial Tidak Terencana dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI
1	Penanganan Bencana (Batingsor)	130.000.000,00
2	Penanganan Bencana (Karhutla)	300.741.952,00
3	Penanganan KLB (DBD)	4.217.923.758,00
4	Bantuan Sosial Tidak Terencana	262.670.190,00
5	Pengembalian Pajak	4.542.200,00
	Jumlah	4.915.878.100,00

Tahun 2023

		Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.4	Belanja Transfer	270.907.108.657,00	268.777.407.033,00	240.938.586.117,00

Realisasi Belanja Transfer tahun 2023 sebesar Rp.268.777.407.033,00 atau 99,21% dari anggarannya sebesar Rp.270.907.108.657,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer tahun 2022 sebesar Rp.240.938.586.117,00 maka realisasi Belanja Transfer tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.27.838.820.916,00 atau 11,55%. Belanja Transfer tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2023. Anggaran dan

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bagi Hasil	5.441.032.307,00	5.217.811.100,00	95,90	4.806.915.200,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	265.466.076.350,00	263.559.595.933,00	99,28	236.131.670.917,00
	Jumlah	270.907.108.657,00	268.777.407.033,00	99,21	240.938.586.117,00

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.4.01 Belanja Bagi Hasil	5.441.032.307,00	5.217.811.100,00	4.806.915.200,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2023 sebesar Rp.5.217.811.100,00 atau 95,90% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.5.441.032.307,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp.4.806.915.200,00 maka realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.410.895.900,00 atau 8,55%. Belanja Bagi Hasil tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa selama Tahun Anggaran 2023. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.767.193.025,00	4.652.517.600,00	97,59	4.231.631.600,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	673.839.282,00	565.293.500,00	83,89	575.283.600,00
	Jumlah	5.441.032.307,00	5.217.811.100,00	95,90	4.806.915.200,00

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.767.193.025,00	4.652.517.600,00	4.231.631.600,00

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp.4.652.517.600,00 atau 97,59% dari anggarannya sebesar Rp.4.767.193.025,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp.4.231.631.600,00 maka realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.420.886.000,00 atau 9,95%. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa selama Tahun Anggaran 2023.

				Tahun 2023		
				Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.4.01.02	Belanja	Bagi	Hasil	673.839.282,00	565.293.500,00	575.283.600,00
Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa						

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp.565.293.500,00 atau 83,89% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.673.839.282,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp.575.283.600,00 maka realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.9.990.100,00 atau 1,74%. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Sanggau kepada Pemerintahan Desa selama tahun anggaran 2023.

				Tahun 2023		
				Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
5.4.02	Belanja	Bantuan	Keuangan	265.466.076.350,00	263.559.595.933,00	236.131.670.917,00
5.4.02.05	Belanja	Bantuan	Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	265.466.076.350,00	263.559.595.933,00	236.131.670.917,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp.263.559.595.933,00 atau 99,28% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.265.466.076.350,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan keuangan tahun 2022 sebesar Rp.236.131.670.917,00 maka realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.27.427.925.016,00 atau 11,62%. Belanja bantuan keuangan Merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	105.409.590.193,00
2	Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa (DD)	158.150.005.740,00
Jumlah		263.559.595.933,00

Tahun 2023			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
SURPLUS/(DEFISIT)	(212.457.093.495,00)	41.139.066.414,37	(54.163.604.593,06)
Realisasi Surplus tahun 2023 sebesar Rp.41.139.066.414,37 atau (19,36%) dari anggaran yang ditargetkan sebesar (Rp.212.457.093.495,00). Jika dibandingkan			

dengan realisasi Surplus/Defisit tahun 2022 sebesar (Rp.54.163.604.593,06) maka realisasi Surplus/Defisit tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.95.189.521.067,43 atau 175,74%. Jumlah tersebut merupakan Surplus sebesar Rp.41.025.916.474,37 atas realisasi Pendapatan dikurangi realisasi Belanja dan Transfer selama Tahun Anggaran 2023.

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
6 Pembiayaan Netto	212.457.093.495,00	213.107.073.494,12	258.418.391.192,18

Pembiayaan netto tahun 2023 sebesar Rp.213.107.073.494,12 atau 100,31% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.212.457.093.495,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto tahun 2022 sebesar Rp.258.418.391.192,18 maka realisasi Pembiayaan Netto tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.45.311.317.698,06 atau 17,53%. Realisasi pembiayaan merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
6.1 Penerimaan Pembiayaan	226.457.093.495,00	227.107.073.494,12	305.918.391.192,18

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.227.107.073.494,12 atau 100,29% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.226.457.093.495,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp.305.918.391.192,18 maka realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.78.811.317.698,06 atau 25,76%. Anggaran dan Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Penggunaan SiLPA	204.254.786.599,00	204.254.766.598,12	100,00	305.918.391.192,18
2	Pencairan Dana Cadangan	22.202.306.896,00	22.852.306.896,00	102,93	0,00
	Jumlah	226.457.093.495,00	227.107.073.494,12	100,29	305.918.391.192,18

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
6.1.01 Penggunaan SiLPA	204.254.786.599,00	204.254.766.598,12	305.918.391.192,18
Realisasi penggunaan SiLPA tahun 2023 sebesar Rp.204.254.766.598,12 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp. 204.254.786.599,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penggunaan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp.305.918.391.192,18 maka realisasi Penggunaan SiLPA tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.101.663.624.594,06) atau (33,23%).			

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan	22.202.306.896,00	22.852.306.896,00	0,00
Realisasi Pencairan Dana Cadangan tahun 2023 sebesar Rp.22.852.306.896 atau 102,93% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 22.202.306.896,00. Pencairan Dana Cadangan berdasarkan Surat Pemindahbukuan Nomor 001/BUD/BPKAD/PY tanggal 13 Desember 2023. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024.			

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
6.2 Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	47.500.000.000,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.14.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.14.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp.47.500.000.000,00 maka realisasi Pengeluaran pembiayaan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.33.500.000.000,06) atau (70,53%). Anggaran dan Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:			

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perumda Tirta	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00

	Pancur Aji				
3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
	Jumlah	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	100,00	47.500.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.14.000.000.000,00 terdiri dari: Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar sebesar Rp.10.000.000.000,00, dan Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Pancur Aji sebesar Rp.4.000.000.000,00.

Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar sebesar Rp.10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sesuai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 265/BPKAD/2023 tanggal 27 Juli 2023, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/005673/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/8/2023, tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp.5.000.000.000,00, dan;
2. Sesuai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 441/BPKAD/2023 tanggal 22 November 2023, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/013079/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/12/2023, tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Pancur Aji Tahun 2023 sebesar Rp.4.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sesuai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 335/BPKAD/2023 tanggal 18 September 2023, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/008741/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/10/2023, tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,00, dan;
2. Sesuai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 442/BPKAD/2023 tanggal 22 November 2023, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/013078/LS/ 5.02.0.00.0.00.02.0000/M/12/2022, tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,00.

Tahun 2023

	Anggaran	Realisasi	Realisasi 2022
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	254.133.009.969,49	204.254.786.599,12

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.254.133.009.969,49 merupakan realisasi Surplus ditambah dengan realisasi Pembiayaan Netto, berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- Surplus/(Defisit)	Rp	41.139.066.414,37
- Pembiayaan Netto	Rp	213.107.073.494,12
SILPA	Rp	254.246.139.908,49

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 menurut APBD, Laporan Realisasi Belanja Tahun 2023 per Organisasi, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	204.254.786.599,12	305.908.008.764,28
Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp.204.254.786.599,12 merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya.		

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	204.254.766.598,12	305.918.391.192,18

Penggunaan SAL tahun 2023 sebesar Rp.204.254.766.598,12 merupakan bagian dari SiLPA tahun 2022 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	254.246.139.908,49	204.254.786.599,12
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp.254.246.139.908,49 merupakan nilai SiLPA yang dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran, dapat diuraikan sebagai berikut:		

- Surplus/Defisit Anggaran	Rp	41.139.066.414,37
- Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>213.107.073.494,12</u>
SILPA Tahun Berjalan	Rp	254.246.139.908,49

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(20.001,00)	8.569.029,40

Terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang mempengaruhi perubahan SAL pada Tahun Anggaran 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.5 Lain-lain	0,00	1.813.398,50

Tidak terdapat Koreksi Lain-Lain yang mempengaruhi perubahan SAL pada Tahun Anggaran 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	254.246.139.908,49	204.254.786.599,12

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp.254.246.139.908,49

C. NERACA

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1 Aset	3.672.038.218.229,81	3.442.042.540.370,49
Aset Pemerintah Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.672.038.218.229,81 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.442.042.540.370,49 dengan rincian sebagai berikut:		

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Lancar	524.198.992.010,95	509.403.436.358,01
2	Investasi Jangka Panjang	133.921.263.085,36	119.921.263.085,36
3	Aset Tetap	2.824.409.975.390,14	2.607.453.077.174,18
4	Dana Cadangan	7.147.693.104,00	30.000.000.000,00
5	Aset Lainnya	182.360.294.639,36	175.264.763.752,94
	Jumlah	3.672.038.218.229,81	3.442.042.540.370,49

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1 Aset lancar	524.198.992.010,95	509.403.436.358,01

Asset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp.524.198.992.010,95 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.509.403.436.358,01 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.14.795.555.652,94 atau 2,90 % dari saldo Asset Lancar per 31 Desember 2022. Rincian Asset Lancar sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Kas di Kas Daerah	240.301.011.063,66	190.797.837.980,86
2	Kas di Bendahara Penerimaan	121.035.100,00	8.936.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	765.578.874,50	253.669.268,00
4	Kas di BLUD	9.068.405.051,91	12.991.195.558,57
6	Kas di Bendahara BOS	102.923.086,42	202.059.806,90
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	1.087.984,79
7	Kas Lainnya-PER	957.549.755,83	960.498.911,83
8	Kas Lainnya-BOK	3.895.194.794,00	0,00
9	Piutang Pajak	27.992.937.085,70	24.238.827.776,70
10	Piutang Retribusi	47.752.127,00	23.777.127,00
11	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
12	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	7.199.516.866,00	2.320.918.768,33
13	Piutang Transfer	8.441.567.041,00	10.897.385.592,43

14	Piutang Lainnya	3.259.263.636,62	3.265.645.636,62
15	Penyisihan Piutang	(19.886.241.173,86)	(18.153.261.500,50)
16	Beban Jasa Dibayar Dimuka	419.349.646,41	410.536.689,26
16	Persediaan	241.513.149.055,76	281.184.320.757,22
	Jumlah	524.198.992.010,95	509.403.436.358,01

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	240.301.011.063,66	190.797.837.980,86

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.240.301.011.063,66 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.190.797.837.980,86

Adapun saldo Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bank Kalbar Kas Daerah Nomor Rekening 3001000016	Rp	235.573.361.271,19
2. Bank Kalbar Kas Daerah Nomor Rekening 3001006966	Rp	4.738.825.161,47
3. Koreksi Bank Kurang Mendeбет		(11.175.369,00)
Jumlah	Rp	240.301.011.063,66

Rekonsiliasi Bank untuk Kas Daerah pada **Lampiran 4.**

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.240.301.011.063,66.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	121.035.100,00	8.936.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.121.035.100,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.8.936.000,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Temenggung Gergaji dari tanggal 16 November s.d 31 Desember 2023 yang baru disetor ke rekening kas daerah pada tanggal 5 Januari 2024.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	765.578.874,50	253.669.268,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.765.578.874,50 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 253.669.268,00 Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Uang Persediaan (UP)	760.134.075,50
2	Sisa Pajak pada Dinas Kesehatan yang belum disetor	702.456,00
3	Utang BPJS yang belum disetor	3.088.503,00
4	Sisa TPP yang belum dibayarkan kepada ASN	1.516.840,00
5	Gaji dan Tunjangan yang belum dibayarkan kepada ASN	137.000,00
	Jumlah	765.578.874,50

Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NO	Nama SKPD	Saldo (Rp)	Tanggal Setor
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.093.748,00	9 Januari 2024
2	Dinas Kesehatan	702.456,00	-
3	Satuan Polisi Pamong Praja	90.000,00	2 Januari 2024
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	142.522,00	8 Januari 2024
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.147.325,00	5 Januari 2024
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.684.085,00	3 Januari 2024
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53.829.891,00	2 Januari 2024
8	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	6.889,00	9 Januari 2024
9	Sekretariat DPRD	425.728.507,00	3 Januari 2024
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	67.052.782,00	5 Januari 2024
11	Badan Pendapatan Daerah	228.140,50	5 Januari 2024-
12	Inspektorat Kabupaten	77.941.349,00	9 Januari 2024
13	Kec. Kapuas	50.118.617,00	3 Januari 2024
14	Kec. Mukok	283.176,00	-
15	Kec. Jangkang	2.165.775,00	3 Januari 2024
16	Kec. Beduai	219.591,00	-
17	Kec. Kembayan	20.734.950,00	2 Januari 2024
18	Kec. Parindu	1.516.840,00	-
19	Kec. Tayan Hulu	264.264,00	-
20	Kec. Tayan Hilir	5.715.205,00	8 Januari 2024
21	Kec. Toba	581.290,00	9 Januari 2024
		2.321.472,00	-
22	Kec. Entikong	34.873.000,00	9 Januari 2024
		137.000,00	-
	Total Kas di Bendahara Pengeluaran	765.578.874,50	

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.4 Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	9.068.405.051,91	12.991.195.558,57

Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) per 31 Desember 2023 sebesar Rp.9.068.405.051,91 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.991.195.558,57. Kas di BLUD merupakan saldo kas akhir pada RSUD M.Th Djaman dan sembilan belas Puskesmas dengan status BLUD dengan rincian sebagai berikut:

1. Kas di BLUD – RSUD M.Th Djaman sebesar Rp.7.361.321.791,25

Kas di BLUD - RSUD M.Th Djaman per 31 Desember 2023, dengan rincian saldo Kas di Bendahara BLUD dan Rekening Giro adalah sebagai berikut:

- Bank Kalbar Cabang Sanggau	Rp	156.165.704,84
- Bank Mandiri KCP Sanggau	Rp	7.672.601,08

- BRI Cabang Sanggau Rp 793.695,12
- Uang Tunai/cash on hand di Bendahara
Penerimaan Rp 185.533.251,00
- Rek. BLUD (Bank Kalbar Cabang Sanggau
Rek.3001007636) Rp 7.011.156.539,21

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 Rp 7.361.321.791,25

2. Kas di BLUD–Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.707.083.261,66

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Puskesmas BLUD per 31 Desember 2023, yang terdiri dari SiLPA Dana BLUD Tahun 2023 dan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Puskesmas -BLUD	Silpa per 31 Desember 2023	Utang Pajak per 31 Desember 2023	Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023
1	Puskesmas Balai Sebut	437.170.934,60	1.143.060,00	438.313.994,60
2	Pusksemas Entikong	93.579.679,57	285.046,00	93.864.725,57
3	Puskesmas Balai Karangan	262.981.906,55	960.000,00	263.941.906,55
4	Puskesmas Teraju	79.321.661,00	0,00	79.321.661,00
5	Puskesmas Meliau	11.932.749,50	5.877.500,00	17.810.249,50
6	Puskesmas Sanggau	29.457.225,63	0,00	29.457.225,63
7	Puskesmas Tanjung Sekayam	12.362.769,35	0,00	12.362.769,35
8	Puskesmas Belangin Tiga	9.582.594,87	0,00	9.582.594,87
9	Puskesmas Kedukul	44.286.983,10	0,00	44.286.983,10
10	Puskesmas Bonti	26.046.216,86	0,00	26.046.216,86
11	Puskesmas Pusat Damai	133.030.490,00	0,00	133.030.490,00
12	Puskesmas Tayan	60.788.844,59	0,00	60.788.844,59
13	Puskesmas Kampung Kawat	186.598.798,91	0,00	186.598.798,91
14	Puskesmas Batang Tarang	66.682.597,30	0,00	66.682.597,30
15	Puskesmas Sosok	126.792.161,52	0,00	126.792.161,52
16	Puskesmas Kembayan	62.032.253,18	0,00	62.032.253,18
17	Puskesmas Beduai	51.685.248,87	0,00	51.685.248,87
18	Puskesmas Noyan	476.803,88	0,00	476.803,88
19	Puskesmas Harapan Makmur	4.007.735,38	0,00	4.007.735,38
	Jumlah	1.698.817.654,66	8.265.606,00	1.707.083.260,66

Jumlah SiLPA sebesar Rp.1.707.083.260,66 pada Dinas Kesehatan BLUD, didalamnya termasuk sisa Pajak yang belum disetor per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.8.265.606,00.

Rekapitulasi perhitungan Kas di BLUD pada Sembilan Belas Puskesmas BLUD di Wilayah Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 1 dan 2**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS	102.923.086,42	202.059.806,90

Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp.102.923.086,42 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.202.059.806,90. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2023 terdapat Saldo Dana BOS sebesar Rp.102.923.086,42 terdiri dari saldo BOS REGULER sebesar Rp.102.003.715,42, Saldo BOS AFKIN sebesar Rp.828.531,00 dan Saldo BOS SWASTA sebesar Rp.0,00. Rincian mutasi Dana BOS dan BOP Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis BOS	Saldo Awal (1 Januari 2023)	Pendapatan (TA. 2023)	Realisasi Belanja (TA. 2023)	Saldo Akhir (31 Des 2023)
1	BOS REGULER	201.231.275,64	76.192.914.023,00	76.292.050.743,22	102.094.555,42
	- SD	115.037.341,11	53.454.939.730,00	53.501.988.852,61	67.988.218,50
	- SMP	86.193.934,53	22.737.974.293,00	22.790.061.890,61	34.106.336,92
2	BOS AFKIN	828.531,26	2.250.000.000,00	2.250.000.000,26	828.531,00
	- SD	639.861,55	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	639.861,55
	- SMP	188.669,71	525.000000,00	525.000.000,26	188.669,45
3	BOS SWASTA	-	6.106.956.659,00	6.106.956.659,00	0,00
	- SD	-	2.072.382.204,00	2.072.382.204,00	0,00
	- SMP	-	4.499.574.455,00	4.499.574.455,00	0,00
4	BOP	-	6.604.286.800,00	6.552.136.800,00	0,00
	- BOP PAUD	-	4.315.756.800,00	4.315.756.800,00	0,00
	- BOP KESETERAAN	-	2.288.530.000,00	2.236.380.000,00	52.150.000,00
	JUMLAH	202.059.806,90	91.619.157.482,00	91.666.144.202,48	155.073.086,42

BOP Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terdapat pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp. 52.150.000,00 pada tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp.26.075.000,00 dan tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp. 26.075.000,00 sehingga jumlah kas pada Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp.102.923.086,42. Rincian lebih lanjut terkait mutasi Dana BOS Afirmasi dan Kinerja, BOS Reguler BOS Swasta, BOP PAUD dan Kesetaraan tahun 2023, dapat dilihat pada **Lampiran 3.1 sampai dengan 3.6**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.7 Kas Lainnya	4.852.744.549,83	960.498.911,83

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.852.744.549,83 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.960.498.911,83. Saldo Kas Lainnya terdiri dari:

1. Saldo Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) di Sekretariat Daerah. Saldo Dana PER berada di Rekening Penampung Piutang PER (Nomor Rekening 3001006811) sebesar Rp.957.549.755,83. Saldo Dana PER, sebelumnya merupakan Investasi Non Permanen, namun karena terkendala penagihannya maka investasi tersebut dihentikan dan sisa dana yang ada di rekening PER disajikan sebagai Kas Lainnya. Atas saldo kas yang ada di rekening PER tersebut tidak menjadi bagian dari penganggaran Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2. Saldo Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.3.895.194.794,00. Saldo Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan tersebut merupakan saldo BOK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Penyaluran	Penggunaan	Saldo
1	Balai Karangan	1.136.310.000,00	960.660.660,00	175.649.340,00
2	Balai Sebut	1.339.863.000,00	964.698.674,00	375.164.326,00
3	Batang Tarang	918.602.000,00	722.306.408,00	196.295.592,00
4	Beduwai	1.034.454.000,00	943.700.389,00	90.753.611,00
5	Belangin 3	631.827.000,00	441.191.693,00	190.635.307,00
6	Bonti	1.574.279.000,00	1.180.705.993,00	393.573.007,00
7	Entikong	949.788.000,00	793.959.762,00	155.828.238,00
8	Harapan Makmur	999.557.000,00	672.251.040,00	327.305.960,00
9	Kampung Kawat	1.078.185.000,00	720.441.823,00	357.743.177,00
10	Kedukul	842.608.000,00	762.698.035,00	79.909.965,00
11	Kembayan	1.303.274.000,00	1.189.538.393,00	113.735.607,00
12	Meliau	797.471.000,00	622.035.433,00	175.435.567,00
13	Noyan	848.900.000,00	675.725.780,00	173.174.220,00
14	Pusat Damai	1.297.463.000,00	894.921.066,00	402.541.934,00
15	Sanggau	1.384.087.000,00	1.357.653.021,00	26.433.979,00
16	Sosok	1.186.685.500,00	824.426.255,00	362.259.245,00
17	Tj,Sekayam	995.638.000,00	940.145.034,00	55.492.966,00
18	Tayan	710.484.000,00	593.274.774,00	117.209.226,00
19	Teraju	792.881.000,00	666.827.473,00	126.053.527,00
	JUMLAH	19.822.356.500,00	15.927.161.706,00	3.895.194.794,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8 Piutang Pendapatan	43.681.773.119,70	37.480.909.264,46

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.43.681.773.119,70 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.37.480.909.264,46. Piutang Pendapatan terdiri dari:

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	27.992.937.085,70	24.238.827.776,70
Piutang Retribusi Daerah	47.752.127,00	23.777.127,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Transfer	8.441.567.041,00	10.897.385.592,43
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	7.199.516.866,00	2.320.918.768,33
JUMLAH	43.681.773.119,70	37.480.909.264,46

Rekapitulasi perhitungan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 terdapat pada **lampiran 4 dan 5**.

Rincian lebih lanjut dari Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8.1 Piutang Pajak Daerah	27.992.937.085,70	24.238.827.776,70

Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp.27.992.937.085,70 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.24.238.827.776,70. Pada tahun 2023 terdapat penambahan dan pengurangan Piutang Pajak Daerah serta koreksi Piutang Pajak Daerah, dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	24.238.827.776,70
- Penambahan Tahun 2023	Rp	48.268.136.281,00
- Pengurangan Tahun 2023	Rp	(44.491.117.622,00)
- Mutasi Kurang dari Koreksi Tahun 2023.	Rp	(22.909.350,00)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	27.992.937.085,70

Mutasi Tambah sebesar Rp.48.268.136.281,00 merupakan jumlah ketetapan pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) selama tahun 2023, sedangkan mutasi kurang sebesar Rp.44.491.117.622,00 merupakan jumlah penerimaan pajak berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) selama Tahun 2023, sementara mutasi kurang dari koreksi tahun 2023 merupakan koreksi nilai piutang pajak daerah karena sudah terdapat pembayaran pada tahun sebelumnya namun belum disesuaikan pada nilai piutang.

Penambahan dan pengurangan serta koreksi Piutang Pajak Daerah tahun 2023 terdapat pada obyek pajak sebagai berikut:

No	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang 2022	SKP	STS	Koreksi		Saldo Akhir Piutang 2022
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1	Pajak Hotel	156.550.170,00	895.270.712,00	922.155.412,00	-	14.113.350,00	115.552.120,00
2	Pajak Restoran	841.428.508,00	1.047.228.285,00	1.045.729.785,00	-	200.000,00	842.727.008,00
3	Pajak Reklame	529.268.286,00	1.512.442.815,00	1.121.642.424,00	-	-	920.068.677,00
4	Pajak Penerangan Jalan	151.077.315,70	25.565.519.142,00	25.557.639.293,00	-	-	158.957.164,70
5	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	462.659.225,00	11.005.425.555,00	10.893.521.335,00	-	8.596.000,00	565.967.445,00
6	Pajak Bumi Dan Bangunan	22.080.465.956,00	7.942.149.692,00	4.650.329.293,00	-	-	25.372.286.355,00
7	Pajak Hiburan	13.360.500,00	44.561.590,00	44.561.590,00	-	-	13.360.500,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	4.017.816,00	152.041.490,00	152.041.490,00	-	-	4.017.816,00
9	Pajak Burung Walet	-	103.497.000,00	103.497.000,00	-	-	-
Total Piutang Pajak 2023		24.238.827.776,70	48.268.136.281,00	44.491.117.622,00	-	22.909.350,00	27.992.937.085,70

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp.27.992.937.085,70 merupakan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

1) Piutang Pajak Hotel sebesar	Rp 115.552.120,00
2) Piutang Pajak Restoran sebesar	Rp 842.727.008,00
3) Piutang Pajak Reklame sebesar	Rp 920.068.677,00
4) Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar	Rp 158.957.164,70
5) Piutang Pajak Minerba sebesar	Rp 565.967.445,00
6) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar	Rp 25.372.286.355,00
7) Piutang Pajak Hiburan sebesar	Rp 13.360.500,00
8) Pajak Air Bawah Tanah sebesar	Rp 4.017.816,00
Saldo per 31 Desember 2023	<u>Rp 27.992.937.085,70</u>

5.3.1.1.8.1.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2023 (16.107.281.783,50) **31 Desember 2022 (14.458.644.694,07)**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.16.107.281.783,50 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.14.458.644.694,07.

Rincian penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar	Rp (113.123.025,00)
2) Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar	Rp (813.842.891,58)
3) Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar	Rp (156.605.124,96)
4) Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar	Rp (151.101.714,60)

5) Penyisihan Piutang Pajak Minerba sebesar	Rp (321.396.459,60)
6) Penyisihan Piutang PBB sebesar	Rp (14.537.450.286,16)
7) Penyisihan Piutang Pajak Hiburan sebesar	Rp (13.360.500,00)
8) Pajak Air Bawah Tanah sebesar	Rp (401.781,60)
Saldo per 31 Desember 2023	<u>(Rp 16.107.281.783,50)</u>

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8.1.2 Piutang Pajak Daerah Netto	11.885.655.302,23	9.780.183.082,64

Piutang Pajak Daerah Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp.11.885.655.302,23 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.9.780.183.082,64. Rincian Piutang Pajak Daerah Netto sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Hotel Netto sebesar	Rp 2.429.095,00
2) Piutang Pajak Restoran Netto sebesar	Rp. 28.884.116,42
3) Piutang Pajak Reklame Netto sebesar	Rp. 763.463.552,05
4) Piutang Pajak Penerangan Jalan Netto sebesar	Rp. 7.855.450,11
5) Piutang Pajak Minerba Netto sebesar	Rp. 244.570.985,40
6) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Netto sebesar	Rp. 10.834.836.068,85
7) Piutang Pajak Hiburan Netto sebesar	Rp. 0,00
8) Piutang Pajak Air Bawah Tanah sebesar	Rp. 3.616.034,40
9) Piutang Pajak Sarang Burung Walet sebesar	Rp. 0,00
Saldo per 31 Desember 2023	<u>Rp.11.885.655.302,23</u>

Rekapitulasi Perhitungan Piutang Pajak Daerah dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi Daerah	47.752.127,00	23.777.127,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.47.752.127,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.23.777.127,00. Pada tahun 2023 terdapat penambahan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp.41.975.000,00 dan terdapat pengurangan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp.18.000.000,00

Mutasi penambahan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp. 41.975.000,00 merupakan Piutang Retribusi Kios. Mutasi Pengurangan Piutang Retribusi Daerah dari realisasi penerimaan Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Pengakuan Tahun 2008 sebesar Rp.18.000.000,00.

Perhitungan lebih lanjut atas mutasi tambah dan mutasi kurang retribusi daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	23.777.127,00
- Penambahan Tahun 2023	Rp	41.975.000,00
- Pengurangan Tahun 2023	Rp	(18.000.000,00)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	47.752.127,00

Adapun rincian saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.47.752.127,00, terdiri dari:

No.	Uraian	Piutang Retribusi 2023	Piutang Retribusi 2022
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan yang tidak dapat ditagih sejak tahun 2008 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	0,00	18.000.000,00
3.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2019 pada Dinas Perindagkop dan dan UKM, berdasarkan rekomendasi hasil Reviu Inspektorat Kab.Sanggau atas LKPD Kab. Sanggau tahun 2019.	5.777.127,00	5.777.127,00
4	Piutang Retribusi Kios Tahun 2023	41.975.000,00	0,00
	Total Piutang Retribusi	47.752.127,00	23.777.127,00

5.3.1.1.8.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2023 31 Desember 2022
(3.098.438,50) (20.888.563,50)

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.098.438,50 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.20.888.563,50. Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp.3.098.438,50 merupakan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Jumlah penyisihan piutang retribusi sebesar Rp 2.888.563,50 merupakan nilai penyisihan piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan per 31 Desember 2023 yang disisihkan sebesar 50 persen dari saldo piutang retribusi tersebut sejak tahun 2019 dengan kualitasnya diragukan.
2. Jumlah penyisihan piutang retribusi sebesar Rp.209.875,00 merupakan nilai penyisihan piutang Retribusi Kios per 31 Desember 2023 yang disisihkan sebesar 0,5 persen dari saldo piutang retribusi tahun 2023 dengan kualitas Lancar.

5.3.1.1.8.2.2 Piutang Retribusi Netto

31 Desember 2023 31 Desember 2022
44.653.688,50 2.888.563,50

Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp.44.653.688,50 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.888.563,50. Piutang Retribusi Netto merupakan nilai perhitungan saldo akhir Piutang Retribusi tahun 2023 dikurangi penyisihan piutang retribusi tahun 2023 (Rp.47.752.127,00 – Rp.3.098.438,50) = Rp 44.653.688,50.

Rekapitulasi perhitungan Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8.4 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	7.199.516.866,00	2.320.918.768,33

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.7.199.516.866,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.320.918.768,33. Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2023 terdiri dari Piutang Jasa Layanan Kesehatan-BLUD sebesar Rp.7.199.516.866,00 dan piutang jasa lainnya –BLUD sebesar Rp3.413.000,00. Rincian perhitungan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.286.866.589,00
- Reklasifikasi dari Piutang Lainnya	Rp	-
- Penambahan Tahun 2023	Rp	42.183.060.690,00
- Pengurangan Tahun 2023	Rp	(37.122.452.852,00)
- Koreksi Nilai Piutang	Rp	(157.957.561,00)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	7.199.516.866,00

Realisasi penambahan dan pengurangan piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah atas Piutang Jasa Layanan Kesehatan - BLUD serta Piutang Jasa Lainnya-BLUD sebesar Rp.42.183.060.690,00 merupakan penambahan atas piutang yang terbentuk pada tahun 2023. Mutasi kurang atas piutang jasa layanan Kesehatan – BLUD serta piutang jasa lainnya – BLUD sebesar Rp.37.112.452.852,00 merupakan penerimaan atas jasa layanan pada tahun 2023. Sementara mutase kurang sebesar Rp.157.957.561,00 merupakan koreksi atas piutang pada PT.Askes (BPJS Covid) sebesar Rp.68.878.000,00 dan atas piutang pada Jampersal/Jamkesmas sebesar Rp.89.079.561,00. Koreksi tersebut dilakukan karena pengakuan piutang tersebut tidak tepat. Atas piutang pada PT. Askes (BPJS Covid) sebesar Rp.68.878.000,00 sesuai BA rekonsiliasi internal antara Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan dengan Direktur RSUD M.Th. Djaman tanggal 7 Maret 2023 menyatakan bahwa nilai sebesar Rp.68.878.000,00 merupakan nilai pemotongan audit, sehingga seharusnya bukan merupakan nilai piutang. Sedangkan atas nilai piutang Jampersal/Jamkesmas sebesar Rp.89.079.561,00 tahun 2014 merupakan pengembalian sisa dana Jamkesmas kepada Kementerian Kesehatan atas selisih nilai penerimaan dan nilai kalim pada tahun 2013.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023, dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	
1	Piutang Jasa Layanan Kesehatan - BLUD	Rp	7.196.103.866,00
2	Piutang Jasa Lainnya - BLUD	Rp	3.413.000,00
	Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp	7.199.516.866,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8.4.1 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(516.597.315,24)	(408.082.606,31)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.516.697.315,24 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.408.082.606,31.

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2023 sebesar Rp.516.597.315,24 merupakan nilai penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

- Penyisihan Piutang Jasa Layanan Kesehatan - BLUD	Rp	515.192.315,24
- Penyisihan Piutang Jasa Lainnya - BLUD	Rp	1.405.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp	516.597.315,24

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8.4.2 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	6.683.549.292,77	1.912.836.162,02

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp.6.683.549.292,77 dan per 31 Desember 2022 Rp.1.912.836.162,02.

Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto adalah selisih antara total Saldo Akhir Piutang dengan Penyisihan piutang tak tertagih (Rp.7.199.516.866,00 – Rp.516.597.315,24) = Rp.6.682.919.550,76.

Rekapitulasi perhitungan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8.5 Piutang Transfer	8.441.567.041,00	10.897.385.592,43

Piutang Transfer per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.411.567.041,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.897.385.592,43. Saldo Piutang tersebut merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	10.897.385.592,43
- Penambahan Tahun 2023	Rp	8.441.567.041,00
- Pengurangan Tahun 2023	Rp	(10.897.385.592,43)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	8.441.567.041,00

Atas saldo piutang transfer antar daerah tahun 2022, (Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalbar) sesuai SK Gubernur Kalimantan Barat sebesar Rp 10.897.385.592,43 telah terealisasi penerimaannya sebesar Rp.10.897.385.592,43.

Sedangkan Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.441.567.041,00 merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor PKB	731.094.966,00
2	Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	118.806.364,00
3	Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.262.201.913,00
4	Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.329.463.798,00
	Jumlah Piutang Transfer	8.441.567.041,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8.5.1 Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00

Tidak terdapat penyisihan piutang transfer per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.8.5.2 Piutang Transfer Netto	8.441.567.041,00	10.897.385.592,43

Piutang transfer netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.441.567.041,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.897.385.592,43. Nilai piutang transfer netto adalah

selisih antara total Saldo Akhir Piutang dengan Penyisihan piutang tak tertagih tahun berkenaan.

Rekapitulasi perhitungan piutang dan penyisihan piutang transfer per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.9 Piutang Lainnya	3.259.263.636,62	3.265.645.636,62
Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.259.263.636,62 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.265.645.636,62.		
Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.259.263.636,62 terdiri dari:		
1) Piutang Penjualan Angsuran sebesar	Rp	296.604.348,87
2) Piutang TP/TGR sebesar	Rp	2.511.585.575,75
3) Piutang Lain-Lain sebesar	Rp	451.073.712,00
Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2022	Rp	<u>3.259.263.636,62</u>

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a. Bagian Lancar Tagihan	296.604.348,87	296.604.348,87
Penjualan Angsuran		
Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp296.604.348,87. Rincian perhitungan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebagai berikut :		
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	296.604.348,87
- Penambahan Tahun 2023	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	<u>296.604.348,87</u>
Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran pada tahun 2023 dan tahun 2022. Piutang Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan penjualan kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang diperoleh dan diakui sejak tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:		
- Piutang penjualan kendaraan dinas roda dua	Rp	28.870.665,52
- Piutang penjualan kendaraan dinas roda empat	Rp	267.733.683,35
Jumlah Piutang Penjualan Angsuran	Rp	<u>296.604.348,87</u>

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
b. Bagian Lancar Tuntutan	2.511.585.575,75	2.511.585.575,75

Ganti Kerugian Daerah

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.511.585.575,75 dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.511.585.575,75
- Penambahan Tahun 2023	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.511.585.575,75

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022. Saldo akhir Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 terdiri dari:

1.	Piutang pengembalian tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Tahun 2010	Rp	1.673.393.400,00
2.	Piutang pengembalian bantuan program S2 Register Ilmu Sosial (M.Si) 36 orang dan Program S2 Register Manajemen (MM) 16 orang Tahun 2010	Rp	324.145.896,00
3.	Penggantian Gaji Guru Kantor Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Jangkang, atas dasar SK Bupati Sanggau Nomor 330 Tahun 2012.	Rp	453.526.779,75
4.	Piutang penggunaan langsung atas pendapatan penjualan angsuran, sesuai surat Ketua Majelis TP/TGR Kab Sanggau Nomor 700/2585/Itkab tanggal 26-10-2011	Rp	60.519.500,00
	Jumlah	Rp	2.511.585.575,75

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
c. Piutang Lain-Lain	451.073.712,00	457.455.712,00

Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp.451.073.712,00 dan per 31 Desember 2022 Rp.457.455.712,00.

Perhitungan piutang lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	457.455.712,00
- Penambahan Tahun 2023	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2023	Rp	(6.382.000,00)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	451.073.712,00

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2023, terdiri dari:

– Piutang Lain-Lain – PER Sekretariat Daerah (Perolehan tahun 2008)	Rp	331.133.962,00
– Piutang Lain-Lain Temuan kurang volume pekerjaan (Perolehan Tahun 2016)	Rp	119.939.750,00
Jumlah Piutang Lain-Lain	Rp	451.073.712,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.9.1 Penyisihan Piutang Lainnya	(3.259.263.636,62)	(3.265.645.636,62)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.259.263.623,62 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.265.645.636,62. Penyisihan piutang lainnya merupakan nilai penyisihan per 31 Desember 2023 yang menunjukkan bahwa seluruh jenis piutang lainnya tergolong kategori kualitas macet karena sudah lebih dari 5 (lima) tahun dengan persentase penyisihan piutang sebesar 100 % dari saldo piutang. Rincian penyisihan piutang lainnya sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran sebesar	Rp	(296.604.348,87)
2) Penyisihan Piutang TP/TGR sebesar	Rp	(2.511.585.575,75)
3) Penyisihan Piutang lain-lain sebesar	Rp	(451.073.712,00)
Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2023	Rp	(3.259.263.636,62)

Rekapitulasi perhitungan piutang Lainnya dan penyisihannya dapat dilihat pada lampiran 10 dan 11.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka	419.349.646,41	410.536.689,26

Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp.419.349.646,40 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.410.536.689,26. Nilai Beban di Bayar dimuka per 31 Desember 2023 merupakan pengeluaran biaya tahun 2023 atau sebelumnya, namun belum menjadi beban pada periode tahun 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau. Beban Dibayar Dimuka tersebut berada pada SKPD sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jumlah Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.494.386,92
2	RSUD M. Th. Djaman	17.206.557,38
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	11.949.337,49
4	Dinas Perumahan, CKTR dan Pertanahan	20.422.016,35
5	BPBD	5.974.530,98

6	Dinsos P3AKB	5.381.160,76
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.058.706,93
8	Dinas KPTPHP	1.408.174,39
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.464.850,14
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.375.274,64
11	DPM Pemdes	2.685.558,58
12	Dinas Perhubungan	13.340.128,37
13	Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro	6.626.576,08
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.276.000,33
15	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	9.698.360,66
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.395.095,37
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.335.675,65
18	Sekretariat Daerah	99.989.226,84
19	Sekretariat DPRD	9.651.461,58
20	Bappeda	1.333.333,33
21	BPKAD	109.255.551,72
22	Badan Pendapatan Daerah	5.215.686,62
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.970.251,99
24	Inspektorat Kabupaten	1.464.480,87
25	Kec. Noyan	4.899.177,49
26	Kec. Jangkang	426.229,51
27	Kec. Bonti	6.225.227,64
28	Kec. Beduai	4.835.962,30
29	Kec. Sekayam	4.760.749,21
30	Kec. Parindu	4.944.952,21
31	Kec. Balai	1.530.245,23
32	Kec. Meliau	4.463.212,00
33	Badan Kesbangpol	5.291.506,85
	Jumlah Total	419.349.646,41

Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.11 Persediaan	241.513.149.055,76	281.184.320.757,22

Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.241.513.149.055,76 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.281.184.320.757,22 berdasarkan hasil *stock opname* pada masing-masing SKPD. Persediaan tersebut termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum terbit Berita Acara Serah Terimanya. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah Persediaan per-31 Desember 2023	Jumlah Persediaan per-31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.788.152,00	8.269.547.738,41
2	Dinas Kesehatan	7.830.141.673,44	11.557.565.563,64
3	RSUD M. Th. Djaman-BLUD	8.297.712.296,12	9.060.463.204,17
4	Dinas Kesehatan - BLUD	3.335.858.498,00	437.262.223,00
5	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	17.324.636.538,00	49.135.523.942,00
6	Dinas Perumahan, CKTR dan Pertanahan	201.233.467.141,60	198.442.440.099,19
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	11.352.600,00
8	BPBD	3.808.965,00	2.229.000,00
9	Dinsos P3AKB	0,00	356.033,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, TP dan HP	1.403.177.976,60	1.177.784.405,81
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	371.850,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.786.115.810,00	2.063.165.210,00
13	Dinas Perhubungan	0,00	488.862.000,00
14	Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro	0,00	1.105.720,00
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	244.728,00
16	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	3.458.750,00	0,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	299.000,00
18	Dinas Perkebunan dan Peternakan	23.489.583,00	18.517.817,00
19	Sekretariat Daerah	20.039.780,00	260.617.580,00
20	Sekretariat DPRD	3.381.830,00	8.183.360,00
21	Bappeda	2.402.900,00	3.678.099,00
22	BPKAD	0,00	40.540,00
23	Badan Pendapatan Daerah	239.669.162,00	244.455.299,00
24	BKP SDM	0,00	254.745,00
	Jumlah Total	241.513.149.055,76	281.184.320.757,22

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 per jenis dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	Jumlah
1	Alat Tulis Kantor	8.927.351,00
2	Benda Pos	186.480,00
3	Kertas dan Cover	299.587.890,00
4	Perlengkapan Dinas	3.797.051,00
5	Bahan Cetak	325.694.932,00
6	Bahan Komputer	1.429.594.520,00
7	BBM dan Pelumas	22.788.600,00
8	Gas	117.071.700,00
9	Bahan Kegiatan Kantor lainnya	118.908.000,00
10	Obat-Obatan	19.138.563.005,56
11	Pakan Natura	1.490.597.626,60
12	Persediaan untuk diserahkan	218.557.431.899,60
	Jumlah	241.513.149.055,76

Atas saldo persediaan obat-obatan sebesar Rp.19.138.563.005,56 terdapat obat Griseofulvin 125mg sebanyak 49.300 butir senilai Rp.11.733.400,00. Berdasarkan Surat Edaran hasil inspeksi

yang dilakukan oleh Direktorat pengawasan Produksi ONPP Badan POM, Balai Besar POM di Bandung dan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, Ekspor Iimpor ONAPPZA Badan POM pada tanggal 21-23 Maret 2022 PT. Kimia Farma Plant Banjaran akan melakukan dan/atau melaporkan penarikan oleh pihak distributor atau pengirim kembali dari instalasi Farmasi Kabupaten Sanggau.

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 13**

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	133.921.263.085,36	119.921.263.085,36

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp133.921.263.085,36 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp119.921.263.085,36 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.14.000.000.000,00 atau 11,67% dari saldo Investasi jangka panjang per 31 Desember 2022. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	133.921.263.085,36	119.921.263.085,36
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	133.921.263.085,36	119.921.263.085,36

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00

Tidak terdapat investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	133.921.263.085,36	119.921.263.085,36

Saldo Investasi jangka panjang permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp.133.921.263.085,36 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau pada BUMD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	PT. Bank Kalbar	101.043.000.000
2	PDAM Tirta Pancur Aji	31.878.263.085,36
3	PT. Penjamin Kredit Daerah Kalbar	1.000.000.000,00
	Jumlah	133.921.263.085,36

Mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 desember 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	119.921.263.085,36
Penambahan Tahun 2023		
– Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar	Rp	10.000.000.000,00
– Penyertaan Modal pada PDAM	Rp	4.000.000.000,00
– Penyertaan Modal pada PT.Penjamin Kredit Daerah Kalbar		0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	14.000.000.000,00
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	133.921.263.085,36

Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar Cab. Sanggau sebesar Total Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 265/BPKAD/2023 tanggal 27 Juli 2023, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/005673/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/8/2023, tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp.5.000.000.000,00, dan;
2. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 441/BPKAD/2023 tanggal 22 November 2023, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/013079/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/12/2022, tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Pancur Aji Tahun 2023 sebesar Total Rp.4.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sesuai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 335/BPKAD/2023 tanggal 18 September 2023, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/008741/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/10/2023, tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,00, dan;
2. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 442/BPKAD/2023 tanggal 22 November 2023, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/013078/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/12/2022, tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,00.

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Komposisi saham berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Pancur Aji tahun 2023 (Audited) sebagai berikut:

- Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sanggau	Rp	31.878.263.085,36	92,58%
- Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp	2.235.741.615,00	7,42%
Jumlah	Rp	34.114.004.700,36	100,00%

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2023 (Audited), total ekuitas pada PDAM dilaporkan:

a. Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Rp	94.977.054.902,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau	Rp	31.878.263.085,36
c. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp	2.235.741.615,00
d. Modal Hibah	Rp	106.411.626,00
e. Rugi s.d. Tahun lalu	Rp	(36.390.681.819,44)
f. Rugi tahun berjalan	Rp	(4.700.127.418,48)
Total Ekuitas	Rp	88.106.661.990,56

Berdasarkan Laporan Keuangan tersebut, nilai ekuitas Investasi pada PDAM adalah Rp.88.106.661.990,56. Laporan Keuangan PDAM Pancur Aji Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran**

5.3.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2023 31 Desember 2022
2.824.409.975.390,14 2.607.453.077.174,18

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.824.409.975.390,14, mengalami kenaikan sebesar Rp.216.956.898.215,96 atau 8,32% dari saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.607.453.077.174,18. Rincian Aset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Tanah	635.068.037.274,54	618.348.837.859,54
2	Peralatan dan Mesin	781.677.647.179,69	726.773.361.426,37
3	Gedung dan Bangunan	1.499.436.511.391,13	1.309.432.981.978,61
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.091.097.744.533,20	1.896.460.343.185,20
5	Aset Tetap Lainnya	131.988.733.353,17	124.131.476.792,17
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	19.459.778.650,92	38.306.236.857,92
7	Akumulasi Penyusutan	(2.334.318.476.992,51)	(2.106.000.160.925,64)
	Jumlah	2.824.409.975.390,14	2.607.453.077.174,18

Rincian mutasi nilai Aset Tetap Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

31 Desember 2023 31 Desember 2022
635.068.037.274,54 618.348.837.859,54

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.635.068.037.274,54 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.618.348.738.859,54 dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	618.348.837.859,54
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2023	Rp	-
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang	Rp	-

	diatribusikan ke aset yang berkaitan		
-	Reklasifikasi Aset	Rp	-
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00
-	Koreksi/Penyesuaian	Rp	18.041.749.415,00
-	Hibah Masuk	Rp	0,00
-	Penambahan Aset bukan pengadaan	Rp	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	Rp	18.041.749.415,00
	Pengurangan :		
-	Penghapusan Aset	Rp	-
-	Ekstrakomptabel	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	-
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00
-	Hibah Keluar	Rp	1.322.550.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	1.322.550.000,00
	Saldo per 31 Desember 2022	Rp	635.068.037.274,54

Penambahan aset tetap tanah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.16.719.199.415,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Penambahan dari Penyesuaian/koreksi sebesar Rp.18.041.749.415,00 adalah hasil penilaian tanah oleh KPKNL pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan penyesuaian NJOP pada beberapa SKPD.

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	1.073.589.378,00
2	Dinas Kesehatan	728.503.836,00
13	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	1.197.702.000,00
4	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.642.849.000,00
5	Sekretariat Daerah	1.307.068.000,00
7	Kecamatan Jangkang	677.749.710,00
8	Kecamatan Bonti	1.403.084.610,00
9	Kecamatan Beduai	447.996.750,00
10	Kecamatan Sekayam	374.926.980,00
11	Kecamatan Kembayan	1.711.350.800,00
12	Kecamatan Parindu	19.952.999,00
13	Kecamatan Tayan Hulu	6.683.727.800,00
14	Kecamatan Balai	137.709.876,00
15	Kecamatan Toba	9.211.000,00
16	Kecamatan Meliau	171.144.976,00
17	Kecamatan Entikong	455.181.700,00
	TOTAL	18.041.749.415,00

2. Pengurangan dari Hibah Keluar sebesar Rp. 1.322.550.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, sesuai Keputusan

Bupati Sanggau Nomor 225/BPKAD/2023, 29 Mei 2023 dan sesuai Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) Nomor:14/VIII/HM.5.1/2023, tanggal 14 Agustus 2023 kepada Polres Sanggau.

Daftar mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**

5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin **781.677.647.179,69** **726.773.361.426,37**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp.781.677.647.179,69, mengalami peningkatan sebesar Rp.54.904.285.753,32 atau sebesar 7,55% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.726.773.461.426,37. Perubahan nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	726.773.361.426,37
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2023	Rp	55.196.480.481,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	
-	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	59.539.192,00
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	192.783.912,00
-	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	243.020.000,00
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	3.030.254.164,08
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	0,00
-	Hibah Masuk	Rp	3.117.122.468,00
-	Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	1.139.895.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	62.979.095.217,08
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	2.902.237.518,47
-	Ekstrakomptabel	Rp	860.538.668,39
-	Reklasifikasi Aset	Rp	156.688.000,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	3.030.254.164,08
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	-
-	Hibah Keluar	Rp	1.125.091.112,82
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	8.074.809.463,76
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	781.677.647.179,69

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp.62.979.095.217,08, dengan uraian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp.55.196.480.481,00;

2. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.59.539.192,00; dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	2.164.500,00	Timbangan Duduk 50 Kg
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	777.000,00	Timbangan Duduk 10 Kg
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	616.050,00	Timbangan Duduk 20 Kg
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	971.250,00	Timbangan Duduk 5 Kg
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	2.039.492,00	Timbangan Eletronik
6	Kecamatan Meliau	3.304.000,00	Puzzle
7	Kecamatan Meliau	3.800.000,00	Prosotan Anak
8	Kecamatan Balai	2.697.300,00	Kursi Roda
9	Kecamatan Balai	3.552.000,00	Alat Permainan Edukatif
10	Kecamatan Noyan	2.697.300,00	Kursi Roda
11	Kecamatan Noyan	7.104.000,00	Alat Permainan Edukatif (APE)
12	Kecamatan Sekayam	14.208.000,00	Alat Permainan Edukatif (APE)
13	Kecamatan Beduai	12.800.000,00	Alat Permainan Edukatif (APE)
14	Kecamatan Mukok	2.808.300,00	Mesin Potong Rumput
	Total	59.539.192,00	

3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.192.783.912,00 pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal
1	Rambu-rambu petunjuk lokasi fasilitas penyebrangan pejalan kaki	2.371.626,00
2	rambu jalur evakuasi	6.993.000,00
3	rambu petunjuk pemberhentian angkutan umum	2.371.626,00
4	Lampu Peringatan Mengikuti Arah	2.371.626,00
5	Rambu Larangan Berhenti	2.371.626,00
6	Rambu peringatan hati-hati (dengan papan tambahan)	2.371.626,00
7	Lampu Peringatan	4.743.252,00
8	Rambu Petunjuk	4.743.252,00
9	Rambu Titik Kumpul	4.743.252,00
10	Rambu Peringatan Mengikuti Arah, menggunakan jalur pejalan kaki	2.371.626,00
11	Jungkat Jungkit	6.216.000,00
12	Ayunan besi (ayunan anak taman bermain)	5.550.000,00
13	monkey bar	6.660.000,00
14	kuda pegas	8.391.600,00

15	Barrier Gate (Palang Parkir)	19.758.000,00
16	Kursi Taman	89.110.800,00
17	Sound Informasi + Aksesoris	21.645.000,00
	Total	192.783.912,00

4. Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp.243.020.000,00 pada Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal
1	Server	110.900.000,00
2	Peralatan Jaringan - HDD Server	12.720.000,00
3	Peralatan Jaringan - Router	11.235.000,00
4	Peralatan Jaringan - Router Switch 24 Ports	10.280.000,00
5	Mesin Power Supply Server	18.850.000,00
6	Peralatan Jaringan - Power Supply	6.225.000,00
7	Peralatan Jaringan - Cloud	36.150.000,00
8	Peralatan Jaringan - Adaptor	1.080.000,00
9	Peralatan Jaringan - Door Access	3.270.000,00
10	Peralatan Jaringan - LAN	2.560.000,00
11	Peralatan Jaringan - SSD	19.470.000,00
12	Peralatan Jaringan - AP Hotspot	10.280.000,00
	Total	243.020.000,00

5. Mutasi aset antar SKPD berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 268/BPKAD/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp3.030.254.164,08 yang terdiri dari:

No.	Jenis Aset	Dari SKPD	Ke SKPD	Nilai (Rp)
1	Sepeda Motor	Sekretariat DPRD	Disporapar Kab. Sanggau	24,791,856.90
2	Sepeda Motor	Sekretariat DPRD	Kec. Balai	26,000,000.00
3	Laptop Core AMD Ryzen 5	Sekretariat DPRD	Kec. Balai	16,860,900.00
4	PC Unit	Sekretariat DPRD	Disporapar Kab. Sanggau	8,135,074.40
5	Printer	Sekretariat DPRD	Disporapar Kab. Sanggau	1,746,329.30
6	Alat Penghancur Kertas	Sekretariat DPRD	Disporapar Kab. Sanggau	3,549,225.00
7	Laptop Core i7	Sekretariat DPRD	Disporapar Kab. Sanggau	27,744,450.00
8	Sepeda Motor	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Kab. Sanggau	38,304,895.00
9	Sepeda Motor	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah	25,341,261.64
10	Sepeda Motor	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPEMDES Kab. Sanggau	24,791,856.90
11	Sepeda Motor	Dinas Lingkungan Hidup	DKPTPH Kab. Sanggau	32,090,774.50

12	Sepeda Motor	Dinas Lingkungan Hidup	DKPTPH Kab. Sanggau	30,311,973.00
13	Laptop	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPEMDES Kab. Sanggau	17,868,795.95
14	Yamaha Vixion	BPKAD Kab.Sanggau	BAPENDA Kab. Sanggau	27,109,946.59
15	Sepeda Motor	Nakertrans	BPBD Kab.Sanggau	24,036,054.00
16	Sepeda Motor	KEC. KAPUAS	DLH Kab. Sanggau	14,500,000.00
17	Sepeda Motor	KEC. KAPUAS	DLH Kab. Sanggau	23,997,266.72
18	Laptop	Kecamatan Balai	Kecamatan Tayan Hilir	9,797,700.00
19	Mobil Ambulance	DINKES	BAPPEDA Kab. Sanggau	295,000,000.00
20	Beat New	BAPENDA	DINSOSP3AKB Kab. Sanggau	17,024,434.78
21	Sepeda Motor	BAPENDA	Kecamatan Mukok	15,509,742.56
22	Kendaraan Bermotor Roda 4	DISPERINDAGKOP &UM	BPKAD Kab. Sanggau	189,995,866.27
23	Yamaha Jupiter Z1	DISPERINDAGKOP &UM	BPKAD Kab. Sanggau	16,167,560.60
24	Operasional R-4 DBD (ISUZU DMAX)	DINSOSP3AKB	RSUD M .Th. Djaman	324,350,000.00
25	Sepeda Motor	Kecamatan Jangkang	Sekretariat Daerah	21,860,000.00
26	Kipas Angin	Kecamatan Jangkang	Sekretariat Daerah	1,600,000.00
27	Laptop	Kecamatan Jangkang	Sekretariat Daerah	13,420,000.00
28	Sepeda Motor	Sekretariat Daerah	DUKCAPIL Kab. Sanggau	18,942,000.00
29	Sepeda Motor	Sekretariat Daerah	DINSOSP3AKB Kab. Sanggau	33,000,000.00
30	Sepeda Motor	Sekretariat Daerah	BAPPEDA Kab. Sanggau	17,227,909.24
31	Sepeda Motor	Sekretariat Daerah	Kecamatan Bonti	26,466,677.49
32	Sepeda Motor	Sekretariat Daerah	BPBD Kab. Sanggau	34,597,459.00
33	Sepeda Motor	Sekretariat Daerah	Kecamatan Bonti	28,900,000.00
34	Sepeda Motor	Sekretariat Daerah	BKPSDM Kab.Sanggau	33,500,000.00
35	Laptop	Sekretariat Daerah	DUKCAPIL Kab. Sanggau	15,000,000.00
37	Laptop	BAPPEDA	Kecamatan Toba	16,900,000.00
38	Laptop	BAPPEDA	Inspektorat Kab.Sanggau	18,920,000.00
39	Tablet PC	BAPPEDA	BAPENDA Kab. Sanggau	18,755,670.00
40	Mobil Truck Kayu	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan Sekayam	294,000,000.00
41	Sepeda Motor	DKPTPHP Kab. Sanggau	Set.DPRD Kab.Sanggau	26,000,000.00
42	Laptop	DKPTPHP Kab. Sanggau	Set.DPRD Kab.Sanggau	16,000,000.00
43	Sepeda Motor	DKPTPHP Kab. Sanggau	Sat. Pol PP Kab.Sanggau	29,153,652.86

44	Sepeda Motor	DKPTPHP Kab. Sanggau	Kec. Kapuas	17,814,652.36
45	Laptop	DKPTPHP Kab. Sanggau	Kec. Parindu	15,000,000.00
46	Laptop	DKPTPHP Kab. Sanggau	Disbunak Kab.Sanggau	14,500,000.00
47	Kendaraan Roda Tiga	DKPTPHP Kab. Sanggau	Disbunak Kab.Sanggau	39,957,326.00
48	Sepeda Motor	DKPTPHP Kab. Sanggau	DLH Kab.Sanggau	18,715,605.52
49	Alat Perekam Sidik Jari	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Bonti	30,643,000.00
50	Alat Pemindai Tanda Tangan/Signaature Pa	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Bonti	11,895,000.00
51	Kamera	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Bonti	9,385,000.00
52	Trypod	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Bonti	995,000.00
53	Alat Pemindai Iris Mata	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Bonti	19,239,950.00
54	Komputer	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Bonti	20,050,000.00
55	Alat Perekam Sidik Jari	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Beduai	30,643,000.00
56	Alat Pemindai Tanda Tangan/Signaature Pa	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Beduai	11,895,000.00
57	Kamera	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Beduai	9,385,000.00
58	Trypod	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Beduai	995,000.00
59	Alat Pemindai Iris Mata	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Beduai	19,239,950.00
60	Komputer	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Beduai	20,050,000.00
61	Finger Print M-Scan	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kapuas	28,680,000.00
62	Signaature Pad-Topaz	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kapuas	11,850,000.00
63	Kamera Canon EOS1500D	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kapuas	9,890,000.00
64	Trypod	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kapuas	998,000.00
65	Iris Scanner M-Eye	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kapuas	19,950,000.00
66	Komputer Acer	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kapuas	15,260,000.00
67	Finger Print M-Scan	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Tayan Hulu	28,680,000.00
68	Signaature Pad-Topaz	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Tayan Hulu	11,850,000.00
69	Kamera Canon EOS1500D	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Tayan Hulu	9,890,000.00
70	Trypod	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Tayan Hulu	998,000.00
71	Iris Scanner M-Eye	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Tayan Hulu	19,950,000.00
72	Komputer Acer	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Tayan Hulu	15,260,000.00
73	Finger Print M-Scan	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Mukok	28,680,000.00
74	Signaature Pad-Topaz	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Mukok	11,850,000.00
75	Kamera Canon EOS1500D	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Mukok	9,890,000.00
76	Trypod	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Mukok	998,000.00
77	Iris Scanner M-Eye	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Mukok	19,950,000.00
78	Komputer Acer	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Mukok	15,260,000.00
79	Alat Perekam Sidik Jari	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Toba	30,643,000.00
80	Alat Pemindai Tanda Tangan/Signaature Pa	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Toba	11,895,000.00
81	Kamera	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Toba	9,385,000.00
82	Trypod	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Toba	995,000.00
83	Alat Pemindai Iris Mata	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Toba	19,239,950.00
84	Komputer	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Toba	20,050,000.00
85	Alat Perekam Sidik Jari	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Noyan	30,643,000.00
86	Alat Pemindai Tanda Tangan/Signaature Pa	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Noyan	11,895,000.00
87	Kamera	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Noyan	9,385,000.00
88	Trypod	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Noyan	995,000.00

89	Alat Pemindai Iris Mata	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Noyan	19,239,950.00
90	Komputer	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Noyan	20,050,000.00
91	Alat Perekam Sidik Jari	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Balai	30,643,000.00
92	Alat Pemindai Tanda Tangan/Signaature Pa	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Balai	11,895,000.00
93	Kamera	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Balai	9,385,000.00
94	Trypod	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Balai	995,000.00
95	Alat Pemindai Iris Mata	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Balai	19,239,950.00
96	Komputer	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Balai	20,050,000.00
97	Finger Print M-Scan	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kembayan	28,680,000.00
98	Signaature Pad-Topaz	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kembayan	11,850,000.00
99	Kamera Canon EOS1500D	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kembayan	9,890,000.00
100	Trypod	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kembayan	998,000.00
101	Iris Scanner M-Eye	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kembayan	19,950,000.00
102	Komputer Acer	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Kembayan	15,260,000.00
103	Finger Print M-Scan	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Parindu	28,680,000.00
104	Signaature Pad-Topaz	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Parindu	11,850,000.00
105	Kamera Canon EOS1500D	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Parindu	9,890,000.00
106	Trypod	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Parindu	998,000.00
107	Iris Scanner M-Eye	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Parindu	19,950,000.00
108	Komputer Acer	DISDUKCAPIL Kab.Sanggau	Kec. Parindu	15,260,000.00
110	Sepeda Motor	KEC. KAPUAS	Sat. Pol PP	18,700,073.23
111	Sepeda Motor	BPKAD Kab.Sanggau	SETDA	15,509,742.56
112	Laptop	BPKAD Kab.Sanggau	SETDA	20,000,000.00
113	Sepeda Motor	Kec. Mukok	DKPTPHP	24,957,681.71
114	Sepeda Motor	Kec. Noyan	Kec. Tayan Hulu	34,200,000.00
115	Lap Top	Kec. Noyan	Kec. Tayan Hulu	17,450,000.00
JUMLAH				3,030,254,164.08

6. Hibah masuk sebesar Rp.3.117.122.468,00 merupakan penerimaan hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat pada Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	SKPD	Nilai Perolehan (Rp)
1	Dump Truck Serbaguna	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	410,000,000.00
2	Mesin Perahu Karet Kap. 18 PK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25,465,000.00
3	Perahu Lipat 3,27 M	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,115,000.00
4	Tenda Posko	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74,272,000.00
5	Tenda Pengungsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64,372,000.00
6	Tenda Keluarga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81,950,000.00
7	Peralatan Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.332.178.468,0
8	Laptop	Dinas Kesehatan	46.770.000,00
JUMLAH			3.117.122.468,00

Pencatatan hibah masuk pada Dinas Kesehatan dicatat berdasarkan BAST antara Dinas Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. Atas hibah tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum terdapat dokumen NPHD nya.

7. Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.139.895.000,00 merupakan pengadaan Mesin Fogging-SN 50 Waterbased pada Dinas Kesehatan.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 sebesar Rp.8.074.809.463,76 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghapusan aset sebesar Rp.2.902.237.518,47 yang berasal dari SKPD:

No.	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
1	Filling Besi/Metal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,520,000
2	Filling Besi/Metal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	760,000
3	Filling Besi/Metal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	760,000
4	Filling Besi/Metal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	760,000
5	Filling Besi/Metal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	760,000
6	Brankas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	5,500,000
7	Overhead Projekstur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,750,000
8	Televisi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	500,000
9	Epson Printer LQ 2180	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	7,500,000
10	Rak Arsip	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	4,500,000
11	Kursi Putar Sandar Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,650,000
12	Kursi Putar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	3,150,000
13	Kursi Putar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	530,000
14	Filling Besi/Metal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	4,400,000
15	Lemari Arsip Kaca	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	749,100
16	Monitor Komputer	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,500,000
17	Filling Besi/Metal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	4,950,000
18	Kursi Kerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,000,000
19	Almari Arsip	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	10,000,000

20	Almari Arsip	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	2,700,000
21	Almari Perpustakaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	2,000,000
22	Handy Camp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	12,500,000
23	Scanner	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	3,000,000
24	Printer Laser	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	4,000,000
25	Printer Ink-Z	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	2,520,000
26	Printer Stylus Photo	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	4,680,000
27	Scanner/Microtek Scan Maker	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	3,269,200
28	UPS 120VA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	2,000,000
29	Monitor LCD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	2,500,000
30	Note Book	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	45,000,000
31	Printer Canon	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	2,000,000
32	Meja Kerja 1/2 Biro	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	7,260,000
33	Meja Komputer	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	516,000
34	Printer Dot Matrik LQ-2180	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	7,247,000
35	Stabilizer	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,505,491
36	Scanner (Universal Tester)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,505,491
37	Scanner (Universal Tester)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	3,010,982
38	Audio Mixing Console	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	14,803,996
39	Printer	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	3,010,982
40	Printer	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	6,021,965
41	Printer	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,505,491
42	Printer	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	8,531,117
43	Lain-lain	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	9,793,642
44	Gorden	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	26,660,805
45	Stabilisator	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	3,013,428
46	Audio Mixing Console	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	7,533,570
47	Printer	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,808,057

48	Printer	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,506,714
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,506,714
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	14,062,666
51	UPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	5,740,000
52	UPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	3,000,000
53	Laptop	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	36,000,000
54	Note Book	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	13,500,000
55	UPS ICA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	1,470,000
56	AC Split	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	17,400,000
57	Note Book	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	14,500,000
58	Printer Inkjet	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau	13,200,000
59	Televisi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,000,000
60	Mesin Pompa Air	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,400,000
61	Global Positioning System	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,500,000
62	Filing Cabinet Besi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,000,000
63	A.C. Split	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16,000,000
64	Televisi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,500,000
65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,200,000
66	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,000,000
67	Facsimile	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,000,000
68	Unit Tranceiver Ssb Portable	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,500,000
69	Unit Tranceiver Ssb Portable	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,000,000
70	Unit Tranceiver Ssb Portable	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,000,000
71	Antene MF/MW Portable	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,000,000
72	Antene MF/MW Stationary	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,000,000
73	Cable Antena	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,000,000
74	Internet	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	960,000
75	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,000,000
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,600,000
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,600,000
78	G P S	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,500,000
79	Meja Kerja Besi/Metal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,500,000
80	Kursi Sofa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,500,000
81	Kursi Putar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,000,000

82	Pendingin Ruangan(AC)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,500,000
83	Mesin Rumput	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,500,000
84	Kamera Digital	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,000,000
85	Radio HF	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15,000,000
86	Coaxial Kabel	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	600,000
87	Handycame	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,000,000
88	Jaringan Komputer	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11,150,000
89	Komputer PC	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,000,000
90	Laptop	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,500,000
91	Laptop	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15,000,000
92	Laptop	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12,000,000
93	Laptop	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,000,000
94	Printer Injet	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,800,000
95	Printer Cannon	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,800,000
96	Printer Dot Matrik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,000,000
97	Sonsistem/Megaphone/Pengeras Suara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,000,000
98	G P S	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26,100,000
99	Meja Kerja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,000,000
100	Meja Kerja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,000,000
101	Meja Kerja Staf	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,000,000
102	Kursi Kerja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,000,000
103	Kursi Kerja Putar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,000,000
104	Wireles Audio	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,400,000
105	Tiang Antena Portable	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,500,000
106	Komputer Mainfram/Server	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34,706,772
107	Antena Mobile VHF	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	900,000
108	Komputer PC	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,450,000
109	P.C Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15,000,000
110	Komputer	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,500,000
111	Note Book	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,500,000
112	Laptop	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14,950,000
113	Note Book	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12,000,000
114	Laptop	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,500,000
115	Lain-lain	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12,500,000
116	Printer	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,500,000
117	Printer Dot Matrik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12,500,000
118	Mesin Absensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62,675,000
119	Meja Rapat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,975,000
120	Meja Kerja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,180,000
121	Laptop	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49,849,102
122	Note Book/Laptop	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,000,000
123	Printer Laser	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,000,000
124	Printer	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,000,000
125	alat pembersih/mesin potong rumput	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,600,000
126	Pendingin Ruangan (AC)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,500,000
127	Televisi Flat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,000,000
128	Digital Parabola	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,750,000
129	Laptop	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15,000,000

130	Laptop	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22,500,000
131	Printer Epson,L220	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,400,000
132	Kipas Angin Gantung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,500,000
133	Lemari	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14,536,250.00
134	Almari/Rak Arsip Besi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11,986,250.00
135	AC Unit	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	19,476,590.95
136	Unit Power Supply	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,800,000.00
137	Unit Power Supply	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12,600,000.00
138	Stabilizer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,752,893.19
139	Harddisk Eksternal	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,328,131.32
140	PC Unit	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14,541,000.00
141	PC Unit	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	36,300,000.00
142	Printer LQ 2190	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7,356,000.00
143	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7,952,941.31
144	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	71,634,901.53
145	HUB (50 Port)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11,361,344.72
146	Rak Kayu	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SIPIL	1,765,197.84
147	Rak Kayu	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7,052,700.87
148	AC	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	34,440,000.00
149	Televisi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,750,000.00
150	Resever	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,200,000.00
151	Komputer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7,500,000.00
152	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81,325,000.00
153	Laptop	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,000,000.00
154	Battery Laptop	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	68,000,000.00
155	Printer MP 287	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,000,000.00
156	Kursi Putar	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	20,250,000.00
157	Kamera Digital	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,056,883.00
158	Keyboard	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,215,147.60
159	Keyboard	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,215,147.60
160	Keyboard	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,215,147.60
161	Keyboard	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,215,147.60
162	Keyboard	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,215,147.60
163	RAM	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,151.75
164	RAM	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,151.75
165	RAM	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,151.75
166	RAM	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,151.75
167	Kamera	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,314,279.33
168	Kamera	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,314,279.33
169	Kamera	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,314,279.33
170	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,435,773.00
171	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,397.70
172	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,397.70
173	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,397.70
174	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,397.70
175	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,397.70
176	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,397.70
177	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,397.70
178	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,397.70
179	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,397.70

180	UPS	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,375,397.70
181	Komputer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7,651,131.67
182	Komputer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7,651,131.67
183	Komputer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7,651,131.67
184	NoteBook/Laptop	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,926,320.00
185	Laptop	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5,498,613.00
186	NoteBook/Laptop	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	54,870,399.00
187	NoteBook/Laptop	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,201,509.00
188	NoteBook/Laptop	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,201,509.00
189	NoteBook/Laptop	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,149,000.00
190	NoteBook/Laptop	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,750,000.00
191	Harddisk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,437,510.75
192	Harddisk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,437,510.75
193	Harddisk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,437,510.75
194	Harddisk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,437,510.75
195	Stabilizer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,876,931.00
196	Printer Ink Jet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,020,151.00
197	Printer Ink Jet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,020,151.00
198	Printer Ink Jet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,020,151.00
199	Printer Ink Jet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,020,151.00
200	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,489,000.00
201	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
202	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
203	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
204	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
205	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
206	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
207	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
208	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
209	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
210	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
211	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
212	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
213	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,229,520.46
214	Hub	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9,834,094.00
215	External Hard Disk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,123,243.33
216	External Hard Disk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,123,243.33
217	External Hard Disk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,123,243.33
218	Filling Kabinet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,201,783.20
219	Kamera	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7,679,500.00
220	Kamera Digital	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,754,000.00
221	UPS/Stabilizer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5,051,633.00
222	UPS/Stabilizer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,691,300.00
223	Scanner	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,161,775.00
224	Printer	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,799,501.00
225	Harddisk Eksternal	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,049,280.00
226	Kamera	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13,860,000.00
227	Racun Api	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6,693,300.00
228	Harddisk Eksternal	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,564,500.00
229	Harddisk Eksternal	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,450,000.00

230	Kursi Pelayanan (Kursi Tunggu)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9,558,000.00
231	Biaya Instalasi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	675,000.00
232	Harddisk Eksternal	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7,800,000.00
233	Meja 1/2 Biro	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	1,000,000
234	Meja Komputer	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	800,000
235	Lemari Es	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	1,100,000
236	Mesin Ketik	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	2,900,000
237	Kursi Komputer	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	545,000
238	Televisi	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	1,350,000
239	Digital Receiver	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	600,000
240	PC.Unit	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	14,000,000
241	Gerobak Dorong	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	2,000,000
242	Mesin potong rumput	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	4,000,000
243	Camera Film	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	2,557,000
244	PC.Unit	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	9,120,000
245	PC.Unit	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	6,503,334
246	Printer	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	1,800,000
247	Printer	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	4,750,000
248	Kursi tamu	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	4,980,000
249	Camera Film	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	3,800,000
250	Camera Digital	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	3,800,000
251	Lap Top	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	12,500,000
252	Lap Top	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	12,500,000
253	Meja Direksi I (Kabid)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	2,430,000
254	Almari	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	2,900,000
255	Filling Cabinet	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	2,722,000
256	Mesin potong rumput	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	3,750,000
257	UPS	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	3,299,334
258	Micropon Profesional Wireless Sony	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	913,443
259	D80 Nikon D	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	10,000,000
260	Nikon D7000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	16,850,000
261	Mesin Chainsaw	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	5,000,000
262	Gorden	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	20,000,000
263	Kursi Lipat	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	5,000,000
264	Parabola dan Digital/Receiver	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	1,500,000
265	Peper Shredder/Penghancur	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	3,000,000
266	Sholarsell	Kecamatan Tayan Hilir	1,000,000
267	Filling Besi/Metal	Kecamatan Tayan Hilir	760,000
268	Filling Besi/Metal	Kecamatan Tayan Hilir	890,000
269	Kursi Besi/Metal	Kecamatan Tayan Hilir	7,480,000
270	Meja Rapat	Kecamatan Tayan Hilir	1,918,400
271	Power Supply	Kecamatan Tayan Hilir	1,980,000
272	Filling Besi/Metal	Kecamatan Tayan Hilir	1,631,850
273	Kursi Tamu	Kecamatan Tayan Hilir	6,055,018
274	Meja Kerja	Kecamatan Tayan Hilir	891,000
275	PC Unit	Kecamatan Tayan Hilir	7,500,000
276	Printer	Kecamatan Tayan Hilir	7,500,000
277	Generator set	Kecamatan Tayan Hilir	11,048,400
278	Filling Besi/Metal	Kecamatan Tayan Hilir	7,590,000
279	Meja Kerja	Kecamatan Tayan Hilir	3,960,000
280	Kursi Putar	Kecamatan Tayan Hilir	3,696,000

281	PC Unit	Kecamatan Tayan Hilir	9,790,000
282	Meja Kerja	Kecamatan Tayan Hilir	3,201,447
283	Meja Kerja	Kecamatan Tayan Hilir	1,397,867
284	Kursi Kerja	Kecamatan Tayan Hilir	2,472,081
285	Handy Cam	Kecamatan Tayan Hilir	9,062,690
286	Camera digital	Kecamatan Tayan Hilir	6,618,819
287	PC Unit	Kecamatan Tayan Hilir	13,690,772
288	Laptop	Kecamatan Tayan Hilir	7,866,212
289	Meja Kerja	Kecamatan Tayan Hilir	4,141,577
290	PC Unit	Kecamatan Tayan Hilir	13,222,857
291	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Kecamatan Tayan Hilir	1,627,429
292	Stabilizer/UPS	Kecamatan Tayan Hilir	750,000
293	PC Unit	Kecamatan Tayan Hilir	6,800,000
294	Printer	Kecamatan Tayan Hilir	4,000,000
295	Meja Kerja	Kecamatan Tayan Hilir	2,500,000
296	PC Unit	Kecamatan Tayan Hilir	15,000,000
297	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Kecamatan Tayan Hilir	2,000,000
298	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Kecamatan Tayan Hilir	950,000
299	Printer Scanner	Kecamatan Tayan Hilir	6,500,000
300	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Kecamatan Tayan Hilir	950,000
301	Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H(4x4) 8A/T	Sekretariat Daerah	676,657,200.00
JUMLAH			2.902.237.518,47

2. Reklasifikasi atas asset Extracomptable (dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp.860.038.668,39 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	OPD	Nilai Perolehan
1	Kursi Fiber Glas/Plastik	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	7,450,000.00
2	Gordyin/Kray - Gorden Tipis	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	720,000.00
3	Exhause Fan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,825,000.00
4	Stand Mic	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	490,000.00
5	Timbangan Duduk 10 Kg	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	777,000.00
6	Timbangan Duduk 20 Kg	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	616,050.00
7	Timbangan Duduk 5 Kg	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	971,250.00
8	Bantal	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	
9	Kursi Fiber Glas/Plastik - NAPOLLY / BIG 2	Satuan Polisi Pamong Praja	11,961,000.00
10	Selang Oksigen Bayi / Nasal Canula Bayi	Satuan Polisi Pamong Praja	559,000.00
11	Selang Oksigen Dewasa / Nasal Canula Dewasa	Satuan Polisi Pamong Praja	165,600.00
12	Alat Laboratorium (Test Urine)	Satuan Polisi Pamong Praja	21,646,000.00
13	Grab Stick Snake Tongs	Satuan Polisi Pamong Praja	1,830,500.00
14	KABEL AUDIO ELEKTRONIK	Satuan Polisi Pamong Praja	33,300.00

15	Sarung Tangan Steril No. 7,5	Satuan Polisi Pamong Praja	88,000.00
16	Senter Kepala (Jumbo)	Satuan Polisi Pamong Praja	8,267,500.00
17	SELIMUT API	Satuan Polisi Pamong Praja	1,660,000.00
18	Kursi Susun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	20,812,500.00
19	Rompi Safety	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,349,760.00
20	Sarung tangan safety	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,303,360.00
21	Senter Kepala (Jumbo)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,646,240.00
22	Kursi Pertemuan (Susun)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	36,624,000.00
23	Pot Bunga Semen	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	3,840,000.00
24	Pipa Galvanis Bracket CCTV	Dinas Komunikasi Dan Informatika	580,000.00
25	Alat Tennis Meja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,160,000.00
26	Kursi Rapat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	12,300,000.00
27	Meja 1/2 Biro	RSUD	235,000.00
28	KURSI PLASTIK NAPOLLY	RSUD	1,450,000.00
29	Kursi Biasa	RSUD	1,554,000.00
30	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	RSUD	1,312,800.00
31	Piring Makan Keramik Berlogo	Sekretariat Daerah	7,500,000.00
32	Bed Cover	Sekretariat Daerah	998,000.00
33	Bantal Tidur	Sekretariat Daerah	716,000.00
34	Bantal Guling	Sekretariat Daerah	836,000.00
35	Peralatan Jaringan - Adaptor	Sekretariat Daerah	1,080,000.00
36	Prasmanan Stanless Steel	Sekretariat Dprd	2,796,600.00
37	Tempat Sampah	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	2,232,000.00
38	Gunting Bedah Jaringan Lurus Ujung Tajam	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	2,173,935.00
39	Gunting Sudut Tumpul Uk. 14	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	637,694.00
40	Gunting Sudut Tumpul Uk. 18	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	1,449,105.00
41	HOOK SPY	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	2,069,595.00
42	SCALPEL HANDLE NO. 4	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	448,551.00
43	SCALPEL NO. 3	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	298,701.00
44	PINSET CHIRURGIS	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	1,219,335.00
45	PINSET ANATOMIS	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	1,463,885.00
46	NEEDLE HOLDER	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	1,830,945.00
47	KLEM ARTERI UK. 14 CM	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	2,696,301.00
48	KLEM ARTERI BENGKOK	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	2,867,953.00
49	Mesin pompa air	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	410,000.00
50	Gas Regulator	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	145,000.00
51	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	105,000.00
52	Kipas Dinding	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	365,000.00
53	SARUNG BANTAL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100,000.00
54	BANTAL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100,000.00
55	Lemari Besi/Metal	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	212,000.00
56	Rak Penyimpanan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
57	Rak Penyimpanan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00

58	Rak Kayu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	45,000.00
59	Rak-rak Penyimpanan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,750,000.00
60	Lemari Kayu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,400,000.00
61	CCTV	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	210,000.00
62	Papan Visual/Papan Nama	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	499,000.00
63	Rambu Papan Tambahan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	800,000.00
64	Papan Tulis Berkotak	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,520,000.00
65	PAPAN TULIS	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,700,000.00
66	Papan Tulis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	700,000.00
67	White Board	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,800,000.00
68	Papan Tulis (WB) Standar 120 x 200 cm	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,664,000.00
69	Papan Tulis (WB) Standar 120 x 200 cm	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,664,000.00
70	Whiteboard	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,995,000.00
71	Papan Tulis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,050,000.00
72	Papan Tulis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,050,000.00
73	LCD Projector/Infocus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	588,000.00
74	LCD Projector/Infocus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,209,000.00
75	Papan Tulis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,200,000.00
76	Papan Absen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
77	Pianika (TK/SD/SMP/SMK/K)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,000,000.00
78	Pianika (TK/SD/SMP/SMA.K)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	600,000.00
79	Rambu Jalan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,850,000.00
80	GELAS MINUM	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	250,000.00
81	Cone Kerucut Futsal berlubang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150,000.00
82	Mesin Gerinda	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
83	Bor Tangan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
84	Timbangan Badan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	250,000.00
85	Gelas Minum	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	300,000.00
86	Timbangan Badan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	200,000.00
87	MICROPHONE FLOOR STAND	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	490,000.00
88	BREKET DAN PERLENGKAPANNYA	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	350,000.00
89	Jam Mekanis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	450,000.00
90	Kursi Guru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,997,000.00
91	Kipas Angin Gantung	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,700,000.00
92	Gas Regulator	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150,000.00
93	Mouse Wireless LOGITECH M 331	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	720,000.00
94	Mos	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	20,000.00
95	MATEMATIKA 1 SD KUR.MERDEKA	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,030,000.00
96	Jam Mekanis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	390,000.00
97	Meja kursi siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8,250,000.00
98	Jam Dinding	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	120,000.00
99	Kursi Plastik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,000,000.00
100	Jam Ukur	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	441,000.00
101	Peta Wilayah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	250,000.00
102	Peta Wilayah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	250,000.00

103	Bendera dan Gabus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	450,000.00
104	Bendera Merah Putih	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	900,000.00
105	Papan Tulis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,100,000.00
106	Bantak	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100,000.00
107	Model Jam Bentuk Dasar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	480,000.00
108	Kompore Gas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	350,000.00
109	Dispencer	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	190,850.00
110	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,954,000.00
111	Basic English 1 SD Kur. Merdeka	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	930,000.00
112	KURSI SISWA 1 MEJA 1 KURSI	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,880,000.00
113	Kursi Putar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,940,000.00
114	Kursi Putar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,940,000.00
115	Kamus Populer Bahasa Indonesia	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	55,500.00
116	Wajan Teflon	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100,000.00
117	KIPAS ANGIN COSMOS	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	375,000.00
118	KURSI PLASTIK NAPOLY	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,800,000.00
119	Microphone/Wireless Mic	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	918,000.00
120	Microphone Floor Stand	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	222,400.00
121	Kotak Obat/Kotak Surat/Kotak Saran	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	416,250.00
122	KURSI PLASTIK NAPOLY	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5,994,000.00
123	Tong Sampah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	56,000.00
124	Model Jam Bentuk Dasar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,080,000.00
125	Microphone Floor Stand	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	290,000.00
126	Microphone/Wireless Mic	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	500,000.00
127	Lup/Kaca Pembesar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	186,000.00
128	Rol Meter	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
129	Kursi Siswa 1 Meja 1 Kursi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,000,000.00
130	Pianika (TK/SD/SMP/SMK/K)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,000,000.00
131	Microphone/Wireless Mic	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	450,000.00
132	Tabung Gas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	170,000.00
133	Kursi Rapat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,375,000.00
134	Microphone/Wireless Mic	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	470,000.00
135	Kursi Besi / Metal	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,330,000.00
136	KURSI PLASTIK NAPOLY	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,000,000.00
137	Kursi Biasa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,800,000.00
138	Kursi Biasa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	600,000.00
139	Wajah Teflon	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	220,000.00
140	Ketel Pemasakan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	200,000.00
141	Jam Mekanis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150,000.00
142	Jam Mekanis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	450,000.00
143	Jam Mekanis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150,000.00
144	trypot	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
145	Rice Cooker	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	375,000.00
146	PIANIKA	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,900,000.00
147	Meja Kayu/Rotan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5,000,000.00
148	Meja Kayu/Rotan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6,750,000.00
149	Meja Kayu/Rotan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	11,988,000.00

150	Meja Tik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,800,000.00
151	Kursi Siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	53,280,000.00
152	KURSI PLASTIK NAPOLY	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	15,009,600.00
153	Kursi Guru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,440,000.00
154	Kursi Guru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,800,000.00
155	KURSI PLASTIK NAPOLY	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,500,000.00
156	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	475,000.00
157	Kursi Siswa 1 Meja 1 Kursi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	12,000,000.00
158	Kursi guru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,000,000.00
159	Kursi Siswa 1 Meja 1 Kursi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8,287,200.00
160	KURSI PLASTIK NAPOLY	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,500,000.00
161	Kursi Guru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,090,000.00
162	Kursi Besi / Metal	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,970,000.00
163	kursi kayu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,000,000.00
164	Kursi Biasa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,450,000.00
165	Kursi Kayu Guru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	840,000.00
166	Kursi Guru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,361,500.00
167	Kursi Guru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	176,000.00
168	Kursi Guru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,950,000.00
169	KURSI SUSUN POLARIS	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,997,000.00
170	MEJA SISWA	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13,000,000.00
171	KASUR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
172	kursi biasa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	300,000.00
173	KURSI PLASTIK NAPOLY	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,800,000.00
174	KURSI TAMU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,750,000.00
175	Kursi Biasa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,330,000.00
176	Rak Sepatu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	800,000.00
177	Meja Kayu/Rotan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,497,500.00
178	Meja-Kursi Siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	12,654,000.00
179	Meja Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,705,000.00
180	KURSI PLASTIK NAPOLY	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,680,000.00
181	KURSI BESI/METAL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,250,000.00
182	KURSI BESI/METAL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,250,000.00
183	MEJA TULIS siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	7,777,600.00
184	kursi Plastik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,950,000.00
185	RAK KAYU	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	900,000.00
186	Kursi Plastik Napolly	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,000,000.00
187	Dispencer	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	450,000.00
188	Kursi Plastik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,900,000.00
189	Meja siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,150,000.00
190	kursi Plastik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,050,000.00
191	Jam Mekanis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	390,000.00
192	Kursi Siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,000,000.00
193	Kursi kayu/Rotan/Bambu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	832,500.00
194	Kursi Plastik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,000,000.00
195	Meja dan Kursi Siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5,400,000.00
196	kursi siswa kayu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,500,000.00
197	Meja siswa kayu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,000,000.00
198	Kursi Rapat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,998,000.00

199	Kursi Rapat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,998,000.00
200	Buku siswa kelas III	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	212,800.00
201	Kursi Siswa 1 Meja 1 Kursi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5,994,000.00
202	Kursi Siswa 1 Meja 1 Kursi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	10,500,000.00
203	Meja kayu untuk siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6,300,000.00
204	Meja Kursi Siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,000,000.00
205	Meja Kursi Siswa MDF	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	19,440,000.00
206	KURSI PLASTIK NAPOLY	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6,300,000.00
207	Kursi Susun Ftr 405 / 408 / 409	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,995,000.00
208	Kursi Siswa 1 Meja 1 Kursi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6,750,000.00
209	Meja Sekoiah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13,020,000.00
210	Kursi Plastik Napoly	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	780,000.00
211	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	810,000.00
212	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,000,000.00
213	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,000,000.00
214	KIPAS ANGIN COSMOS	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	720,000.00
215	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,200,000.00
216	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,000,000.00
217	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	250,000.00
218	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	700,000.00
219	KIPAS ANGIN MIYAKO	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,120,000.00
220	KIPAS ANGIN	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	205,000.00
221	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	480,000.00
222	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
223	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	350,000.00
224	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,750,000.00
225	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,600,000.00
226	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	390,000.00
227	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	540,000.00
228	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,700,000.00
229	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	625,000.00
230	Kipas Angin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	625,000.00
231	Kompore Gas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	250,000.00
232	Kompore Gas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	475,000.00
233	Microphone	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150,000.00
234	Loudspeker	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	450,000.00
235	Mocrophon Floor Stand	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	300,000.00
236	Pianika	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,110,000.00
237	Pianika	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,665,000.00
238	Matematika SD/MI Kls.4/Km Kurikulum Merdeka / Erl	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,144,000.00
239	Detik-Detik ANBK: AKM Literasi, AKM Numerasi, Survei Karakter, Survei Lingkungan Belajar untuk SD/MI	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	550,000.00
240	Prima Penilaian Harian 5a/K13n	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	705,000.00
241	microphone	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	250,000.00
242	Microphone	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150,000.00

243	PETA	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	350,000.00
244	Meja Siswa Kayu Solid	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	43,398,400.00
245	Meja Sekoiah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	31,360,000.00
246	Meja Sekoiah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,500,000.00
247	Meja Sekoiah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,000,000.00
248	Meja Rapat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	900,000.00
249	Kursi Meja Siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	9,000,000.00
250	Meja SekoLah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	15,000,000.00
251	Meja murid	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,500,000.00
252	MEJA SEKOLAH	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3,150,000.00
253	Meja Kerja	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,000,000.00
254	Meja Kerja	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,000,000.00
255	Pend. Jasmani Orkes SD/MI Kls.1/Km Kurikulum Merdeka / Erl	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,512,000.00
256	Buku Kurikulum Merdeka Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia: Bergerak Bersama untuk SD Kelas V	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37,200.00
257	Meja Kayu/Rotan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5,940,000.00
258	Meja Guru Deaka	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	228,000.00
259	Meja Guru Deaka	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	108,000.00
260	Meja Kursi Murid	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,500,000.00
261	CONNECTOR VHD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	190,000.00
262	Jangka	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150,000.00
263	Penggaris Siku-siku	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	255,000.00
264	Busur Derajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150,000.00
265	Penggaris Plastik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100,000.00
266	Penggaris Plastik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	10,000.00
267	CConnector Cyrek/ PC.PT. Ha;llo Teknologi Imndonesia	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,000,000.00
268	Meja tulis siswa set	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5,827,500.00
269	Pend Agama Islam &Budi Pekerti Sd Kls 4/Km-Penilaian	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	186,000.00
270	Esps Ipas Sd/Mi Kls.1/Km Kurikulum Merdeka / Erl	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	309,000.00
271	Kabel Hdmi 10 Meter Standar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	166,500.00
272	Bracket Proyektor Gantung	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	299,700.00
273	Agama Khatolik Sd Kelas 5-Siswa / Erl	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	195,000.00
274	IPA 1/VII SMP K.Merdeka	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	604,000.00
275	Buku Interaktif: PR Matematika Kelas VII Semester 2 2023	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	28,000.00
276	Kursi Siswa 1 Meja 1 Kursi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	10,000,000.00
277	Matematika Sd/Mi Kls.4/Km Kurikulum Merdeka / Erl	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,512,000.00
278	IPA 4 SD.Kur.Merdeka	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	333,000.00
279	Buku Prima Penilaian Harian 5B/K13N/ERL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	894,000.00
280	Buku Prima Penilaian Harian 4B/K13N/ERL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	822,000.00

281	Buku Prima Penilaian Harian 6A/K13N/ERL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	936,000.00
282	Buku Prima Penilaian Harian 5A/K13N/ERL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	972,000.00
283	Buku Prima Penilaian Harian 4A/K13N/ERL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	822,000.00
284	Buku Prima Penilaian Harian 6B/K13N/ERL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	990,000.00
285	Buku Agama Khatolik SD Kelas 6- Siswa/ERL	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	420,000.00
286	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	412,000.00
287	Agama Kristen (Siswa) Sd Kelas 2 Edisi Revisi / Erl	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	210,000.00
288	Keyboard eksternal	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	380,000.00
289	ESPS MATEMATIKA SD Kls.1/KM	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,940,000.00
290	Router	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	700,000.00
291	Router	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	154,500.00
292	Modem	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	450,000.00
293	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	800,000.00
294	Net Bola Volly	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	370,400.00
295	Tongkat Estafet (isi:5)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	177,000.00
296	Cakram 1kg	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	372,000.00
297	Start Blok	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	200,000.00
298	Tolak Peluru Remaja Putri (3kg)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	335,000.00
299	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
300	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
301	Net Bola Volly	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	350,000.00
302	Bola Kaki	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	776,000.00
303	Raket Badminton	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,996,000.00
304	Bola Kaki	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	776,000.00
305	BOLA KAKI	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	900,000.00
306	Net Bola Volly	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	300,000.00
307	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	250,000.00
308	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	350,000.00
309	Tolak Peluru Remaja Putri (3 kg)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	200,000.00
310	Bola Kasti	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	49,500.00
311	Kartu Suku Kata Dengan Huruf Cetak	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	220,000.00
312	Bangun-bangun Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	180,000.00
313	Bangunan dan Daerah bangun Datar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	180,000.00
314	Magnet	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	110,000.00
315	bola kaki	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	300,000.00
316	bola voli	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	325,000.00
317	Raket badminton	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	250,000.00
318	kok badminton	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	165,000.00
319	bet tenis meja	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150,000.00
320	net set tenis meja	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	120,000.00

321	Bola Kaki Karet/Plastik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	350,000.00
322	Bola Voly Penjas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	350,000.00
323	Alat Sepak Bola	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	333,000.00
324	Bola Voly Penjas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	370,000.00
325	Bola Voly Penjas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	370,000.00
326	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	425,000.00
327	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	425,000.00
328	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	850,000.00
329	Bola Voly Penjas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	740,000.00
330	Net Bola Volly	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	370,000.00
331	Net Bola Volly	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	370,000.00
332	Bola Voly Penjas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	740,000.00
333	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	850,000.00
334	Net Bola Volly	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	300,000.00
335	Raket Badminton Yonex	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	400,000.00
336	Net Bulu Tangkis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	200,000.00
337	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	350,000.00
338	Bola Voly Mikasa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,050,000.00
339	Shuttle Cock	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	212,000.00
340	Net Bola Volly	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	370,000.00
341	Bola Kaki Adidas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	425,000.00
342	Shuttle Cock	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	318,000.00
343	Penggaris Plastik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	222,000.00
344	Jangka	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	222,000.00
345	Busur Derajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	222,000.00
346	Kaki Tiga	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	505,050.00
347	Pembakar Spirtus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	582,819.39
348	Penjepit Tabung Reaksi Jembatan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	116,550.00
349	Alat Perekal Alumunium Foil	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	116,550.00
350	Raket Badminton Yonex	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	277,500.00
351	Raket Badminton Yonex	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	277,500.00
352	Net Bola Volly	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,221,000.00
353	Raket Badminton Yonex	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	200,000.00
354	Alat Simulator Pendidikan - Replika Huraf d	Kecamatan Meliau	219,780.00
355	Kursi Plastik	Kecamatan Tayan Hilir	7,750,000.00
356	Panci	Kecamatan Mukok	699,000.00
357	Regulator	Kecamatan Mukok	244,000.00
358	KURSI PLASTIK	Dinas Kesehatan	1,960,000.00
359	KURSI PLASTIK	Dinas Kesehatan	1,960,000.00
360	KIPAS ANGIN	Dinas Kesehatan	1,000,000.00
361	GORDEN	Dinas Kesehatan	1,452,000.00
362	GORDEN	Dinas Kesehatan	1,936,000.00
363	GORDEN	Dinas Kesehatan	1,936,000.00
364	SELIMUT PASIEN	Dinas Kesehatan	170,000.00
365	SPREI	Dinas Kesehatan	1,125,000.00
366	SELIMUT PASIEN	Dinas Kesehatan	510,000.00
367	Papan Arcylic Penunjuk	Dinas Kesehatan	464,000.00
368	PENGADAAN PAKAIAN	Dinas Kesehatan	3,241,200.00
369	Klem Anatomis	Dinas Kesehatan	185,000.00
370	Klem Cirungis	Dinas Kesehatan	185,000.00
371	Gunting Tali Pusat	Dinas Kesehatan	127,000.00

372	Gunting Heating Bengkok Lancip	Dinas Kesehatan	145,000.00
373	Gunting Verban	Dinas Kesehatan	196,000.00
374	Gunting Aff Heating	Dinas Kesehatan	445,000.00
375	bak instrumen	Dinas Kesehatan	230,000.00
376	Pinset Anatomi	Dinas Kesehatan	165,000.00
377	TALLY COUNTER	Dinas Kesehatan	2,450,000.00
378	APAR REFILL	Dinas Kesehatan	995,000.00
379	TOURNIQUET	Dinas Kesehatan	369,292.00
380	PRINTER	Dinas Kesehatan	483,567.00
381	PRINTER	Dinas Kesehatan	350,000.00
JUMLAH			860,538,668.39

3. Reklasifikasi aset sebesar Rp.156.688.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Reklasifikasi ke	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Belanja Pakai Habis	Kecamatan Entikong	36,688,000.00	Baju Olahraga
2	Belanja Pakai Habis	Sekretariat Daerah	120,000,000.00	Baju Olahraga
Jumlah			156,688,000.00	

4. Mutasi Aset antar SKPD sebesar Rp.3.030.254.164,08 dengan rincian sama dengan mutasi tambah antara SKPD:

5. Hibah keluar sebesar Rp.1.125.091.112,82. Yang terdiri dari:

No.	Uraian	SKPD	Nilai Perolehan
1	Hibah kepada pengadilan Negeri Sanggau Berupa Toyota Hilux G M/T KB.9726 DA (Ganti Nopol menjadi KB 8365 DC) dan Toyota Hilux G M/T KB 8153 DD (Ganti Nopol di KIB menjadi KB 9730 DA)	BPKAD	714.891.112,82
2	Kendaraan Roda 4 - Toyota Hilux 4 WD G M/T / Double Cabin	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	410,200,000.00
Jumlah			1.125.091.112,82

Uraian terkait pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 per SKPD adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan yang berasal dari penghapusan aset sebesar Rp.2.902.237.518,47 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	BPBD	596.545.874,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	920.599.502,90
3	Disporapar	167.970.110,71
4	Sekretariat Daerah	676.657.200,00
5	Bappeda	364.022.411,00
6	Kec. Tayan Hilir	176.442.419,86
TOTAL		2.902.237.518,47

2. Pengurangan yang berasal dari extracomptable (nilai dibawah nilai kapitalisasi) (<Rp. 500.000,00) sebesar Rp.860.038.668,39 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	647.004.369,39
2	Dinas Kesehatan	2.819.292,00
3	RSUD M. Th. Djaman-BLUD	4.551.800,00
4	Dinas Kesehatan - BLUD	19.260.767,00
5	Dinas Perumahan, CKTR dan Pertanahan	3.840.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	46.210.900,00
7	BPBD	7.299.360,00
8	Dinsos P3AKB	20.812.500,00
9	DPM-Pemdes	12.300.000,00
10	Diskominfo	580.000,00
11	Perindagkop	3.363.300,00
12	Disporapar	36.624.000,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.170.000,00
14	Dinas Perkebunan dan Peternakan	19.388.000,00
15	Sekretariat Daerah	11.130.000,00
16	Sekretariat DPRD	2.796.600,00
17	Bappeda	1.160.000,00
18	BKP SDM	4.315.000,00
19	Kec. Mukok	943.000,00
20	Kec. Tayan Hilir	7.750.000,00
21	Kec. Meliau	219.780,00
TOTAL		860.538.668,39

3. Pengurangan dari Reklasifikasi aset sebesar Rp.156.051.300,00 diperoleh dari kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa yang dianggarkan di belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
2	Sekretariat Daerah	120.000.000,00
3	Kec. Entikong	36.688.000,00
TOTAL		156.688.000,00

4. Pengurangan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp.3.030.254.164,08 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 268/BPKAD/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang terdiri dari beberapa SKPD sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	295.000.000,00
2	Dinsos P3AKB	324.350.000,00

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.036.054,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, TP dan HP	177.141.236,74
5	Dinas Lingkungan Hidup	462.709.556,99
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	894.179.750,00
7	Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro	206.163.426,87
8	Sekretariat Daerah	207.634.045,73
9	Sekretariat DPRD	108.827.835,60
10	Bappeda	54.575.670,00
11	BPKAD	62.619.689,15
12	Badan Pendapatan Daerah	32.534.177,34
13	Kec. Kapuas	57.197.339,95
14	Kec. Mukok	24.957.681,71
15	Kec. Noyan	51.650.000,00
16	Kec. Jangkang	36.880.000,00
17	Kec. Balai	9.797.700,00
TOTAL		3.030.254.164,08

5. Pengurangan yang berasal dari hibah keluar sebesar Rp.1.125.091.112,82 berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dan BPKAD.

6. Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dapat dilihat di **Lampiran 21.**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	1.499.436.511.391,13	1.309.432.981.978,61

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.499.436.511.391,13 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.309.432.981.978,61 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	1.309.432.981.978,61
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2023	Rp	148.677.679.734,16
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	5.327.285.192,01
-	Reklasifikasi Aset	Rp	1.564.383.599,39
-	Hibah Masuk	Rp	39.370.535.117,00
-	Reklasifikasi dari Persediaan Barang Diserahkan		3.004.578.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	197.944.461.642,56
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	568.113.199,00
-	Ekstrakomptabel	Rp	100.501.370,04
-	Reklasifikasi Aset	Rp	7.272.317.661,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	7.940.932.230,04
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	1.499.436.511.391,13

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp.197.944.461.642,56 dengan uraian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp.148.677.679.734,00 pada 22 SKPD sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran.
2. Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp.5.327.285.192,01 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kapitalisasi	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	398.792.000,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
2	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	397.692.000,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	199.971.000,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
4	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.329.933.003,01	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	620.303.000,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
6	Belanja Jasa Konsultansi	Sekretariat Daerah	128.127.000,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
7	Belanja Jasa Konsultansi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	15.588.000,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum

8	Belanja Jasa Konsultansi	Dinas Kesehatan	2.236.879.189,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
Total			5,327,285,192.01	

3. Reklasifikasi dari jenis Aset Tetap yang lain dan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.564.383.599,39 dengan rincian sebagai berikut:

No	Reklasifikasi dari	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Belanja Pemeliharaan	Dinas Sosial P3AKB	48,283,489.00	Belanja Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sanggau
2.	Belanja Pemeliharaan	Dinas Lingkungan	173,071,298.00	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Arsip
	Belanja Pemeliharaan	Dinas Lingkungan	44,025,900.00	Belanja Pemeliharaan Kantor Sekretariat
3.	Belanja Pemeliharaan	Sekretariat DPRD	153,543,228.64	Peningkatan Gapura Kantor Set-DPRD Kab. Sanggau
	Belanja Pemeliharaan	Sekretariat DPRD	102,348,823.01	Pekerjaan Beton Lantai Parkir Kantor Set-DPRD Kab. Sanggau
	Belanja Pemeliharaan	Sekretariat DPRD	310,776,743.40	Belanja Rehab Plafond Kantor Set-DPRD Kab. Sanggau
	Belanja Pemeliharaan	Sekretariat DPRD	223,506,666.67	Rehab Ruangan Pimpinan Wakil I dan Wakil II , Ruang Tunggu VVIP Kantor
	Belanja Pemeliharaan	Sekretariat DPRD	227,637,666.67	Belanja Rehab Taman Kantor Set-DPRD Kab. Sanggau
4.	Belanja Pemeliharaan	Bappeda	197,300,000.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.	Belanja Pemeliharaan	BPKAD	33,240,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
6.	Belanja Pemeliharaan	Kecamatan Beduai	50,649,784.00	Bangunan Gedung Kantor
TOTAL			1,564,383,599.39	

4. Reklasifikasi dari persediaan barang yang diserahkan sebesar Rp.3.004.578.000,00 merupakan aset gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang semula dicatat pada persediaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal	Ket
1	Peningkatan Rumah Adat Betang Dori Mpulur	2.320.016.000,00	Dibangun diatas Aset Tanah Pemda, dan akan dijadikan Cagar Budaya
2	Pembangunan Tribun Bonti Lanjutan	485.000.000,00	Aset Induk tercatat pada DPCKTRP
3	Penataan Lingkungan Tribun MTQ Batang Tarang	199.562.000,00	Pengelolaan oleh Kecamatan Balai
Total		3.004.578.000,00	

5. Hibah masuk Rp. 39.370.535.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	SKPD	Nilai Perolehan
1	Hibah Bangunan SDN 19 Emporas Kecamatan Jangkang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara No. 286.3/BA/DC/2023 dan 030/043/BPKAD-Aset	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,297,190,091.00
2	Hibah Bangunan SDN 25 Danau Teluk Kecamatan Tayan Hilir dari Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara No.286.3/BA/DC/2023 dan 030/043/BPKAD-Aset	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,478,178,883.00
3	Hibah Bangunan SDN 01 Empaong Kecamatan Parindu dari Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara No.286.3/BA/DC/2023 dan 030/043/BPKAD-Aset	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,370,052,143.00
4	Hibah Bangunan Gedung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan NPH Nomor: PKS1236/MENLHK- SETJEN/ROUM/KAP.3/9/2023	Dinas Lingkungan Hidup	796,753,000.00
5	Hibah Bangunan Dermaga Sungai Tayan dari Kementerian Perhubungan berdasarkan BAST Nomor : BA/BPTD KALBAR 417 Tahun 2023 dan Nomor : 030/046/DISHUB	Dinas Perhubungan	28,428,361,000.00
	Jumlah		39,370,535,117.00

Uraian terkait penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 per SKPD adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.148.677.679.734,16 dengan rincian:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.324.233.417,11
2	Dinas Kesehatan	77.093.667.491,00
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	352.545.000,00
4	Dinas Perumahan, CKTR dan Pertanahan	22.219.862.380,00
5	BPBD	44.870.000,00
6	Dinsos P3AKB	611.833.766,68
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	105.866.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	249.446.307,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.363.100,00
10	Dinas Perhubungan	998.983.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	109.712.250,00
12	Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro	333.065.703,97
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	25.036.000,00
14	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	716.835.000,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.186.308.258,31
16	Sekretariat Daerah	2.675.406.281,92
17	Sekretariat DPRD	20.501.278,17
18	Bappeda	197.944.500,00
19	BPKAD	181.000.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	179.000.000,00
21	BKP SDM	25.200.000,00
22	Kec. Beduai	50.649.784,00
	TOTAL	148.677.679.734,16

2. Penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp.5.327.285.192,01 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.150.207.003,01
2	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	796.484.000,00
3	Sekretariat Daerah	128.127.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	15.588.000,00
5	Dinas Kesehatan	2.236.879.189,00
TOTAL		5.327.285.192,01

3. Penambahan yang berasal dari reklasifikasi aset Rp.1.564.383.599,39 merupakan reklas aset dari aset konstruksi dalam pengerjaan ke aset gedung dan bangunan, kesalahan penganggaran belanja modal Gedung bangunan yang pada tahun 2023 dianggarkan pada belanja pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinsos P3AKB	48.283.489,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	217.097.198,00
3	Sekretariat DPRD	1.017.813.128,39
4	Bappeda	197.300.000,00
5	BPKAD	33.240.000,00
6	Kecamatan Beduai	50.649.784,00
TOTAL		1.564.383.599,39

4. Penambahan yang berasal dari hibah masuk sebesar Rp.39.370.535.117,00, merupakan hibah dari Pemerintah Pusat berupa bangunan gedung, Dermaga Sungai dengan BAST:
- Naskah Hibah Barang Milik Negara No.286.2/BA/DC/2023 dan 020/043/BPKAD-Aset.
 - NPH Nomor: PKS 1236/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/9/2023;
 - BST Nomor: BA-BPTDKALBAR 417 Tahun 2023 dan Nomor: 030/046/DISHUB;
- Adapun rincian penambahan yang dari hibah yaitu sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.145.421.117,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	796.753.000,00
3	Dinas Perhubungan	28.428.361.000,00
TOTAL		39.370.535.117,00

Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp.7.940.932.230,04 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengurangan yang berasal dari penghapusan aset sebesar Rp.568.113.199,00 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor LLAJ Lama	BPBD	87.900.000,00
2	Rumah Potong ewan /TPH	Dinas Ketahanan Pangan, TP dan HP	79.860.000,00
3	Bangunan Rumah Dinas	BPKAD	142.200.000,00
4	Bangunan Gedung Diklat	BKPSDM	258.153.199,00
TOTAL			568.113.199,00

2. Pengurangan yang berasal dari extracomptable (nilai dibawah nilai kapitalisasi) (<Rp. 25.000.000,00) sebesar Rp.100.501.370,04 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.807.091,87
2	BPBD	44.870.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	13.323.000,00
4	Sekretariat Daerah	20.501.278,17
TOTAL		100.501.370,04

3. Pengurangan aset yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp.7.272.317.661,00 merupakan reklasifikasi aset tetap dari gedung dan bangunan ke aset konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat di **Lampiran 18**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
2.091.097.744.533,20 **1.896.460.343.185,20**

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.091.097.744.533,20 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.896.460.343.185,20 dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	1.896.460.343.185,20
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2023	Rp	95.734.545.493,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	3.665.446.000,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	25.925.991.956,00
-	Reklasifikasi dari Persediaan yang diserahkan	Rp	2.260.260.000,00

-	Koreksi/Penyesuaian	Rp	684.681.920,00
-	Hibah Masuk	Rp	66.522.468.466,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	194.793.393.835,00
Pengurangan :			
-	Ekstrakomptabel	Rp	120.883.487,00
-	Koreksi / Penyesuaian	Rp	35.109.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	155.922.487,00
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	2.091.097.744.533,20

Mutasi tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.194.793.393.835,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.95.734.545.493,00 sesuai Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada lima SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.000.000.000,00
2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	93.332.594.768,00
3	Dinsos P3AKB	32.396.749,00
4	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	319.830.000,00
5	Sekretariat Daerah	49.723.976,00
TOTAL		95.734.545.493,00

2. Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp.3.665.446.000,00; dengan rincian sebagai berikut:

No	Reklasifikasi dari	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan DAK Bidang Jalan Bukan Tematik	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	560.811.000,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
2	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan DAK Bidang Jalan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	551.505.000,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
3	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan DAK Bidang	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	284.090.000,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
4	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	487.851.000,00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum

5	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan Paket 2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	452,753,000.00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
6	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan Paket 3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	486,386,000.00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
7	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Penanganan Jembatan Paket 1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	487,385,000.00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
8	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Teknik Sipil Air	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	259,955,000.00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
9	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	94,710,000.00	Menjadi penambahan nilai aset tetap sebagai biaya atribusi/ penunjang aset yang melakat di aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
TOTAL			3,665,446,000.00	

3. Reklasifikasi aset sebesar Rp.25.925.991.956,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Reklasifikasi dari	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Belanja Pemeliharaan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	25.485.894.961,00	Hal ini terjadi karena belanja tersebut dianggarkan pada belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan) yang seharusnya belanja tersebut merupakan belanja modal terhadap aset yang sudah dikapitalisasikan.
2	Belanja Pemeliharaan	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	440.096.995,00	Hal ini terjadi karena belanja tersebut dianggarkan pada belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan) yang seharusnya belanja tersebut merupakan belanja modal terhadap aset yang sudah dikapitalisasikan.
Jumlah			25.925.991.956,00	

4. Koreksi tambah pencatatan sebesar Rp.684.681.920,00 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atas pencatatan Hutang Belanja Modal yang pekerjaan fisiknya telah selesai, namun pembayaran belum dilakukan 100%, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan Jembatan Kuala Buayan (Tahap V)	464.148.800,00
2	Pembangunan Jembatan Sungai Mapai (Tahap IV)	123.789.120,00
3	Saluran di Komplek Bina Marga Kec. Kapuas	96.744.000,00
JUMLAH		684.681.920,00

5. Hibah masuk sebesar Rp.66.522.468.466,00 berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan BAST Hibah oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tahun 2023, Nomor:286/BA/DC/2023; 030/042/BPKAD-ASET pada dua SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	SKPD	Nilai Perolehan (Rp)
1	Hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan BAST Hibah oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tahun 2023 Nomor : 286/BA/DC/2023; 030/042/BPKAD-ASET	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	41.218.373.044,00
2	Hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan BAST Hibah oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tahun 2023 Nomor : 286/BA/DC/2023; 030/042/BPKAD-ASET	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	25.304.095.422,00
Jumlah			66.522.468.466,00

Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun anggaran 2023 sebesar Rp.155.992.487,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengurangan yang berasal dari Extracomptable (dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp.120.883.487,00 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Uraian
1	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	11,406,842.00	JALAN SEJUAH - NOYAN
2	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	5,397,510.00	JALAN SIMPANG EMBAONG - SANGGAU PERMAI
3	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	9,513,306.00	JALAN PROGONG DUSUN BODOK DESA PUSAT DAMAI (Upah
4	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	14,557,204.00	JALAN TARUNA (Upah Borong)
5	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	7,714,136.00	JALAN MEROBU KEL. BERINGIN KEC. KAPUAS
6	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	6,749,739.00	JALAN AKSES GEREJA ST. THOMAS STASI SEGOLE KEC. KAPUAS
7	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	13,898,718.00	JALAN AKSES GREJA KATOLIK PAROKI SMBP BUNUT KEC. KAPUAS
8	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	17,003,453.00	JALAN IKK KOTA SANGGAU
9	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	10,724,505.00	Jalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
10	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	4,574,144.00	AKSES JALAN SMK 1 ENTIKONG DAN AKSES SDLB SANGGAU (Upah Tukang)
11	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	19,343,930.00	JEMBATAN SUNGAI SENGUI
	JUMLAH	120,883,487.00	

2. Koreksi kurang pencatatan sebesar Rp.35.109.000,00 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan pembayaran utang tahun 2022, yang pada tahun 2023 dianggarkan pada Belanja Modal. Atas nilai tersebut telah dicatat pada Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar nilai kontrak, sehingga terdapat pencatatan ganda:

Daftar mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dapat dilihat di **Lampiran 19**.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.5	Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya	131.988.733.353,17	124.131.476.792,17

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.131.988.733.353,17 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.124.131.476.792,17 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	124.131.476.792,17
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2023	Rp	9.555.573.820,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	9.555.573.820,00
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	78.585.559,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	1.619.731.700,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	1.698.317.259,00
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	131.988.733.353,17

1. Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.555.573.820,00 berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.543.270.410,00
2	Dinas Kesehatan	251.800.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan	96.570.000,00
4	Dinas Perhubungan	194.000.000,00
5	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	167.353.410,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	294.560.000,00
7	Dinas Perkebunan dan Peternakan	198.000.000,00
8	Sekretariat Daerah	243.020.000,00
9	BPKAD	567.000.000,00
TOTAL		9.555.573.820,00

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.1.698.317.259,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap lainnya yang berasal dari penghapusan aset sebesar Rp.78.585.559,00 berasal dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
2. Pengurangan aset tetap lainnya yang berasal dari Reklasifikasi aset sebesar Rp.1.619.731.700,00 berasal dari beberapa SKPD yaitu sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Uraian
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69,341,700.00	Sistem Informasi Pendataan Anak Putus Sekolah Kab. Sanggau (Reklas dari Aset Tetap lainnya ke Aset Tak berwujud)
2	Dinas Kesehatan	251,800,000.00	APLIKASI POSYANDU (Reklas dari Aset Tetap lainnya ke Aset Tak berwujud)
3	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultur dan Perikanan	96,570,000.00	SOFTWARE ANALISIS KONSUMSI PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN (PPH) (Reklas dari Aset Tetap lainnya ke Aset Tak berwujud)
4	Dinas Perhubungan	194,000,000.00	Aplikasi (Reklas dari Aset Tetap lainnya ke Aset Tak berwujud)
5	Dinas Perkebunan dan Peternakan	198,000,000.00	Sistem Informasi Keuangan, Manajemen dan Perencanaan (SIKEREN) (Reklas dari Aset Tetap lainnya ke Aset Tak berwujud)
6	Sekretariat Daerah	243,020,000.00	Server (Reklas dari Aset Tetap lainnya ke Peralatan dan Mesin)
7	BPKAD	567,000,000.00	Aplikasi Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Paket II dan Aplikasi Pembayaran SP2D Online (Reklas dari Aset Tetap lainnya ke Aset Tak berwujud)
TOTAL		1,619,731,700.00	

Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat di **Lampiran 20**.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.459.778.650,92	38.306.236.857,92

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.19.459.778.650,92 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.38.306.236.857,92 merupakan bangunan yang belum dapat dimanfaatkan dan masih akan dilanjutkan pengerjaannya pada tahun berikutnya dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	38.306.236.857,92
Penambahan :			
-	Reklasifikasi Aset	Rp	6.639.436.754,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	6.639.436.754,00
Pengurangan :			

-	Reklasifikasi Aset	Rp	25.485.894.961,00
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	25.485.894.961,00
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	19.459.778.650,92

Mutasi tambah Aset Konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp. 6.639.436.754,00 berupa pembangunan Gedung Kasntor Satpol PP Kabupaten Sanggau yang per 31 Desember 2023 belum 100%

Mutasi Kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Marga dan Sumber daya Air sebesar Rp.25.485.894.961,00 yang pekerjaannya telah selesai 100% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU	243,551,756.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
2	JEMBTAN SUNGAI LIKU DUA (JALAN PEMBANGUNAN DEPAN SPBU)	1,091,630,748.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
3	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUI. MAPAI DESA SEMERANGKAI (JJ)	292,082,172.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
4	PEMB.JEMBATAN SUNGAI BAWANG – MINGGUK KEMANTAN DS. BAGAN ASAM (JJ)	230,423,958.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
5	JEMBATAN SUNGAI MUARA GINAU TAHAP IV	2,596,312,697.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
6	JEMBATAN MAPAI TAHAP II	763,154,839.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
7	JEMBATAN SANYU DSN. BUKONG	484,153,187.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
8	JEMBATAN SEI. EMPURAU DS. KUALA BUAYAN	340,714,524.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
9	JEMBATAN SUNGAI KAYAN DESA THANG RAYA	308,438,507.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
10	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI EMPURAU DS. KUALA BUAYAN	82,146,851.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
11	JEMBATAN DESA PADI KAYE KEC. BALAI	172,121,000.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
12	JEMBATAN SANYU BUKONG (TAHAP 2)	914,050,718.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
13	JEMBATAN MUARA GINAU (TAHAP V)	720,121,738.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
14	JEMBATAN KUALA BUAYAN (TAHAP 2)	264,352,321.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%

15	JEMBATAN KUALA BUAYAN (TAHAP 4)	7,315,699,042.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
16	JEMBATAN MUARA GINAU (TAHAP VII)	5,342,750,606.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
17	JEMBATAN SUNGAI MAPAI (TAHAP III)	4,324,190,297.00	Pembangunan Sudah 100% dan sudah terbayar 100%
	JUMLAH	25.485.894.961,00	

Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dapat dilihat di **Lampiran 21**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2023 (2.334.318.476.992,51)** **31 Desember 2022 (2.106.000.160.925,63)**
Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.334.318.476.992,51 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.106.000.160.925,63 merupakan Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Asset Tetap Lainnya dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(643.637.536.554,66)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(670.940.772.221,81)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.018.623.692.518,43)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.116.475.697,61)
	Total	(2.334.318.476.992,51)

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per- 31 Desember 2023 masing-masing SKPD dapat dilihat di **Lampiran 22**.

5.3.1.4 DANA CADANGAN **31 Desember 2023 7.147.693.104,00** **31 Desember 2022 30.000.000.000,00**
5.3.1.4.1 Dana Cadangan **7.147.693.104,00** **30.000.000.000,00**

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.7.147.693.104,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.30.000.000.000,00. Pengelolaan dana Cadangan Kabupaten Sanggau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Penyaluran Dana Cadangan berdasarkan SK Bupati Sanggau Nomor: 418/BPKAD/2022 tanggal 30 November 2022 tentang penyaluran Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sanggau tahun 2024 yang menetapkan bahwa penyaluran Dana Cadangan ke Rekening Dana Cadangan Kabupaten Sanggau, dengan Nomor Rekening BPD Bank Kalbar 3001008209 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah).

Pada Tahun 2023 terdapat pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening RKUD Kabupaten Sanggau dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan surat Kepala BPKAD Nomor 001/BUD/BPKAD/PY yang berisi permohonan pemindahbukuan dana cadangan ke rekening 3001006966 (RKUD Kabupaten Sanggau) sebesar Rp.22.852.306.896,00 kepada Kepala BPD Bank Kalbar Cabang Sanggau. Sehingga saldo dana cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.7.147.693.104,00 (Rp.30.000.000.000,00 – Rp.22.852.306.896,00). Saldo tersebut sesuai dengan saldo pada rekening penampung dana cadangan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.5 ASET LAINNYA	182.360.294.639,36	175.264.763.752,94

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.182.360.294.639,36 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.175.264.763.752,94. Saldo Aset Lainnya tersebut merupakan nilai bersih setelah memperhitungkan Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan, Rincian perhitungan Asset Lainnya sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022		Rp	175.264.763.752,94
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2023	Rp	1.265.847.900,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	1.619.731.700,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	299.725.999,00
-	Dana Transfer (TDF)		115.867.299.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	119.052.604.599,00
Pengurangan :			
-	Amortisasi Tahun 2023	Rp	1.100.175.508,58
-	Akumulasi Penyusutan 2023	Rp	(165.974.417,00)
-	Penghapusan Aset	Rp	165.974.417,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	243.020.000,00
-	Dana Transfer (TDF)		110.613.878.204,00
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	111.957.073.712,58
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	182.360.294.639,36

Rincian masing-masing pos aset lainnya tersebut dirinci sebagai berikut :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Tidak terdapat nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.		

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud (<i>bruto</i>)- <i>software</i>	19.586.387.206,83	16.644.101.607,83
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp.19.586.387.207,83 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.16.644.101.607,83 yang merupakan nilai bruto sebelum dikurangi Amortisasi Aset Tak Berwujud. Saldo akhir Aset Tak Berwujud sebelum dikurangi Amortisasi adalah sebagai berikut :		

Saldo Per 31 Desember 2022		Rp	16.644.101.607,83
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2023	Rp	1.265.847.900,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	1.619.731.700,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	299.725.999,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	3.185.305.599,00
Pengurangan :			
-	Reklasifikasi Aset	Rp	243.020.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	243.020.000,00
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	19.586.387.206,83

1. Mutasi tambah Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 berasal dari Belanja Modal dan Penyesuaian / Koreksi Tahun 2023 sebesar Rp.3.185.305.599,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	69.341.700,00
2	Dinas Kesehatan	251.800.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	179.000.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	494.505.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	109.989.900,00
6	Dinas Perhubungan	363.500.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	99.800.000,00

8	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	188.700.000,00
9	Dinas Perkebunan dan Peternakan	198.000.000,00
10	Badan Pendapatan Daerah	243.020.000,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	567.000.000,00
12	Badan Pendapatan Daerah	199.925.999,00
13	Inspektorat	220.723.000,00
TOTAL		3.185.305.599,00

2. Mutasi tambah sebesar Rp.299.725.999,00 merupakan koreksi atas pencatatan Aset Tidak Berwujud berupa Software pada Badan Pendapatan daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang diperoleh Tahun 2022 melalui Anggaran Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nominal
1	Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi SIPadah Android	99.929.999,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi retribusi Daerah (SI-RETD)	99.996.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	E-PHYO	99.800.000,00
Total			299.725.999,00

3. Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.243.020.000,00 pada Sekretariat Daerah.

Rincian mutasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 23**

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.5.3.1	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	16.515.250.247,23	15.415.074.738,65

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp.16.335.453.847,83 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.15.415.074.738,83. Saldo akhir Amortisasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut :

Saldo Per 31 Desember 2022		Rp	15.415.074.738,65
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2023	Rp	846.270.153,70
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	74.108.955,48
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	179.796.399,40
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	1.100.175.508,58
Pengurangan :			
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0,00

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	16.515.250.247,23
-----------------------------------	-----------	--------------------------

Rincian mutasi Amortisasi asset tidak berwujud per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 24**

Saldo Akhir Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Amortisasi, sebagai berikut:

Saldo akhir asset tidak berwujud per 31 Desember 2022	Rp	19.586.387.206,83
Saldo akhir amortisasi asset tidak berwujud per 31 Desember 2023	Rp	(16.515.250.247,23)
Jumlah asset tidak berwujud netto	Rp	3.071.136.959,60

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.5.4 Aset Lain-lain	64.953.523.335,87	65.119.497.752,87

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp.64.953.523.335,87 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.119.497.752,87. Rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022	Rp	65.119.497.752,87
Penambahan :		
- Belanja Modal 2023	Rp	0,00
- Reklasifikasi Aset	Rp	0,00
- Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
- Penyesuaian / Koreksi	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0,00
Pengurangan :		
- Penghapusan Aset	Rp	165.974.417,00
- Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
- Penyesuaian / Koreksi	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	165.974.417,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	64.953.523.335,87

Pengurangan Aset Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.165.974.417,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.5.4.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(1.531.664.656,11)	(1.697.693.073,11)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.531.664.645,11 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.697.693.073,11. Perhitungan saldo Akumulasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2022	Rp	(1,697,693,073.11)
Penambahan :		

-	Beban Akumulasi Aset Lain-Lain	Rp	0,00
	Jumlah Penambahan	Rp	0,00
	Pengurangan :		
-	Beban Akumulasi Aset Lain-Lain	Rp	165.974.417,00
	Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	(1.531.664.656,11)

Saldo Akhir Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan, sebagai berikut:

Saldo akhir aset Lain-lain per 31 Desember 2022	Rp	64.953.523.335,87
Saldo akhir amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023	Rp	(1.531.664.656,11)
Jumlah Aset Lain-Lain	Rp	63.421.858.679,76

Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 25 dan 26**.

5.3.1.5.5 Aset Lain-lain

Aset lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp.115.867.299.000,00 merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas TDF ke Rekening BI.

Aset Properti Investasi

Berdasarkan PSAP 17 tentang Properti Investasi dinyatakan bahwa “Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya”. Terdapat 8 (Delapan) objek aset tetap yang diklasifikasikan sebagai properti investasi yang sudah memenuhi PSAP 17 tentang Properti Investasi . Untuk 8 (Delapan) objek aset tetap tersebut telah tercatat dan diakui pada aset tetap tanah dan aset tetap gedung dan bangunan pada 5 (lima) SKPD. Properti investasi tersebut adalah:

1. Pada Aset Tetap Tanah terdapat 3 (tiga) objek berupa 2 (dua) bidang tanah yang sudah dimanfaatkan dan ditetapkan retribusinya sebagai pemanfaatan tanah (HPL) lokasi pasar sentral dan pasar kartini dan 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di sebelah PLTD (seberang aming *coffe*) belum dimanfaatkan (aset *idle*).
2. Pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat 5 (lima) objek berupa 2 (dua) gedung bangunan pertemuan umum dan 1 (satu) gedung bangunan *indoor* olahraga yang sudah dimanfaatkan dan ditetapkan retribusinya. Untuk rusunawa *flat tower* 1 belum dimanfaatkan sedangkan rusunawa entikong *flat tower* 2 sudah dimanfaatkan

tetapi penerimaan retribusinya di gunakan sebagai pemeliharaan rusunawa flat tower 2.

No	Properti	Luas Aset (m2)	Lokasi	SKPD	Nilai Perolehan	Jenis Aset
1	Tanah Bangunan Pertokoan/rumah Toko	3.082	Jl. Gajah Mada Sanggau	BPKAD	2.003.300.000,00	Tanah
2	Bangunan Gedung Pertemuan (Bapenda)	-	Kab.Sanggau	BAPENDA	3.664.269.063,00	Bangunan
3	Gedung Balai Betomu	-		SETDA	496.649.640,64	Bangunan
4	Bangunan Indoor Gedung Olahraga Balai Betomu	-		DINAS PORAPAR	5.709.198.971,80	Bangunan
5	Tanah Bangunan Pertokoan/rumah Toko	322	Kelurahan Ilir Kota	BPKAD	26.404.000,00	Tanah
6	Tanah Bangunan Pertokoan/rumah Toko	3.541	Kelurahan Bunut, Kec. Kapuas	DINAS PERHUBUNGAN	619.675.000,00	Tanah
7	Flat/Rumah Susun Permanen Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1	-	Dusun Entikong RT. 004 RW. 001 Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau	DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	20.647.649.402,00	Bangunan
8	Flat/Rumah Susun Permanen Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2	-	Dusun Entikong RT. 004 RW. 001 Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau	DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	21.275.284.963,00	Bangunan
	Total				54.442.431.040,44	

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2 Kewajiban	19.773.041.255,00	10.534.141.850,00

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.773.041.255,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.534.141.850,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp.9.238.899.405,00 atau 87,70% dari saldo kewajiban per 31 Desember 2022. Rincian kewajiban sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kewajiban Jangka Pendek	19.773.041.255,00	10.534.141.850,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	19.773.041.255,00	10.534.141.850,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	19.773.041.255,00	10.534.141.850,00

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.773.041.255,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.534.141.850,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp.9.238.899.405,00 atau 87,70% dari saldo kewajiban per 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	8.008.062,00	3.174.747,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	466.461.390,00	0,00
3	Utang Belanja	19.298.571.803,00	10.530.967.103,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	19.773.041.255,00	10.534.141.850,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.008.062,00	3.174.747,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.008.062,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.174.747,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.833.315,00 atau 152,24% Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.008.062,00 tersebut berada pada:

1. Dinas Kesehatan	Rp. 702.456,00
2. Dinas Kesehatan – BLUD	<u>Rp. 7.305.606,00</u>
Jumlah.....	Rp. 8.008.062,00

Rincian Utang PFK per 31 Desember 2023 dapat dilihat di **Lampiran 27**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	466.461.390,00	0,00

Nilai Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp.466.461.390,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00. Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan atas Pajak Reklame dengan masa pajak Tahun 2023 s.d 2024 namun

telah dibayar seluruhnya pada Tahun 2023. Sehingga pembayaran untuk Tahun 2024 dikategorikan sebagai Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1.3 Utang Belanja	19.298.571.803,00	10.530.967.103,00

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.298.571.803,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.530.967.103,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp.8.767.604.700,00 atau 83,26%. Utang tersebut merupakan utang belanja Listrik, Air dan Telepon/Indihome/Internet; utang belanja Obat-Obatan dan Jasa Pelayanan pada RSUD M.Th – BLUD Djaman; Dinas Kesehatan – BLUD; Utang belanja pembangunan fisik sarana dan prasarana Pemerintah daerah, dan Utang BPJS, Utang TPP dan Utang Gaji dan Tunjangan ASN dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	10.859.370,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	11.730.042.300,00
3	Utang Belanja Modal	7.557.670.133,00
	Total	19.298.571.803,00

Rincian Utang Belanja menurut jenisnya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Beban Listrik, Air, Telepon Indihome/Internet	895.367.356,00
2	Utang Beban Obat-Obatan	9.543.970.385,00
3	Utang Belanja Fisik	8.845.286.189,00
4	Utang Belanja BPJS (Jamkes, JKK dan JKM)	12.294.033,00
5	Utang TPP (Kec. Parindu)	1.516.840,00
6	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (Kec.Entikong)	137.000,00
	Total	19.298.571.803,00

Rincian lebih lanjut utang menurut jenisnya sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	KETERANGAN
A	Utang Belanja Pegawai			
1	Utang Belanja BPJS (Jamkes, JKK JKM ASN)	9.205.530,00	0,00	INSPEKTORAT
2	Utang TPP ASN	1.516.840,00	0,00	KEC. PARINDU
3	Utang Gaji dan Tunjangan ASN	137.000,00	0,00	KEC. ENTIKONG
	Jumlah Utang Belanja Pegawai	10.859.370,00	0,00	

B	Utang Belanja Barang dan Jasa			
	Utang Belanja Listrik	768.699.814,00	747.958.215,00	BEBERAPA SKPD
	Utang Belanja PDAM	48.822.750,00	97.566.850,00	BEBERAPA SKPD
	Utang Belanja Telepon	8.591.029,00	14.447.762,00	BEBERAPA SKPD
	Utang Belanja Internet	69.253.763,00	48.512.622,00	BEBERAPA SKPD
	Urang Belanja Obat-Obatan	6.526.737.567,00	85.498.344,00	RSUD-BLUD
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.838.806.328,00	1.699.365.048,00	RSUD-BLUD
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	178.426.490,00	0,00	DINKES-BLUD
	Utang Belanja BPJS (JKK DAN JKM TEKON)	264.264,00	0,00	KEC. TAYAN HULU
	Utang Belanja BPJS (JKK DAN JKM TEKON)	283.176,00	0,00	KEC. MUKOK
	Utang Belanja BPJS (JKK DAN JKM TEKON)	219.591,00	0,00	KEC. BEDUAI
	Utang Belanja BPJS (JKK DAN JKM TEKON)	2.321.472,00	0,00	KEC. TOBA
	Utang Peningkatan Embaong Lama	179.530.842,00	0,00	BMSDA
	Utang Pembangunan Jembatan Penyelimau Kec. Kapuas	85.510.574,00	0,00	BMSDA
	Utang Peningkatan Jalan Dusun Sungai Kembayau Ds. Melawi Makmur Kec. Meliau	99.210.000,00	0,00	BMSDA
	Utang Bangunan DPRD 2009 (Jasa Konsultan)	243.365.000,00	243.365.000,00	DPCKTRP
	Utang Belanja Barang dan Jasa	679.999.640,00	679.999.640,00	DPCKTRP
	Utang Belanja DPCKTRP	0,00	380.000,00	DPCKTRP
	Utang Pajak Makanan Minuman (RSUD-BLUD)	0,00	4.860.909,00	RSUD-BLUD
	Utang Pajak Makanan Minuman (DINKES)	0,00	915.500,00	DINKES
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	11.731.002.300,00	3.622.869.890,00	
C	Utang Belanja Modal			
	Utang Pembangunan Jembatan Kuala Buayan (Tahap 5)	464.148.800,00	0,00	BMSDA
	Utang Pembangunan Jembatan Sungai mapai (Tahap IV)	123.789.120,00	0,00	BMSDA
	Utang Pembangunan Bangunan Perkuat Tebing Sungai/Saluran di Komplek Bina Marga Kel. Bunut Kec. Kapuas	96.744.000,00	0,00	BMSDA
	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.872.988.213,00	6.872.988.213,00	DPCKTRP
	Pekerjaan Pembangunan Perkuatan tebing sungai Makam Raja Desa Mengkiang Kec. Kapuas Kab. Sanggau (koreksi BPK-LKPD TA. 2022)	0,00	35.109.000,00	BMSDA
	Jumlah Utang Belanja Modal	7.557.670.133,00	6.908.097.213,00	

	Total Utang Belanja	19.299.531.803,00	10.530.967.103,00	
--	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--

- a. Utang Belanja Listrik, Air, dan Telepon, Indihome/Internet merupakan saldo Utang Belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp.895.367.356,00 yang berada pada SKPD sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Listrik	Air (PDAM)	Telepon	Indihome (internet)	Total
1	2	3	4	5	6	7
I	Utang Beban Barang dan Jasa					
1	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	18.176.482,00	751.750,00	0,00	10.335.675,00	29.263.907,00
2	Dinas Kesehatan	94.335.864,00	5.036.650,00	0,00	4.216.128,00	103.588.642,00
3	RSUD M.Th Djaman	122.899.800,00	18.270.500,00	5.961.314,00	0,00	147.131.614,00
4	Dinas Kesehatan - BLUD	0,00	0,00	0,00	4.068.062,00	4.068.062,00
5	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	11.373.161,00	1.463.100,00	0,00	0,00	12.836.261,00
6	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	9.461.284,00	0,00	0,00	2.189.390,00	11.650.674,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	911.569,00	0,00	0,00	0,00	911.569,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.836.087,00	94.500,00	0,00	1.837.500,00	7.768.087,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.988.398,00	452.600,00	0,00	2.590.350,00	7.031.348,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00
11	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	0,00	364.500,00	0,00	2.061.918,00	2.426.418,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.152.553,00	0,00	0,00	1.830.400,00	5.982.953,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.122.907,00	0,00	0,00	607.950,00	8.730.857,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	300.150.105,00	0,00	0,00	2.254.200,00	302.404.305,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.645.491,00	105.000,00	1.911.,265,00	0,00	7.661.756,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.650.144,00	91.500,00	0,00	0,00	22.741.644,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.565.568,00	126.500,00	0,00	2.533.406,00	4.22.474,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.881.928,00	1.221.600,00	0,00		9.103.528,00
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.930.087,00	156.250,00	0,00	1.284.000,00	8.370.337,00
22	Sekretariat Daerah	77.336.599,00	9.150.600,00	0,00	13.682.362,00	100.169.561,00
23	Sekretariat DPRD	26.147.932,00	303.000,00	0,00	8.093.214,00	34.544.146,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.655.716,00	151.500,00	0,00	4.554.450,00	7.361.666,00

25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.948.470,00	91.500,00	0,00	0,00	15.039.970,00
26	Badan Pendapatan Daerah	9.426.198,00	430.700,00	0,00	3.015.680,00	12.872.578,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00
28	Inspektorat	6.797.296,00	291.500,00	0,00	949.050,00	8.037.846,00
29	Kecamatan Beduai	0,00	223.550,00	0,00	508.050,00	731.600,00
30	Kecamatan Sekayam	804.620,00	1.060.800,00	0,00	662.950,00	2.528.370,00
31	Kecamatan Parindu	2.576.913,00	-	0,00	591.800,000	3.168.713,00
32	Kecamatan Tayan Hulu	68.754,00	7.451.700,00	0,00	0,00	7.520.454,00
33	Kecamatan Meliau	1.680.889,00	91.500,00	0,00	976.250,00	2.692.389,00
34	Kecamatan Entikong	0,00	0,00	0,00	410.978,00	410.978,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.174.999,00	91.500,00	718450,00	0,00	2.984.949,00
	Jumlah I	768.699.814,00	48.822.750,00	8.591.029,00	69.253.763,00	895.367.356,00

Rincian Utang Belanja Listrik, Air, Telepon dan Internet per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

- b. Utang Belanja Obat-Obatan dan Jasa Pelayanan RSUD M.Th Djaman-BLUD dan Dinkes
- BLUD sebesar Rp.9.543.970.385,00 merupakan saldo utang belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2023 yang berada pada RSUD M.Th. Djaman - BLUD dan Dinas Kesehatan-BLUD dengan rincian:
 - Utang Belanja Obat-obatan sebesar Rp 6.526.737.567,00
 - Utang Jasa Pelayanan Kesehatan (RSUD-BLUD) sebesar Rp 2.838.806.328,00
 - Utang Jasa Pelayanan Kesehatan (Dinkes-BLUD) sebesar Rp 178.426.490,00

Jumlah Rp 9.543.970.385,00

No.	Uraian>Nama SKPD	Total
1	2	3
I	Utang Belanja Obat-obatan dan Jasa Pelayanan - RSUD M.TH. Djaman-BLUD	
A	Utang Belanja Obat-Obatan	
1	Obat-obatan	6.410.457.567,00
2	Labu Darah PMI	116.280.000,00
	Jumlah A (Obat-Obatan)	6.526.737.567,00
B	Utang Belanja Jasa Pelayanan - RSUD M.TH. Djaman	
1	JP Covid-19 Februari 2022	22.572.838,00
2	JP Covid-19 Maret 2022	268.941.853,00
3	JP Covid-19 April 2022	60.782.126,00
4	JP Covid-19 Juni,Sept,Okt 2022	69.355.960,00
5	JP Covid-19 November 2022	72.604.456,00
6	JP Covid-19 Desember 2022	96.725.322,00

7	JP RITL dan RJTL BPJS Juli 2023	258.390.848,00
8	JP RITL dan RJTL BPJS Agustus 2023	157.436.337,00
9	JP RITL dan RJTL BPJS September 2023	133.212.298,00
10	JP RITL dan RJTL BPJS Oktober 2023	107.284.995,00
11	JP RITL dan RJTL BPJS November 2023	926.718.241,00
12	JP RITL dan RJTL BPJS Desember 2023	276.781.051,00
13	JP Bansos RS, Dinsos, JR, MCU 2023	84.493.437,00
14	JP KLB November 2023	75.644.659,00
15	JP KLB Desember 2023	227.861.907,00
	Jumlah B (Jasa Pelayanan)	2.838.806.328,00
II	DINAS KESEHATAN - BLUD	
	Jasa Pelayanan Kesehatan	178.426.490,00
1	Puskesmas Sanggau	313.800,00
2	Puskesmas Tanjung Sekayam	634.260,00
3	Puskesmas Kembayan	19.798.260,00
4	Puskesmas Pusat Damai	24.030.100,00
5	Puskesmas Kampung Kawat	87.171.730,00
6	Puskesmas Beduai	29.127.120,00
7	Puskesmas Kedukul	10.323.960,00
8	Puskesmas Harapan Makmur	598.260,00
9	Puskesmas Balai Sebut	6.429.000,00
	Jumlah I (A+B) + II	9.543.970.385,00

Rincian Utang Belanja Obat-Obatan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 29**

- c. Utang Belanja Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah sebesar Rp.8.845.286.189,00.

Utang Belanja Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana pada Nereca per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.845.286.189,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.7.831.461.853,00. dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	7.831.461.853,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	1.048,933.336,00
Pengurangan Tahun 2023	Rp	(35.109.000,00)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	8.845.286.189,00

Rincian Belanja Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 30**

- d. Utang Belanja BPJS (Jamkes, JKK, JKM), Utang TPP, Utang Gaji dan Tunjangan ASN, merupakan saldo utang belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp.13.947.873,00 yang berada pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Jumlah
1	Inspektorat	Utang Belanja BPJS (Jamkes, JKK, JKM)	9.205.530,00

2	Kec. Tayan Hulu	Utang Belanja BPJS (Jamkes, JKK, JKM)	264.264,00
3	Kec. Mukok	Utang Belanja BPJS (Jamkes, JKK, JKM)	283.176,00
4	Kec. Beduai	Utang Belanja BPJS (Jamkes, JKK, JKM)	219.591,00
5	Kec. Toba	Utang Belanja BPJS (Jamkes, JKK, JKM)	2.321.572,00
6	Kec. Parindu	Utang Belanja BPJS (Jamkes, JKK, JKM)	1.516.840,00
7	Kec. Entikong	Gaji dan Tunjangan ASN	137.000,00
		Total	13.947.873,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah tersebut merupakan Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.		

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat nilai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.2.1 Utang Dalam Negeri	0,00	0,00

Tidak terdapat nilai utang dalam negeri per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00

Tidak terdapat nilai Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.3 Ekuitas	3.652.265.176.974,82	3.431.508.398.520,49

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.652.265.176.974,82 merupakan selisih antara aset dikurangi dengan kewajiban, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 3.672.038.218.229,82
b. Jumlah Kewajiban	Rp (19.773.041.255,00)
Ekuitas	Rp 3.652.265.176.974,82

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-Pos Luar Biasa. Laporan operasional Pemerintah Kabupaten Sanggau diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa.

Kegiatan Operasional.

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sanggau selama periode tahun 2023. Nilai surplus dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sanggau tercatat sebesar Rp.206.314.865.448,97. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp.1.851.943.564.268,16 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp.1.645.628.698.819,19.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1 Pendapatan-LO	1.851.943.564.268,16	1.558.995.800.903,66

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.851.943.564.268,16, jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp.1.558.995.800.903,66 terjadi kenaikan sebesar Rp.292.947.763.364,50 atau 18,79%. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD), Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi pendapatan-LO
Tahun anggaran 2023

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	167.370.306.971,24	128.982.399.577,54	38.387.907.393,70	29,76
2	Pendapatan Transfer	1.575.427.856.937,92	1.385.751.608.689,12	189.676.248.248,80	13,69
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	14.447.266.000,00	(14.447.266.000,00)	(100,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	109.145.400.359,00	44.261.792.637,00	64.883.607.722,00	164,59
	Jumlah	1.851.943.564.268,16	1.558.995.800.903,66	292.947.763.364,50	18,79

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 167.370.306.971,24 128.982.399.577,54

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Sanggau Tahun 2023 sebesar Rp167.370.306.971,24 dan tahun 2022 sebesar Rp128.982.399.577,54. Pendapatan Asli Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp.38.387.907.393,70 atau 29,76% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Daerah - LO	68.759.786.800,00	55.376.655.199,52	13.383.131.600,48	24,17
2	Retribusi Daerah - LO	4.537.325.527,00	5.115.041.688,00	(577.716.161,00)	(11,29)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	12.418.340.237,00	0,00	12.418.340.237,00	100,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	81.654.854.407,24	68.490.702.690,02	13.164.151.717,22	19,22
	Jumlah	167.370.306.971,24	128.982.399.577,54	38.387.907.393,70	29,76

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 68.759.786.800,00 55.376.655.199,52

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun anggaran 2023 sebesar Rp.68.759.786.800,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp.55.376.655.199,52, maka mengalami kenaikan sebesar Rp.13.386.131.600,48 atau 24,17%. Rincian pendapatan pajak daerah-LO tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pajak Hotel – LO	881.157.362,00	682.786.021,00	198.371.341,00	29,05

2	Pajak Restoran – LO	3.282.279.175,00	2.779.915.570,00	502.363.605,00	18,07
3	Pajak Hiburan – LO	44.561.590,00	39.764.229,00	4.797.361,00	12,06
4	Pajak Reklame – LO	1.149.551.922,00	1.934.386.258,82	(784.834.336,82)	(40,57)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	25.565.519.142,00	20.566.784.833,70	4.998.734.308,30	24,30
6	Pajak Air Tanah – LO	152.041.490,00	170.802.811,00	(18.761.321,00)	(10,98)
7	Pajak Sarang Burung Walet	103.497.000,00	111.484.000,00	(7.987.000,00)	(7,16)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	11.005.425.555,00	8.423.683.030,00	2.581.742.525,00	30,65
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	7.951.767.798,00	7.819.424.214,00	132.343.584,00	1,69
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	18.623.985.766,00	12.847.624.232,00	5.776.361.534,00	44,96
11	Tunggakan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO	68.759.786.800,00	55.376.655.199,52	13.383.131.600,48	24,17

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

4.537.325.527,00

5.115.041.688,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp.4.537.325.527,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp.5.115.041.688,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp.577.716.161,00) atau (11,29%). Pendapatan retribusi daerah dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum – LO	2.916.381.980,00	2.832.969.768,00	83.412.212,00	2,94
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.483.791.699,00	2.282.071.920,00	(798.280.221,00)	(34,98)
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	137.151.848,00	0,00	137.151.848,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO	4.537.325.527,00	5.115.041.688,00	(577.716.161,00)	(11,29)

Rincian lebih lanjut pendapatan retribusi daerah-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	708.383.450,00	1.133.777.000,00	(425.393.550,00)	(48,20)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	77.087.500,00	91.719.600,00	(14.632.100,00)	(15,95)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	350.660.000,00	318.575.000,00	32.085.000,00	9,88
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	631.745.690,00	116.820.000,00	514.925.690,00	440,79
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	269.575.000,00	392.325.000,00	(122.750.000,00)	(31,29)
6	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang - LO	82.920.340,00	99.073.168,00	(16.152.828,00)	(16,30)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	796.010.000,00	680.680.000,00	115.330.000,00	16,94

8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	825.695.229,00	1.276.793.875,00	(451.098.646,00)	(35,33)
9	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	172.546.000,00	690.269.940,00	(517.723.940,00)	(75,00)
10	Retribusi Terminal – LO	138.216.000,00	19.710.000,00	118.506.000,00	601,25
11	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	36.088.900,00	30.650.000,00	5.438.900,00	17,75
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	42.392.470,00	35.377.605,00	7.014.865,00	19,83
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	224.123.000,00	193.674.000,00	30.449.000,00	58,15
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	44.730.100,00	35.596.500,00	9.133.600,00	25,66
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	128.836.848,00	0,00	128.836.848,00	100,00
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.537.325.527,00	5.115.041.688,00	(577.716.161,00)	(11,29)

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba (Deviden) dari PT. Bank Pembaguan Daerah Kalbar atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp.12.418.340.237,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO tahun 2022 sebesar Rp.0,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp.12.418.340.237,00 atau 100,00%.

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.1.4 Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah

Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp.81.654.854.407,24. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp.68.490.702.690,02 mengalami kenaikan sebesar Rp.13.164.151.717,22 atau 19,22%. Rincian pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	36.869.094,00	70.518.000,00	(33.648.906,00)	(47,72)
2	Jasa Giro-LO	7.757.945.571,71	8.290.392.772,01	(532.447.200,30)	(6,42)
3	Pendapatan Denda Pajak	217.019.463,00	206.855.669,00	10.163.794,00	4,91

	Daerah-LO				
5	Pendapatan dari Pengembalian-LO	2.052.550.357,62	2.103.070.044,82	(50.519.687,20)	(2,40)
6	Pendapatan dari BLUD-LO	71.624.522.100,24	46.588.184.785,16	25.036.337.315,08	53,74
7	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehata tingkat Pertama (FKTP) – LO	0,00	11.197.629.239,70	(11.197.629.239,70)	0,00
8	Remunerasi Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	(34.052.179,33)	34.052.179,33	(68.104.358,66)	(200,00)
	Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO	81.654.854.407,24	68.490.702.690,02	13.164.151.717,22	19,22

31 Desember 2023 31 Desember 2022

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO 1.575.427.856.937,92 1.385.751.608.689,12

Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.575.427.856.937,92 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp1.385.751.608.689,12 mengalami kenaikan sebesar Rp.189.676.248.248,80 atau 13,69%. Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	1.455.582.882.445,00	1.276.225.369.680,00	179.357.512.765,00	14,05
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	0,00	14.447.266.000,00	(14.447.266.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	119.844.974.492,92	95.078.973.009,12	24.766.001.483,80	26,05
	Jumlah Pendapatan Transfer-LO	1.575.427.856.937,92	1.385.751.608.689,12	189.676.248.248,80	13,69

31 Desember 2023 31 Desember 2022

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO 1.455.582.882.445,00 1.276.225.369.680,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.455.582.882.445,00, apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat-LO tahun 2022 sebesar Rp.1.276.225.369.680,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.179.357.512.765,00 atau 14,05%. Pendapatan Transfer Pemerinath Pusat Dana Perimbangan-LO tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Pendapatan Dana Bagi Hasil -LO	355.409.199.681,00	289.763.042.941,00	65.646.156.740,00	22,66
2	Dana Alokasi Umum-LO	790.852.189.873,00	741.094.341.793,00	49.757.848.080,00	6,71
3	Dana Alokasi Khusus- Fisik - LO	113.442.789.115,00	53.772.555.906,00	59.670.233.209,00	110,97
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LO	195.878.703.776,00	191.595.429.040,00	4.283.274.736,00	2,24
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	1.455.582.882.445,00	1.276.225.369.680,00	179.357.512.765,00	14,05

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.2.1.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO	355.409.199.681,00	289.763.042.941,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO tahun 2023 sebesar Rp.355.409.199.681,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan bagi hasil-LO tahun 2022 sebesar Rp.289.763.042.941,00 mengalami penurunan sebesar Rp.65.646.156.740,00 atau 22,66%. Pendapatan Bagi Hasil-LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	DBH PBB -LO	32.819.384.000,00	164.430.650.849,00	(131.611.266.849,00)	(80,04)
2	DBH CHT-LO	23.163.850,00	4.457.425,00	18.706.425,00	419,67
3	DBH PPh Pasal 21-LO	7.456.662.000,00	7.408.935.000,00	47.727.000,00	0,64
4	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29-LO	283.607.000,00	159.171.600,00	124.435.400,00	78,18
5	DBH SDA Perikanan - LO	1.286.749.000,00	1.272.902.150,00	13.846.850,00	1,09
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent - LO	5.253.420.796,00	0,00	5.253.420.796,00	100,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty - LO	279.887.355.035,00	115.917.533.717,00	163.969.821.318,00	141,45
8	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	27.384.284.000,00	0,00	27.384.284.000,00	100,00
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH - LO	1.014.574.000,00	569.392.200,00	445.181.800,00	78,19
	Jumlah	355.409.199.681,00	289.763.042.941,00	65.646.156.740,00)	22,66

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum-LO	790.852.189.873,00	741.094.341.793,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO tahun 2023 sebesar Rp.790.852.189.873,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp.741.094.341.793,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.49.757.848.080,00 atau 6,71% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	790.852.189.873,00	741.094.341.793,00	49.757.848.080,00	6,71
	Jumlah Dana Alokasi Umum-LO	790.852.189.873,00	741.094.341.793,00	49.757.848.080,00	6,71

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus Fisik-LO	113.442.789.115,00	53.772.555.906,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik-LO tahun 2023 sebesar Rp.113.442.789.115,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik-LO tahun 2022 sebesar Rp.53.772.555.906,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.59.670.233.209,00 atau 110,97%. Dana Alokasi Khusus-Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik-LO	113.442.789.115,00	53.772.555.906,00	59.670.233.209,00	110,97
	Jumlah Dana Alokasi Khusus-Fisik -LO	113.442.789.115,00	53.772.555.906,00	59.670.233.209,00	110,97

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO	195.878.703.776,00	191.595.429.040,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik-LO tahun 2023 sebesar Rp.195.878.703.776,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik-LO tahun 2022 sebesar Rp.191.595.429.040,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.4.283.274.736,00 atau 2,24%. Dana Alokasi Khusus-Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik-LO	195.878.703.776,00	191.595.429.040,00	4.283.274.736,00	2,24
	Jumlah Dana Alokasi Khusus-Non Fisik -LO	195.878.703.776,00	191.595.429.040,00	4.283.274.736,00	2,24

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer 0,00 14.447.266.000,00
Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2023 sebesar Rp.0,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2022 sebesar Rp.14.447.266.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.14.447.266.000,00 atau 100,00%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Dana Insentif Daerah-LO	0,00	14.447.266.000,00	(14.447.266.000,00)	(100,00)
2	Dana Otonomi Khusus-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	0,00	14.447.266.000,00	(14.447.266.000,00)	(100,00)

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar 119.844.974.492,92 95.078.973.009,12
Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp.119.844.974.492,92 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp.95.078.973.009,12 mengalami kenaikan sebesar Rp.24.766.001.483,80 atau 26,05%. Pendapatan Transfer Antar Daerah tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	117.398.055.002,92	93.431.687.141,12	23.966.367.861,80	25,65
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	2.446.919.490,00	1.647.285.868,00	799.633.622,00	48,54
	Jumlah Pendapatan Transfer	119.844.974.492,92	95.078.973.009,12	24.766.001.483,80	26,05

Antar Daerah-LO				
-----------------	--	--	--	--

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

31 Desember 2023

109.145.400.359,00

31 Desember 2022

44.261.792.637,00

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp.109.145.400.359,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada tahun 2022 sebesar Rp.44.261.792.637,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.64.883.607.722,00 atau 146,59%. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah-LO dan Lain-Lain Pendapatan-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	109.145.400.359,00	44.261.792.637,00	64.883.607.722,00	146,59
2	Pendapatan Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	109.145.400.359,00	44.261.792.637,00	64.883.607.722,00	146,59

31 Desember 2023

109.145.400.359,00

31 Desember 2022

44.261.792.637,00

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah-LO tahun 2023 sebesar Rp.109.145.400.359,00 apabila dibandingkan dengan pendapatan hibah-LO tahun 2022 sebesar Rp.44.261.792.637,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.64.883.607.722,00 atau 146,59 %. Rincian pendapatan hibah diantaranya sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat (Air Minum Pedesaan) -LO	19.850.000,00	1.917.038.310,00	(1.897.188.310,00)	(98,96)
2	Hibah Tanah Untuk Pembangunan Tower	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
3	Hibah Peralatan dan Mesin Berupa Peralatan TIK (SMP)	0,00	818.032.500,00	(818.032.500,00)	(100,00)
4	Hibah Peralatan dan Mesin Berupa Sepeda Motor	0,00	30.839.000,00	(30.839.000,00)	(100,00)
5	Hibah Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan dan Peralatan Bantuan Bencana	0,00	719.066.714,00	(719.066.714,00)	(100,00)
6	Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan Berupa PLTS	0,00	2.735.450.363,00	(2.735.450.363,00)	(100,00)
7	Hibah jalan, Irigasi dan Jaringan		24.506.206.750,00	16.712.166.294,00	68,20
8	Renovasi Kawasan Waterfront Sanggau	7.869.254.500,00	0,00	7.869.254.500,00	100,00
9	Pekerjaan Peningkatan PSD Kota Balai Karangan	11.006.000.000,00	0,00	11.006.000.000,00	100,00
10	Pembangunan Jalan Poros Desa	14.836.135.000,00	0,00	14.836.135.000,00	100,00

	Suruh Tembawang				
11	Jembatan Gantung Kuala Buayan	7.506.983.544,00	0,00	7.506.983.544,00	100,00
12	Hibah jalan, Irigasi dan Jaringan		13.533.759.000,00	11.770.336.422,00	86,97
13	Perbaikan IPA SPAM BANPRO di Tayan Hulu	968.000.000,00	0,00	968.000.000,00	100,00
14	Pembuatan IPA di Kec. Mukok	6.608.993.822,00	0,00	6.608.993.822,00	100,00
15	Pengadaan dan Pemasangan jaringan Perpipaan di Tayan Pulau	271.996.900,00	0,00	271.996.900,00	100,00
16	Pengadaan dan Pemasangan jaringan Perpipaan di Semanggis Raya	818.544.000,00	0,00	818.544.000,00	100,00
17	Pembangunan SPAM di Desa Semanggis Raya	733.956.500,00	0,00	733.956.500,00	100,00
18	Penataan Kawasan Keraton Tayan Hilir	15.902.604.200,00	0,00	15.902.604.200,00	100,00
19	Hibah Gedung dan Bangunan	796.753.000,00	0,00	796.753.000,00	100,00
20	Dermaga Sungai Tayan Tahap I (SDP Kalbar)	24.869.677.000,00	0,00	28.428.361.000,00	100,00
21	Dermaga Sungai Tayan (2016)	3.558.684.000,00	0,00		100,00
22	Peralatan dan Mesin (BPBD)	738.174.000,00	0,00	738.174.000,00	100,00
23	SD Negeri 25 Danau Teluk Kec. Tayan Hilir	3.478.178.883,00	0,00	3.478.178.883,00	100,00
24	Rehabilitasi dan Renovasi SD Negeri 01 Empaong Kec. Parindu	3.370.052.143,00	0,00	3.370.052.143,00	100,00
25	Rehabilitasi dan Renovasi SD Negeri 19 Emporas Kec. Jangkang	3.297.190.091,00	0,00	3.297.190.091,00	100,00
26	Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa BHP	115.424.308	0,00	115.424.308	100,00
27	Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	2.332.178.468	0,00	2.332.178.468	100,00
28	Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Laptop pada Dinas Kesehatan	46.770.000	0,00	46.770.000	100,00
	Jumlah Pendapatan Hibah-LO	109.145.400.359,00	44.261.792.637,00	64.883.607.722,00	146,59

Penjelasan atas Pendapatan Hibah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Sebesar Rp.19.850.000,00, merupakan Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Berupa Hibah Air Minum Pedesaan-LO tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.19.850.000,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat Melalui Kementerian PUPR yang disalurkan untuk mencukupi cakupan pelayanan air minum perpipaan di kawasan pedesaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.
2. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Berupa Renovasi Kawasan Waterfront Sanggau kepada Dinas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau sebesar Rp.7.869.254.500,00

3. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Pekerjaan Peningkatan PSD Kota Balai Karangan sebesar Rp.11.006.000.000,00.
4. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Pembangunan Jalan Poros Desa Suruh Tembawang sebesar Rp.14.836.135.000,00.
5. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Jembatan Gantung Kuala Buayan sebesar Rp.7.506.983.544,00.
6. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Perbaikan IPA SPAM BANPRO di Tayan Hulu sebesar Rp.968.000.000,00.
7. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Pembuatan IPA di Kec. Mukok sebesar Rp.6.608.993.822,00.
8. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Pengadaan dan Pemasangan jaringan Perpipaan di Tayan Pulau sebesar Rp.271.996.900,00
9. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Pengadaan dan Pemasangan jaringan Perpipaan di Semanggis Raya sebesar Rp.818.544.000,00.
10. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Pembangunan SPAM di Desa Semanggis Raya sebesar Rp.733.956.500,00
11. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Penataan Kawasan Keraton Tayan Hilir sebesar Rp.15.902.604.200,00
12. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp.796.753.000,00
13. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Dermaga Sungai Tayan Tahap I (SDP Kalbar) sebesar Rp.24.869.677.000,00
14. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Dermaga Sungai Tayan sebesar Rp.3.558.684.000,00;
15. Pendapatan Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.738.174.000,00;
16. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa SD Negeri 25 Danau Teluk Kec. Tayan Hilir sebesar Rp.3.478.178.883,00;
17. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Rehabilitasi dan Renovasi SD Negeri 01 Empaong Kec. Parindu sebesar Rp.3.370.052.143,00;
18. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Rehabilitasi dan Renovasi SD Negeri 19 Emporas Kec. Jangkang sebesar Rp.3.297.190.091,00
19. Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa BHP sebesar Rp115.424.308,00;

20. Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.332.178.468,00; dan

21. Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Laptop pada Dinas Kesehatan sebesar Rp46.770.000,00.

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan-LO

0,00

0,00

Lain-lain pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan dengan Lain-lain pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp.00,00 terjadi penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Pendapatan Hibah BOS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00)	0,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) DAK Nonfisik terdiri atas: a. Dana BOSP; b. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah; c. Dana BOK; dan d. DAK Nonfisik Jenis Lainnya. (2) Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Dana BOS, yang terdiri atas: 1. Dana BOS Reguler; dan 2. Dana BOS Kinerja. Sehingga mekanisme penganggaran Dana BOS tahun 2023 disesuaikan dan masuk sebagai komponen Pendapatan DAK-Non Fisik, tidak lagi dianggarkan sebagai Pendapatan Hibah BOS pada Lain-Lain Pendapatan. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat Saldo Lain-Lain Pendapatan (Pendapatan Hibah BOS-LO).

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.2 Beban – LO

1.645.628.698.819,19

1.394.341.255.428,18

Beban-LO tahun 2023 sebesar Rp1.645.628.698.819,19 apabila dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2022 sebesar Rp1.394.341.255.428,18 mengalami kenaikan sebesar Rp.251.287.443.391,01 atau 18,02%. Rincian Beban-LO sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Operasi	1.300.573.561.695,96	1.120.781.936.715,02	179.791.624.980,94	16,04
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	229.585.200.890,23	183.165.402.347,16	46.419.798.543,07	25,34
3	Beban Transfer	111.693.953.133,00	89.964.803.317,00	21.729.149.816,00	24,15
4	Beban Tak terduga	3.775.983.100,00	429.113.049,00	3.346.870.051,00	779,95

	Jumlah Beban	1.645.628.698.819,19	1.394.341.255.428,18	251.287.443.391,01	18,20
--	---------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------

Rincian penjelasan lebih lanjut dari beban-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1 Beban Operasi	1.300.573.561.695,96	1.120.781.936.715,02

Beban Operasi-LO tahun 2023 sebesar Rp.1.300.573.561.695,96 apabila dibandingkan dengan Beban Operasi-LO tahun 2022 sebesar Rp.1.120.781.936.715,02 mengalami kenaikan sebesar Rp.179.791.624.980,94 atau 16,04 %. Rincian Beban Operasi-LO tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Pegawai	542.046.638.546,50	538.395.089.489,50	3.651.549.057,00	0,68
2	Beban Persediaan	417.404.057.147,14	272.228.091.767,47	145.175.965.379,67	29,96
3	Beban Jasa	151.847.570.033,54	157.030.233.955,13	(5.182.663.921,59)	(1,78)
4	Beban Pemeliharaan	15.926.960.469,56	18.550.293.472,81	(2.623.333.003,25)	(14,14)
5	Beban Perjalanan Dinas	54.200.769.224,00	51.695.866.285,00	2.504.902.939,00	4,85
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	35.332.420.372,99	27.434.761.778,98	7.897.658.594,01	28,79
7	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Subsidi	3.000.000.000,00	7.082.553.900,00	(4.082.553.900,00)	(57,64)
9	Beban Hibah	76.935.794.562,00	43.243.419.556,00	33.692.375.006,00	77,91
10	Beban Bantuan Sosial	1.940.000.000,00	2.394.400.000,00	(454.400.000,00)	(18,98)
11	Beban Penyisihan Piutang	1.939.351.340,23	2.022.693.400,49	(83.342.060,26)	(4,12)
12	Beban Lain-Lain	0,00	704.533.109,64	(704.533.109,64)	(100,00)
	Jumlah Beban Operasi-LO	1.300.573.561.695,96	1.120.781.936.715,02	179.791.624.980,94	10,59

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1.1 Beban Pegawai - LO	542.046.638.546,50	538.359.089.489,50

Beban Pegawai-LO tahun 2023 sebesar Rp.542.046.638.546,50 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2022 sebesar Rp.538.395.089.489,50 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.651.549.057,00 atau 0,68%. Rincian Beban Pegawai-LO tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	338.900.553.422,00	327.209.309.045,00	11.691.244.377,00	3,57
2	Beban Tambahan Penghasilan	90.650.304.830,50	94.058.120.472,50	(3.407.815.642,00)	(3,62)

	ASN				
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	86.201.971.203,00	91.669.879.129,00	(5.467.907.926,00)	(5,96)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.257.498.154,00	23.127.761.249,00	129.736.905,00	0,56
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	641.654.408,00	656.649.906,00	(14.995.498,00)	(2,28)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	719.500.000,00	719.500.000,00	0,00	0,00
7.	Beban Pegawai BLUD	1.675.156.529,00	953.869.688,00	721.286.841,00	75,62
	Jumlah Beban Pegawai - LO	542.046.638.546,50	538.395.089.489,50	3.651.549.057,00	0,68

31 Desember 2023 (Rp) 31 Desember 2022 (Rp)

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa - LO 674.711.777.247,23 526.939.247.259,39

Beban Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp674.711.777.247,23 apabila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp.526.939.247.259,39 terjadi kenaikan sebesar Rp147.772.529.987,84 atau 28,04%. Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 terdiri dari Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Persediaan	417.404.057.147,14	272.228.091.767,47	145.175.965.379,67	53,33
2	Beban Jasa	151.847.570.033,54	157.030.233.955,13	(5.182.663.921,59)	(3,30)
3	Beban Pemeliharaan	15.926.960.469,56	18.550.293.472,81	(2.623.333.003,25)	(14,14)
4	Beban Perjalanan Dinas	54.200.769.224,00	51.695.866.285,00	2.504.902.939,00	4,85
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	35.332.420.372,99	27.434.761.778,98	7.897.658.594,01	28,79
	Jumlah Beban	674.711.777.247,23	526.939.247.259,39	147.772.529.987,84	28,04

31 Desember 2023 31 Desember 2022

5.4.2.1.2.1 Beban Persediaan - LO 417.404.057.147,14 272.228.091.767,47

Beban Persediaan-LO tahun 2023 sebesar Rp.417.404.057.147,14 apabila dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO tahun 2022 sebesar Rp.272.228.091.767,47 terjadi kenaikan sebesar Rp.145.175.965.379,67 atau 53,33%. Beban Persediaan-LO tahun anggaran 2023 terdiri dari Beban Barang Jasa-BLUD, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, dan Beban Makanan Minuman/Barang Pakai Habis dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	14.912.336.515,43	13.871.352.073,51	1.049.984.441,92	7,57
2	Beban Persediaan Bahan/Material	7.292.547.584,62	7.187.254.834,25	105.292.750,37	1,46
3	Beban Cetak dan Penggandaan	-	-	-	0,00
4	Beban Makanan dan Minuman	24.744.157.932,21	20.644.283.269,19	4.099.874.663,02	19,86
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	901.603.544,00	1.662.222.611,00	(760.619.067,00)	(45,76)
6	Beban Pakaian Kerja	45.878.450,00	94.305.407,00	(48.426.957,00)	(51,35)
7.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	544.540.424,00	1.641.652.680,00	(1.097.112.256,00)	(66,83)
8	Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	227.702.965.938,71	89.497.230.536,27	138.205.735.402,44	154,42
9	Beban Barang Pakai Habis	1.009.336.952,00	1.013.292.396,00	(3.955.444,00)	(0,39)
10	Beban Barang Tak Pakai Habis	-	355.478,00	(355.478,00)	(100,00)
11	Beban Barang Jasa BLUD	66.603.458.360,69	63.095.158.127,20	3.508.300.233,49	5,56
12	Beban Barang Jasa BOS	63.337.005.563,48	62.979.266.958,05	357.738.605,43	0,57
13	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.301.225.882,00	10.541.717.397,00	(240.491.515,00)	(2,28)
	Jumlah Beban Pegawai - LO	417.404.057.147,14	272.228.091.767,47	145.175.965.379,67	53,33

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa - LO **353.788. 935.815,23** **272.228.091.767,47**

Beban Jasa-LO tahun 2023 sebesar Rp.151.847.570.033,54, apabila dibandingkan dengan Beban Jasa-LO tahun 2022 sebesar Rp.157.030.233.955,13 mengalami penurunan sebesar Rp.5.182.663.921,59 atau 30,30%. Rincian Beban Jasa-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	86.856.589.097,00	96.785.098.482,00	(9.928.509.385,00)	(10,26)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	23.204.780.991,25	22.752.750.733,57	452.030.257,68	1,99
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.770.952.085,00	1.397.650.132,00	2.373.301.953,00	169,81
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.698.026.445,30	2.013.684.141,56	684.342.303,74	33,98
5	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	137.465.571,00	155.476.328,00	(18.010.757,00)	(11,58)
6	Beban Sewa Aset tetap Lainnya	3.000.000,00	0,00	3.000.000,000	100,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	199.500.000,00	0,00	199.500.000,00	100,00

8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	16.167.172.577,99	19.527.633.329,00	(3.360.460.751,01)	(17,21)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.895.288.023,00	5.787.296.440,00	3.107.991.583,00	53,70
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	394.950.000,00	630.419.000,00	(235.469.000,00)	(37,35)
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	908.250.000,00	655.600.000,00	252.650.000,00	38,54
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.611.595.243,00	7.324.625.369,00	1.286.969.874,00	17,57
	Jumlah Beban Jasa - LO	151.847.570.033,54	157.030.233.955,13	(5.182.663.921,59)	(3,30)

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan - LO

15.926.960.469,56 18.550.293.472,81

Beban Pemeliharaan-LO tahun 2023 sebesar Rp.15.926.960.469,56 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Pemeliharaan-LO tahun 2022 sebesar Rp.18.550.293.472,81 mengalami penurunan sebesar Rp.2.623.333.003,25 atau 14,14%. Rincian Beban Pemeliharaan-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	455.632.337,40	(455.632.337,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.582.936.041,00	6.545.605.890,00	(962.669.849,00)	(14,71)
3	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1.782.003.428,56	1.053.573.045,41	728.430.383,15	69,14
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	8.562.021.000,00	10.495.482.200,00	(1.933.461.200,00)	(18,42)
	Jumlah Beban Pemeliharaan - LO	15.926.960.469,56	18.550.293.472,81	(2.623.333.003,25)	(14,14)

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas - LO

31 Desember 2023

31 Desember 2022

54.200.769.224,00 51.695.866.285,00

Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2023 sebesar Rp.54.200.769.224,00 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2022 sebesar Rp.51.695.866.285,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.504.902.939,00 atau 4,85%.

5.4.2.1.2.5 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - LO

31 Desember 2023

31 Desember 2022

35.332.420.372,99 27.434.761.778,98

Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor tahun 2023 sebesar Rp.35.332.420.372,99 apabila dibandingkan dengan Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor tahun 2022 sebesar Rp.27.434.761.778,98 terjadi kenaikan sebesar Rp.7.897.658.594,01 atau

28,79%. Rincian Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.226.795.109,00	6.099.029.482,08	(2.872.234.373,08)	(47,09)
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.575.977.234,00	695.301.992,00	3.880.675.242,00	558,13
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13.815.276.816,00	10.047.946.362,90	3.767.330.453,10	37,49
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	336.335.720,00	(61.797.081,00)	398.132.801,00	100,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.834.300.225,00	2.540.720.489,00	293.579.736,00	11,55
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.038.153.203,00	2.545.775.367,00	(1.507.622.164,00)	(59,22)
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.037.913.969,99	4.266.932.676,50	1.770.981.293,49	41,50
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.567.312.309,00	20.488.152,00	1.546.824.157,00	7.549,85
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	396.000,00	(396.000,00)	(100,00)
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	630.017.035,00	53.726.250,00	576.290.785,00	1.072,64
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	350.823.450,00	149.022.271,00	201.801.179,00	135,42
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	919.515.302,00	1.077.219.817,50	(157.704.515,50)	(14,82)
	Jumlah Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatasn kantor - LO	35.332.420.372,99	27.434.761.778,98	7.897.658.594,01	28,79

Rincian Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor tahun 2023 per SKPD sebagai berikut:

No.	Uraian Nama SKPD	Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.442.268.043,00
2	Dinas Kesehatan	1.395.753.508,00
3	RSUD M.Th.Djaman	155.615.026,00
	Dinas Kesehatan - BLUD	19.260.767,00

4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	772.366.773,00
5	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	661.140.970,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	824.176.687,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	816.926.907,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB	849.324.317,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	194.469.382,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	537.012.726,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	403.180.383,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	970.881.265,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	349.640.766,00
14	Dinas Perhubungan	5.030.620.978,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	186.002.729,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	290.774.428,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	298.537.613,00
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.591.525.995,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	311.442.542,00
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan	346.084.216,00
21	Sekretariat Daerah	5.290.880.315,00
22	Sekretariat DPRD	3.700.603.558,99
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	938.194.442,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.080.692.428,00
25	Badan Pendapatan Daerah	959.105.728,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	834.166.657,00
27	Inspektorat	186.776.680,00
28	Kecamatan Kapuas	271.139.865,00
29	Kecamatan Mukok	86.939.279,00
30	Kecamatan Noyan	99.556.645,00
31	Kecamatan Jangkang	52.767.160,00
32	Kecamatan Bonti	116.514.613,00
33	Kecamatan Beduai	101.239.991,00
34	Kecamatan Sekayam	129.420.540,00
35	Kecamatan Kembayan	71.632.250,00
36	Kecamatan Parindu	141.770.600,00
37	Kecamatan Tayan Hulu	75.475.820,00
38	Kecamatan Tayan Hilir	42.399.368,00
39	Kecamatan Balai	65.812.920,00
40	Kecamatan Toba	35.264.669,00
41	Kecamatan Meliau	50.570.495,00
42	Kecamatan Entikong	141.919.220,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	412.571.108,00
Jumlah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		35.332.420.372,99

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1.3 Beban Bunga - LO	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Beban Bunga-LO tahun 2023 dan 2022.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1.4 Beban Subsidi - LO	3.000.000.000,00	7.082.553. 900,00

Beban Subsidi-LO tahun 2023 sebesar Rp.3.000.000.000,00 apabila dibandingkan dengan Beban Subsidi-LO tahun 2022 sebesar Rp.7.082.553.900,00, terjadi penurunan sebesar Rp.4.082.553.900,00 atau 57,64%. Beban subsidi tahun 2023 merupakan beban subsidi yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Swasta.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
9.1.9 Beban Hibah - LO	76.935.794.562,00	43.243.419.556,00

Beban Hibah-LO tahun 2023 sebesar Rp.76.935.794.562,00 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Hibah-LO tahun 2022 sebesar Rp.43.243.419.556,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.33.692.375.006,00 atau 77,91%. Rincian Beban Hibah-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	22.852.306.400,00	0,00	22.852.306.400,00	100,00
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	43.270.103.503,00	35.030.754.300,00	8.239.349.203,00	23,52
4	Beban Hibah Dana BOS	8.808.336.659,00	6.107.617.256,00	2.700.719.403,00	44,22
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.005.048.000,00	2.005.048.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Hibah– LO	76.935.794.562,00	43.243.419.556,00	33.692.375.006,00	77,91

Penjelasan lebih lanjut mengenai Beban Hibah–LO Tahun 2023 sebesar Rp.76.935.794.562,00 adalah sebagai berikut:

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 sebesar Rp.0,00.

2. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp.22.852.306.400,00 terdiri dari:

- a. Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebesar Rp.16.857.141.600,00 sesuai NPHD antara Bupati Sanggau dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 1119/PR-07-NK/6103/2023, Tanggal 2 November 2023.
- b. Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebesar Rp.5.995.164.800,00 sesuai NPHD antara Bupati

Sanggau dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 132/KU.00/K.KN-10/11/2023, Tanggal 2 November 2023.

3. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.43.270.103.503,00 terdiri dari:

1. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.17.246.210.000,00
2. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Sebesar Rp.2.610.959.000,00
3. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.23.412.934.503,00.

4. Beban Hibah Dana BOS

Beban hibah dana BOS sebesar Rp.8.808.336.659,00 merupakan Beban Hibah Uang Dana BOS tahun 2023 yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta.

5. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2023 sebesar Rp.2.005.048.000,00 merupakan beban hibah kepada Partai Politik yang ada di Kabupaten Sanggau.

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.940.000.000,00	2.394.400.000,00

Beban Bantuan Sosial-LO tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.940.000.000,00 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Bantuan Sosial-LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp.2.394.400.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.454.400.000,00 atau 18,98%. Beban Bantuan Sosial-LO tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu. Lebih lanjut rincian Beban Bantuan Sosial-LO tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu-LO	1.940.000.000,00	2.394.400.000,00	(454.400.000,00)	(18,98)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-LO				
	Jumlah Beban Bantuan Sosial – LO	1.940.000.000,00	2.394.400.000,00	(454.400.000,00)	(18,98)

5.4.2.2 Beban Penyisihan Piutang-LO **31 Desember 2023** **1.939.351.340,23** **31 Desember 2022** **2.022.693.400,49**

Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2023 sebesar Rp.1.939.351.340,23 apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2022 sebesar Rp.2.022.693.400,49 mengalami penurunan sebesar Rp.83.342.060,26 atau 4,12%. Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	1.939.351.340,23	2.022.693.400,49	(83.342.060,26)	(4,12)
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang -LO	1.939.351.340,23	2.022.693.400,49	(83.342.060,26)	(4,12)

5.4.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO **31 Desember 2023** **229.585.200.890,23** **31 Desember 2022** **183.165.402.437,49**

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2023 sebesar Rp.229.585.200.890,23 apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp.183.165.402.437,15 mengalami penurunan sebesar Rp.46.419.798.543,07 atau 25,34%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.357.177.814,35	54.297.222.459,31	4.059.955.355,04	7,48
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	77.468.567.430,57	56.293.825.670,83	21.174.741.759,74	37,61
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	92.845.061.608,58	72.110.949.156,64	20.734.112.451,93	28,75
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(65.930.272,25)	0,00	(65.930.272,25)	(100,00)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	980.324.308,98	463.405.060,37	516.919.248,61	111,55
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	229.585.200.890,23	183.165.402.347,15	46.419.798.543,07	25,34

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**

5.4.2.4 Beban Transfer

111.693.953.133,00

89.964.803.317,00

Beban Transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp.111.693.953.133,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp.90.214.803.317,00 mengalami penurunan sebesar Rp.21.729.149.816,00 atau 24,15%. Rincian Beban Transfer-LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.652.517.600,00	4.231.631.600,00	420.886.000,00	9,95
2.	Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Desa	565.293.500,00	575.283.600,00	(9.990.100,00)	(1,74)
3.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
4.	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	106.476.142.033,00	84.907.888.117,00	21.568.253.916,00	25,40
	Jumlah Beban Transfer-LO	111.693.953.133,00	89.964.803.317,00	21.729.149.816,00	24,15

Penjelasan lebih lanjut mengenai Beban Transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp.111.693.953.133,00 adalah sebagai berikut:

1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa-LO

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp.4.652.517.600,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp.4.231.631.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.420.886.000,00 atau 9,95%. Beban Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Alokasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa selama Tahun 2023.

2. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp.565.293.500,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp.575.283.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp.9.990.100,00 atau 1,74%. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa-LO, merupakan Beban Transfer Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa selama Tahun 2023.

3. Beban Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah-LO

Beban Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp.0,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp.250.000.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp.250.000.000,00 atau 100,00%.

4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO Tahun 2023 sebesar Rp.106.476.142.033,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO Tahun 2022 sebesar Rp.84.907.888.117,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.21.568.253.916,00 atau 25,40%. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan Beban Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan untuk Desa Persiapan dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	105.409.590.193,00
2	Bantuan Keuangan untuk Desa Persiapan	1.066.551.840,00
Jumlah Beban Bantuan Keuangan ke Desa-LO		106.476.142.033,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2.5 Beban Tak Terduga	3.775.983.100,00	429.113.049,00

Beban Tak Terduga-LO Tahun 2023 sebesar Rp.3.775.983.100,00 apabila dibandingkan dengan Beban Tak Terduga-LO Tahun 2022 sebesar Rp.429.113.049,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.346.870.051,00 atau 779,959%. Rincian Beban Tak Terduga Tahun 2023 merupakan beban Belanja yang diperuntukan dalam penanganan Bencana (Batingsor), Bencana (Karhutla), Kejadian Luar Biasa (DBD), Pengembalian Pajak, dan Bantuan Sosial Tidak Terencana dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI
1	Penanganan Bencana (Batingsor)	130.000.000,00
2	Penanganan Bencana (Karhutla)	300.741.952,00
3	Penanganan KLB (DBD)	3.078.028.758,00
4	Bantuan Sosial Tidak Terencana	262.670.190,00
5	Pengembalian Pajak	4.542.200,00
	Jumlah Beban Tak Terduga-LO	3.775.983.100,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Surplus/Defisit dari Operasi	206.314.865.448,97	164.654.545.475,48

Surplus Kegiatan Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp.206.314.865.448,97 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023
1	Pendapatan-LO	1.851.943.564.268,16
2	Beban	1.645.628.698.819,19
	Surplus dari Kegiatan Operasional (1-2)	206.314.865.448,97

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.3.1 Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	206.347.059,82	622.829.700,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp.206.347.059,82 apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp.622.829.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp.416.482.640,18 atau 66,87%.

NO	URAIAN	REALISASI
1	Penyisihan piutang yang telah dibayar pada Tahun 2023 pada Disperindag dan Setda	24.382.000,00
2	Perhitungan Penyisihan Pajak Mineral Bukan Logam	868.440,00
3	Perhitungan Penyisihan Pajak Restoran	1.250,00
4	Perhitungan Penyisihan Pajak PBB-P2	163.047.821,07
5	Perhitungan Penyisihan Pajak Hotel	17.305.145,00
6	Perhitungan Penyisihan Pajak Reklame	742.403,75
	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO	206.347.059,82

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.3.2 Defisit dari kegiatan Non Operasional	3.548.936.276,47	11.579.011.165,83

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp.3.548.936.276,47 apabila dibandingkan dengan jumlah defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp.11.579.011.165,83 mengalami penurunan sebesar Rp.8.030.074.889,36 atau 69,35%. Defisit dari Kegiatan Non Operasional tersebut berasal dari penghapusan aset pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	258.153.199,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	684.445.874,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	142.200.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	364.022.411,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	920.599.502,90
6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	79.860.000,00
7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	246.555.669,71
8	Kecamatan Tayan Hilir	176.442.419,86
9	Sekretariat Daerah	676.657.200,00
	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional -LO	3.548.936.276,47

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Defisit dari kegiatan Non Operasional	(3.548.936.276,47)	(10.956.181.465,83)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah selisih surplus dan defisit dari kegiatan non operasional. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalami

defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp3.342.589.216,65, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

NO	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Surplus Non Operasional	206.347.059,82	622.829.700,00
2	Defisit Non Operasional	(3.548.936.276,47)	11.579.011.165,83
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (1-2)	(3.342.589.216,65)	(10.956.181.465,83)

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	202.972.276.232,32	153.698.364.009,65

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp.202.972.276.232,32 merupakan Jumlah dari perhitungan selisih Surplus dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp206.314.865.448,97 dikurangi Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.342.589.216,65. Jika dibandingkan dengan surplus sebelum pos luar biasa Tahun 2022 sebesar Rp153.698.364.009,65 terjadi kenaikan sebesar Rp49.273.912.222,67 atau 32,06%.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.4.1 Pos Luar Biasa	0,00	0,00

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang mengalami serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa. Penjelasan lebih lanjut dari Pos Luar Biasa dan Beban Luar Biasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo pada Pendapatan Luar biasa Tahun 2023 dan 2022.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.4.2 Beban Luar Biasa	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo pada Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00

Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp.0,00 dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 0,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Surplus Laporan Operasional	202.972.276.232,32	153.698.364.009,65

Surplus - LO Tahun 2023 sebesar Rp.202.972.276.232,32 apabila dibandingkan dengan Surplus - LO Tahun 2022 sebesar Rp. 153.698.364.009,66 mengalami kenaikan sebesar Rp.49.273.912.222,67 atau 32,06%. Surplus/Defisit-LO diperoleh dengan perhitungan: (Surplus/Defisit dari Operasi + Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional + Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus/Defisit dari Operasi	206.314.865.448,97	164.654.545.475,48	41.660.319.973,49	25,30
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.342.589.216,65)	(10.956.181.465,83)	7.613.592.249,18	69,49
3	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		202.972.276.232,32	153.698.364.009,65	49.273.912.222,67	69,25

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas pada tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal	1 Januari 2023	1 Januari 2022
	3.431.508.398.250,49	3.239.619.674.250,51

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp.3.431.508.398.520,49 sesuai jumlah Ekuitas dalam Neraca dan Ekuitas Akhir di Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 (*Audited*).

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.6.2. Surplus/ (Defpisti (LO))	202.972.276.232,32	153.698.364.009,66

Surplus / (Defisit) - LO sebesar Rp202.972.276.232,32 merupakan Surplus sesuai Laporan Operasional Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional	206.314.865.448,97
2.	Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(3.342.589.216,65)
3.	Surplus/ Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00
	Jumlah Surplus/(Defisit)-LO	202.972.276.232,32

5.6.3. Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
---	-------------------------	-------------------------

17.784.502.222,00

38.190.360.260,32

No.	Uraian	31 Desember 2023
1.	Koreksi Saldo Awal Kas	(20.001,00)
2.	Koreksi Saldo Awal Piutang	(8.771.392,95)
3.	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	17.613.418.816,55
4.	Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya	179.874.799,40
	Jumlah Koreksi Saldo Awal	17.784.502.222,00

31 Desember 2023 (Rp)

31 Desember 2022 (Rp)

5.6.3.1 Koreksi Kas**(20.001,00)****8.569.027,74**

Koreksi kurang atas saldo awal Kas di Bendahara BLUD TA 2023 sebesar Rp20.001,00 merupakan koreksi atas pencatatan ganda penerimaan pada Kas di Bendahara BLUD di Tahun 2022.

31 Desember 2023 (Rp)

31 Desember 2022 (Rp)

5.6.3.2 Koreksi Piutang**(8.771.392,95)****494.316.300,33**

Koreksi kurang atas saldo Piutang sebesar Rp8.771.392,95 merupakan koreksi lebih saji saldo awal karena sudah terdapat pembayaran atas Piutang Pajak pada Tahun sebelumnya sebesar Rp8.796.000,00. Selain itu terdapat koreksi lebih atas saldo penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada BLUD yang merupakan nilai penyisihan piutang yang telah terbayar sebesar Rp24.607,05. Sehingga terdapat koreksi sebesar Rp8.771.392,95 (Rp8.796.000,00 - Rp24.607,05). Rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023
1.	Koreksi Saldo Awal Piutang Minerba	(8.596.000,00)
2.	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak Restoran	(200.000,00)
3.	Koreksi Saldo Penyisihan Piutang – BLUD	24.607,05
	Jumlah Koreksi Saldo Awal	(8.771.392,95)

31 Desember 2023 (Rp)

31 Desember 2022 (Rp)

5.6.3.3 Koreksi Aset Tetap**17.613.418.816,55****0,00**

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp17.613.418.816,55 dengan perhitungan sebagai berikut :

Koreksi Tambah Rp. 18.041.749.415,00

Koreksi Kurang Rp. (428.330.598,45)

Koreksi Aset Tetap Rp. 17.613.418.816,55

Koreksi tambah sebesar Rp18.041.749.415,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Koreksi nilai awal Aset Tetap Tanah yang bernilai Rp1,00 atau Rp0,00 berdasarkan hasil penilaian oleh KPKNL pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan penyesuaian NJOP pada 16 SKPD.	Rp.	18.041.749.415,00
----	--	-----	-------------------

Koreksi kurang sebesar Rp428.330.598,45 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Kas pada Pemerintah Kabupaten sanggau dalam tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	351.569.193.842,53	126.092.019.606,77
Arus Kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi yang ditujukan untuk kegiatan Operasional Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2023. Lebih lanjut rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:		
5.5.1.1 Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	65.463.342.881,00	54.173.834.811,70
Pendapatan Retribusi Daerah	4.513.350.527,00	5.122.541.688,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.418.340.237,00	9.601.021.628,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.776.256.309,57	89.627.417.680,69
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	40.582.816.850,00	61.389.336.670,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam	309.572.962.035,00	117.759.828.067,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	790.852.189.873,00	741.094.341.793,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	309.321.492.891,00	245.367.984.946,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah	0,00	14.447.266.000,00
Pendapatan Dana Desa	157.083.453.900,00	150.973.782.800,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.853.873.554,35	97.010.459.897,28
Bantuan Keuangan	2.446.919.490,00	1.647.285.868,00
Pendapatan Hibah	19.850.000,00	1.917.038.310,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.888.904.848.547,92	1.590.132.140.159,67
5.5.1.2 Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	542.035.779.176,50	538.395.089.489,50
Belanja Barang dan Jasa	643.699.925.833,89	631.556.958.441,40
Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	7.082.553.900,00
,Belanja Hibah	72.966.664.562,00	43.243.419.556,00
Belanja Bantuan Sosial	1.940.000.000,00	2.394.400.000,00
Belanja Tak Terduga	4.915.878.100,00	429.113.049,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.217.811.100,00	4.806.915.200,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	263.559.595.933,00	236.131.670.917,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.537.335.654.705,39	1.464.040.120.552,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	351.569.193.842,53	126.092.019.606,77
	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(301.577.820.532,16)	(227.755.624.199,83)
Aset Non keuangan		

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Pencairan Dana Cadangan	22.852.306.896,00	0,00
Hasil Penjualan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua - LRA	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat - LRA	0,00	0,00
Penjualan Hasil Perikanan - LRA	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	22.852.306.896,00	0,00

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Pembentukan Dana Cadangan	0,00	30.000.000.000,00
Belanja Tanah	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	55.196.480.481,00	49.911.050.361,00
Belanja Bangunan dan Gedung	148.677.679.734,16	44.116.614.476,83
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.734.545.493,00	80.427.924.503,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.555.573.820,00	5.800.034.859,00
Belanja Aset Lainnya	1.265.847.900,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00	17.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	324.430.127.428,16	227.755.624.199,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(301.577.820.532,16)	(227.755.624.199,83)

	2023	2022
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	0,00	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Kas Masuk

Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00

5.5.3.2 Arus Kas Keluar

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	132.013.494.535,55	116.117.304.499,50
Lain-lain	8.008.062,00	1.813.398,50
Jumlah Arus Kas Masuk	132.021.502.597,55	116.119.117.898,00

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	132.013.494.535,55	116.107.973.343,50
Utang PFK Tahun 2022	3.174.747,00	15.826.072,00
Saldo Kas Lainnya atas pembayaran Hutang Tahun 2022	6.156.409,00	0,00
Lain-lain (Koreksi Kesalahan Bank)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	132.022.825.691,55	116.123.799.415,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1.323.094,00)	(4.681.517,50)

Berdasarkan Arus Kas tersebut, maka saldo Kas menjadi sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	351.569.193.842,53	126.092.019.606,77
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(301.577.820.532,16)	(227.755.624.199,83)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1.323.094,00)	(4.681.517,50)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas selama Periode	49.990.050.216,37	(101.668.286.110,56)
Saldo Awal Kas 1 Januari 2023 dan 2023	205.215.285.510,95	306.875.002.592,11
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS Tahun 2022 (Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS Tahun 2021)	0,00	8.569.027,74

Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (Satpol PP dan Dinas Capil) Tahun 2022	0,00	1,66
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD (RSUD M.Th. Djaman) Tahun 2022	20.001,00	0,00
Penerimaan penyetoran kembali dana PER pada Sekretariat Daerah ke Kas Lainnya	6.382.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022	255.211.697.726,32	205.215.285.510,95

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum

1) Letak Geografis

Kabupaten Sanggau adalah salah satu dari Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan Ibukota di Sanggau, terletak diantara koordinat 1°10' Lintang Utara dan 0°35' Lintang Selatan, serta di antara 109°45' dan 111°11' Bujur Timur dengan luas 12.857,70 Km² atau sekitar 8,76% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkayang dan Sarawak (Malaysia Timur)
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ketapang
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Sanggau mempunyai 6 (enam) nilai strategis dilihat dari letak geografisnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Terletak ditengah-tengah provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan 6 (enam) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Bengkayang.
- b) Dilalui jalan lintas trans Kalimantan, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak melewati Tayan – Sosok – Pusat Damai – Kapuas sampai Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur Sarawak dan Brunai Darusalam. Lintas Trans Kalimantan ini direncanakan akan dibangun jalan kereta api, Borneo Rail Way
- c) Terletak pada jalur lintas Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d) Berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Negara Malaysia Timur (Sarawak) dan telah memiliki pelabuhan darat Internasional yaitu Pos Lintas Batas Entikong.
- e) Dilewati jalur Sungai Kapuas yang panjangnya $\pm$ 1.000 km, terpanjang di Indonesia. Jalur sungai kapuas ini juga dilewati kabupaten-kabupaten bagian timur Kalimantan Barat.
- f) Termasuk dalam wilayah atau Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang semula adalah Kapet Sanggau sekarang menjadi Kapet Khatulistiwa karena

bertambahnya wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang dan Kota Pontianak.

Selama Tahun 2023, Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu 24 hari. Sedangkan hari hujan terendah selama 14 hari pada bulan Juli. Rata-rata curah hujan bulanan bervariasi dari sebesar 195 mm (terendah) pada bulan Januari hingga sebesar 412 mm (tertinggi) pada bulan Desember.

Pada umumnya Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai, di antaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Kalbar yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan bermuara di Kota Pontianak. Sedangkan sungai-sungai kecil lainnya merupakan cabang dari Sungai Kapuas yang berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menurut jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau, sebagian besar adalah jenis tanah padsolik merah kuning batuan dan padat yang hampir merata di seluruh kecamatan, dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektar (44,80%). Sedangkan latosol merupakan jenis tanah dengan luas terkecil yang terdapat di Kabupaten Sanggau, yaitu 19,375 Hektar (1,06%) yang hanya terdapat di Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau.

2) Demografi

Penduduk Kabupaten Sanggau yang luas wilayahnya 12.857,70 km² atau 8,76% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Sanggau tahun 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, berjumlah 487.313 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 253.173 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 234.140 jiwa yang menyebar di 15 Kecamatan.

Penyebaran penduduk Kabupaten Sanggau tidak merata antara kecamatan satu dengan lainnya. Pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kabupaten Sanggau yaitu 38 jiwa per km², dengan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Parindu, yaitu 66 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Toba, yang hanya 13 jiwa per km². Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sanggau pada 2010 – 2019 sekitar 1,54 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan pada 2000 – 2010 yang

berkisar 1,65 persen per tahun. Adapun perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan (sex ratio) tahun 2019 sebesar 107. Nilai ini berarti bahwa setiap 107 jiwa laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan.

Dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 Kabupaten Sanggau sebesar 487.313 jiwa, terdapat 32.312 jiwa atau sekitar 6,63 persen penduduk usia 0-4 tahun, 43.238 jiwa atau sekitar 8,87 persen penduduk usia 5-9 tahun, 42.357 jiwa atau sekitar 8,69 persen penduduk usia 10-14 tahun, 47.320 jiwa atau sekitar 9,71 persen penduduk usia 15-19 tahun, 43.263 jiwa atau sekitar 8,88 persen penduduk usia 20-24 tahun, 38.760 jiwa atau sekitar 7,95 persen penduduk usia 25-29 tahun, 41.865 jiwa atau sekitar 9,73 persen penduduk usia 30-34 tahun, 42.933 jiwa atau sekitar 8,81 persen penduduk usia 35-39 tahun, 38.517 jiwa atau sekitar 7,90 persen penduduk usia 40-44 tahun, 31.490 jiwa atau sekitar 6,46 persen penduduk usia 45-49 tahun, 26.260 jiwa atau sekitar 5,39 persen penduduk usia 50-54 tahun, 22.108 jiwa atau sekitar 4,54 persen penduduk usia 55-59 tahun, 16.136 jiwa atau sekitar 3,31 persen penduduk usia 60-64 tahun, 10.026 jiwa atau sekitar 2,06 persen penduduk usia 65-69 tahun, 5.901 jiwa atau sekitar 1,21 persen penduduk usia 70-75 tahun dan 4.827 jiwa atau sekitar 0,99 persen penduduk usia diatas 75 tahun.

B. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Sanggau

Pemerintah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 9, tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1820).

Pemerintahan Kabupaten Sanggau dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin berlandaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bupati Sanggau Periode 2019-2024 yaitu PAOLUS HADI, S.IP, M.Si dan Wakil Bupati Sanggau Drs. YOHANES ONTOT, M.Si, merupakan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau

terpilih untuk Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, yang merupakan masa jabatan untuk periode ke-dua kalinya. Pj. Bupati Sanggau saat ini yaitu SUHERMAN, SH., MH menggantikan Bupati Sebelumnya yang sudah selesai masa jabatan.

1. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Kewenangan

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Sanggau diberikan kewenangan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Muatan undang-undang tentang pemerintahan daerah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
2. Urusan pemerintahan konkuren, dibagi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota;
3. Urusan pemerintahan umum, merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan prinsip tentang kriteria urusan pemerintahan tersebut, maka yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- o Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten / kota;
- o Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten /kota;
- o Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten / kota ; dan / atau
- o Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten / kota.

b. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Sanggau mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Pembangunan Daerah yang Bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Daerah dan pada Tahun 2010 menjadikan Daerah Kabupaten Sanggau sebagai

Pusat Agribisnis/Agroindustri, Perdagangan yang Maju, Pertambangan yang Ramah Lingkungan serta Peningkatan Pendapatan Daerah.

c. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kabupaten Sanggau terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Perangkat daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektifitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sanggau merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial,

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi;
8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
 17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
 18. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
 2. Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
 3. Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
 4. Kecamatan Tayan Hulu dengan tipe A;
 5. Kecamatan Meliau dengan tipe A;
 6. Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
 7. Kecamatan Entikong dengan tipe A;
 8. Kecamatan Parindu dengan tipe A;
 9. Kecamatan Mukok dengan tipe A;
 10. Kecamatan Bonti dengan tipe A;
 11. Kecamatan Balai dengan tipe A;

12. Kecamatan Beduai dengan tipe A;
13. Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
14. Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
15. Kecamatan Noyan dengan tipe A.

Dalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan tugas kecamatan.

g. Staf Ahli.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

Staf ahli sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

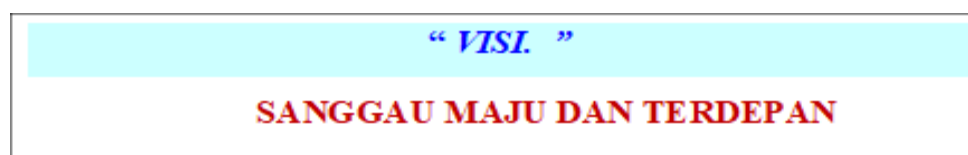
Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 15 disebutkan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada huruf a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Peralihan pasal 15 disebutkan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada huruf b. Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman yang melaksanakan urusan kesehatan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sanggau

Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah yang didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menetapkan visi dan misi sebagai arah kebijakan pembangunan yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Sanggau dijabarkan sebagai berikut :



Visi Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 adalah: “Sanggau Maju dan Terdepan”. Visi Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 di atas memiliki makna sebagai berikut :

- 1) **Maju:** Merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik;
- 2) **Terdepan:** Merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai wujud nyata dari visi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak yang terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi.

Adapun misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sanggau tersebut, adalah:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing;
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis;
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan; dan
8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

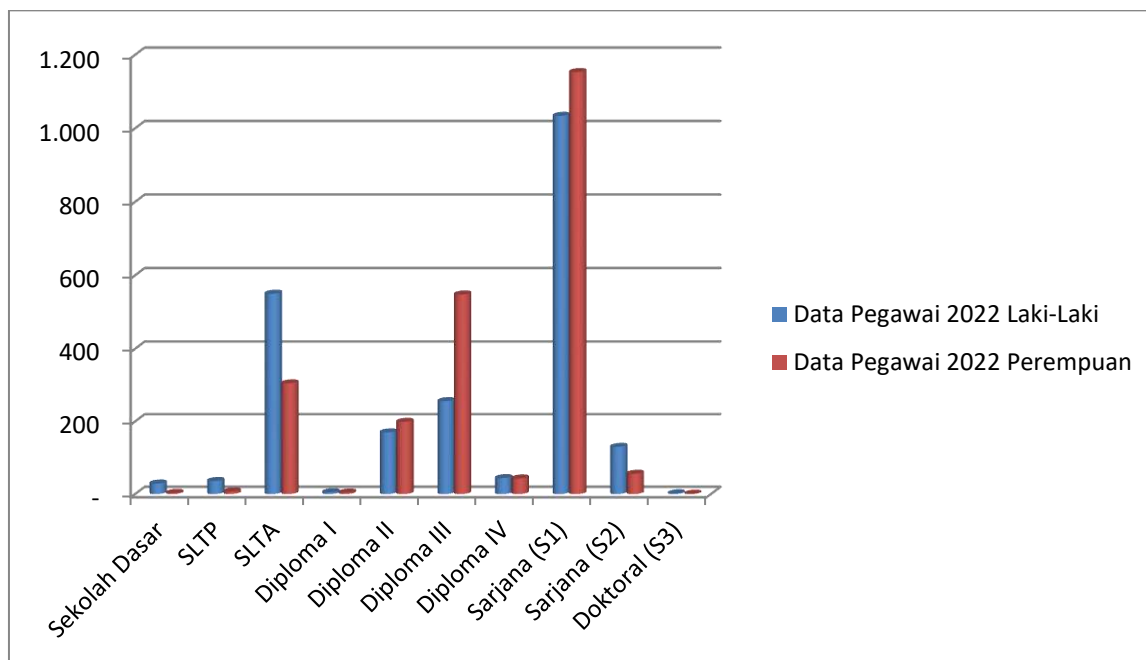
D. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 berdasarkan data BPS tahun 2022 didukung jumlah Pegawai Negeri Sipil di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebanyak 5.643 orang yang terdiri dari 3.186 orang

atau 56,45 persen laki-laki dan 2.457 orang atau 43,54 persen perempuan dengan komposisi sebagai berikut.

Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Sanggau

Tahun 2022 (Berdasarkan Pendidikan)



Sumber data : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2023

BAB VII PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Semoga Laporan Keuangan ini bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 10 Juni 2024

Pj. BUPATI SANGGAU



SUHERMAN